

**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL USAHA PENANGKAPAN DENGAN
ALAT TANGKAP *PURSE SEINE* YANG MENGGUNAKAN ALAT
BANTU RUMPON DI PANTAI PRIGI KECAMATAN WATULIMO
KABUPATEN TRENGGALEK**

**LAPORAN SKRIPSI
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN**

**OLEH:
YOGA EDWI PRIANANTA
NIM. 0310843003**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS PERIKANAN
MALANG
2008**

RINGKASAN

YOGA EDWI PRIANANTA. Penelitian Tentang Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Penangkapan Dengan Alat Tangkap *Purse Seine* Yang Menggunakan Alat Bantu Rumpon Di Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek (di bawah bimbingan **Ir. Nuddin Harahap, MP dan Zainal Abidin, SPI**)

Penelitian Ini Dilaksanakan Di Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur Pada bulan Nopember – Desember 2007.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi permasalahan sistem bagi hasil di pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, mendeskripsikan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan *purse seine* yang menggunakan alat Bantu rumpon, mengetahui ketergantungan nelayan *purse seine* terhadap pemilik modal (bakul), membandingkan pendapatan nelayan *purse seine* sebelum dan sesudah menggunakan rumpon, mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada penangkapan tersebut di pantai Prigi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu. Sedangkan pengambilan data dilakukan dengan survey. Responden diambil secara *purposive sample*. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan memakai teknik pengumpulan observasi, wawancara, studi pustaka. Untuk menganalisa data menggunakan deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.

Sistem bagi hasil merupakan cara yang sampai saat ini telah dapat diterima oleh hampir semua masyarakat nelayan yang pada dasarnya adalah alat kerjasama yang menghubungkan antara pemilik armada penangkapan dengan para tenaga kerja yang melakukan penangkapan, atau lebih dikenal dengan sebutan hubungan timbal balik antara juragan terhadap nahkoda beserta ABK-nya. Sistem pembagian hasil usaha penangkapan dengan alat tangkap *purse seine* yang menggunakan alat bantu rumpon ikan antara juragan darat dan awak kapal, yaitu (50%) untuk juragan darat dan (50%) untuk awak kapal

Kebanyakan nelayan pemilik di pesisir pantai Prigi dalam menjalankan usaha penangkapan dengan menggunakan alat bantu rumpon membutuhkan modal yang sangat besar kurang lebih 20 juta. Untuk mendapatkan modal sebesar itu nelayan *purse seine* melakukan pinjaman kepada pemilik modal yaitu bakul (pedagang ikan yang berskala besar). Kebanyakan pihak juragan darat dalam melakukan pinjaman lebih memilih lembaga nonformal (bakul) dari pada lembaga formal karena prosedurnya mudah, tanpa jaminan, tanpa bunga, bisa sewaktu-waktu dan hanya atas dasar kepercayaan, bila dibandingkan dengan lembaga formal lebih mudah memperoleh pinjaman, karena lembaga formal prosedur yang digunakan berbelit-belit dan belum tentu mendapat pinjaman yang diinginkan. Oleh karena itu timbul ketergantungan nelayan *purse seine* terhadap pemilik modal. Hubungan ini bersifat struktural fungsional dimana kedua belah pihak saling ketergantungan. Nelayan pemilik membutuhkan bakul untuk pembuatan rumpon, karena pembuatan rumpon membutuhkan dana yang cukup besar. Sebaliknya bakul membutuhkan hasil tangkapan dari nelayan pemilik untuk keberlangsungan usahanya.

Usaha penangkapan dengan alat tangkap purse seine tanpa menggunakan alat bantu rumpon pada KM. Sri Mulya ini memperoleh pendapatan sebesar Rp 23.821.417,- perbulan.Usaha penangkapan dengan alat tangkap purse seine yang menggunakan alat bantu rumpon pada KM. Sri Mulya ini memperoleh pendapatan sebesar Rp 81.411.625,- perbulan. Selisih pendapatan kapal *purse seine* yang menggunakan rumpon dengan produksi kapal *purse seine* yang tanpa menggunakan rumpon yaitu sebesar Rp 57.590.200,- per bulan atau 341,75 %. Artinya pendapatan kapal *purse seine* yang menggunakan rumpon terjadi kelipatan sebesar 3 (tiga) kali lipat lebih dari pada pendapatan kapal *purse seine* yang tanpa menggunakan rumpon.

Faktor Pendukung usaha penangkapan dengan menggunakan alat bantu penangkapan berupa rumpon yaitu (1) Sistem rumpon yang dapat memusatkan gerombolan ikan mempermudah nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan; (2) Dalam melakukan penangkapan, nelayan langsung menuju *fishing ground*; (3) Bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Trenggalek yang mendanai pembuatan dan pemasangan rumpon. Adapun kendala dalam usaha penangkapan dengan menggunakan rumpon antara lain (1) Rumpon hilang terseret arus laut karena tali jangkar tidak mampu menahan tahanan arus terhadap tali jangkar dan traktor; (2) Rumpon rusak karena tali rumpon terputus terpotong oleh baling-baling kapal yang lewat di perairan, pelampung tertabrak oleh kapal, atau karena vandalisme (dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab); (3) Dalam membeli hasil tangkapan bakul melakukan potongan terhadap hasil tangkap nelayan.; (4) Rumpon yang baru dipasang kurang memberikan hasil maksimal, karena ikan yang berkumpul dalam rumpon masih sedikit.

Dari hasil kegiatan penelitian di wilayah perairan Prigi Kabupaten Trenggalek Jawa Timur, maka disarankan untuk: (1)Terhadap aparat PPN Prigi Perlu adanya peningkatan keamanan yang lebih baik terhadap usaha ini supaya dalam melakukan operasional dilaut maupun setelah pendaratan hasil tangkap nelayan bisa merasa aman; (2) Perlu adanya pengorganisasian nelayan rumpon untuk membentuk kelompok atau paguyuban antara nelayan rumpon untuk menghindari konflik antar nelayan; (3) Perlu adanya informasi kepada investor dalam mengembangkan usaha tersebut; (4) Perlu adanya peningkatan SDM dengan cara meningkatkan tingkat pendidikan supaya lebih mampu mengelola sumberdaya perikanan di prigi; (5) Perlu adanya kajian dalam 1 tahun untuk mengetahui besarnya keuntungan dan kelayakan usaha.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas ridho, rahmat dan hidayah-Nya semata, penulis dapat menyelesaikan laporan Penelitian tentang " Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Penangkapan Dengan Alat Tangkap *Purse Seine* Yang Menggunakan Alat Bantu Rumpon Di Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Jawa Timur" ini mulai dari penyusunan, pelaksanaan, dan penulisan. Tidak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana karena beliau Allah SWT tunjukkan kebenaran.

Penelitian ini menjelaskan tentang permasalahan sistem bagi hasil di pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, mendiskripsikan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan *purse seine* yang menggunakan alat Bantu rumpon, mengetahui ketergantungan nelayan *purse seine* terhadap pemilik modal (bakul), membandingkan pendapatan nelayan *purse seine* sebelum dan sesudah menggunakan rumpon, mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada penangkapan tersebut di pantai Prigi.

Sehubungan dengan terselesaikannya laporan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. Nuddin Harahap, MP selaku dosen pembimbing I dan Bapak Zainal Abidin, SPI selaku dosen pembimbing II atas waktu, bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan pada penulis.
2. Bapak Kamto, Bapak Gani, Bapak Dadang, Bapak Abi serta Bapak Ambar Kualif yang telah memberikan informasi, bantuan dan kerjasama yang baik selama Penelitian.

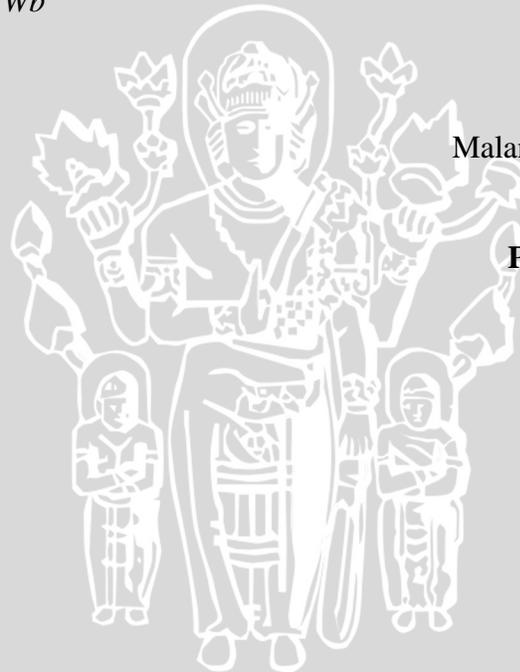
3. Seluruh keluarga di Prigi yang banyak memberikan dorongan moral bagi terselesainya laporan Penelitian.
4. Kawan – kawanku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu serta semua pihak yang telah membantu terselesainya penulisan laporan ini.

Akhir kata penulis mohon maaf apabila ada kata – kata yang kurang berkenan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan ini. Penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Malang, 19 Februari 2008

Penulis



DAFTAR ISI

RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan penelitian	10
1.5 Tempat dan Waktu	10
II. TINJUAN PUSTAKA	11
2.1 Potensi Wilayah Pesisir Pantai Prigi	11
2.1.1 Jumlah Aramada Perikanan Dan Jenis Alat Tangkap	12
2.1.2 Produksi Perikanan	13
2.2 Pengertian Umum Bagi Hasil	13
2.3 Pengertian Sistem Bagi Hasil Penangkapan	14
2.4 Pranata Kebudayaan	17
2.5 Penertian Konflik	23
2.6 Kebijakan Pembagian Hasil Tangkap	25
2.7 Alat tangkap <i>Puse Seine</i>	26
2.7.1 Pengertian <i>Purse Seine</i>	26
2.7.2 Jenis-Jenis <i>Purse Seine</i>	27
2.8 Pengertian Rumpon	29
2.9 Proses Penangkap.....	29

2.10 Sistem Gadangan	30
III. METODE PENELITIAN	32
3.1 Penentuan Lokasi	33
3.2 Obyek Penelitian	33
3.3 Jenis dan Sumber Data	34
3.3.1 Data Primer	34
3.3.2 Data Skunder	34
3.4 Metode pengumpulan data	35
3.5 Analisa Data	37
3.5.1 Deskriptif Kuantitatif	37
3.5.2 Deskriptif Kualitatif	38
IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN	40
4.1 Letak Geografis	40
4.2 Topografi	40
4.3 Keadaan Sosial Penduduk	41
4.4 Keadaan Umum Perikanan	44
4.4.1 Kegiatan Usaha Perikanan	44
4.4.2 Musim Penangkapan	45
4.4.3 Jumlah Armada Perikanan dan Jenis Alat Tangkap	45
4.4.4 Lembaga Perikanan	51
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	57
5.1 Nelayan <i>Purse Seine</i> Pesisir Pantai Prigi	57
5.1.1 Perilaku Masyarakat Pesisir	57
5.1.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Tasikmadu	57
5.2 Profil Alat Tangkap <i>Purse Seine</i> Dan Alat Bantu Rumpon	60
5.2.1 Alat Tangkap <i>Purse Seine</i>	60
5.2.2 Alat Bantu Rumpon	61
5.3 Struktur Masyarakat	65
5.3.1 Struktur Organisasi dan Tenaga Kerja	66

5.3.2 Pola Hubungan <i>Patron-Clie</i> n Pada Usaha Penangkapan Dengan Alat Tangkapan <i>Purse Seine</i> Yang Menggunakan Alat Bantu Rumpon	70
5.4 Sistem Bagi Hasil	71
5.4.1 Kelembagaan bagi hasil	72
5.4.2 Sistem Bagi Hasil Pada Masyarakat Nelayan	72
5.5 Identifikasi Permasalahan Sistem Bagi Hasil	76
5.6 Bagi Hasil Pada Usaha Penangkapan Dengan Alat Tangkapan <i>Purse Seine</i> Yang Menggunakan Alat Bantu Rumpon.....	79
5.7 Ketergantungan Nelayan <i>Purse Seine</i> Terhadap Pemilik Modal (Bakul)	83
5.8 Pendapatan Sebelum dan Setelah Menggunakan Rumpon	84
5.8.1 Pendapatan Sebelum Menggunakan Rumpon	84
5.8.2 Pendapatan Setelah Menggunakan Rumpon	85
5.8.3 Pembagian Hasil Tangkap Sebelum Dan Sesudah Menggunakan Rumpon.....	88
5.9 Faktor Yang Mempengaruhi Usaha	89
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	90
6.1 Kesimpulan	90
6.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	95

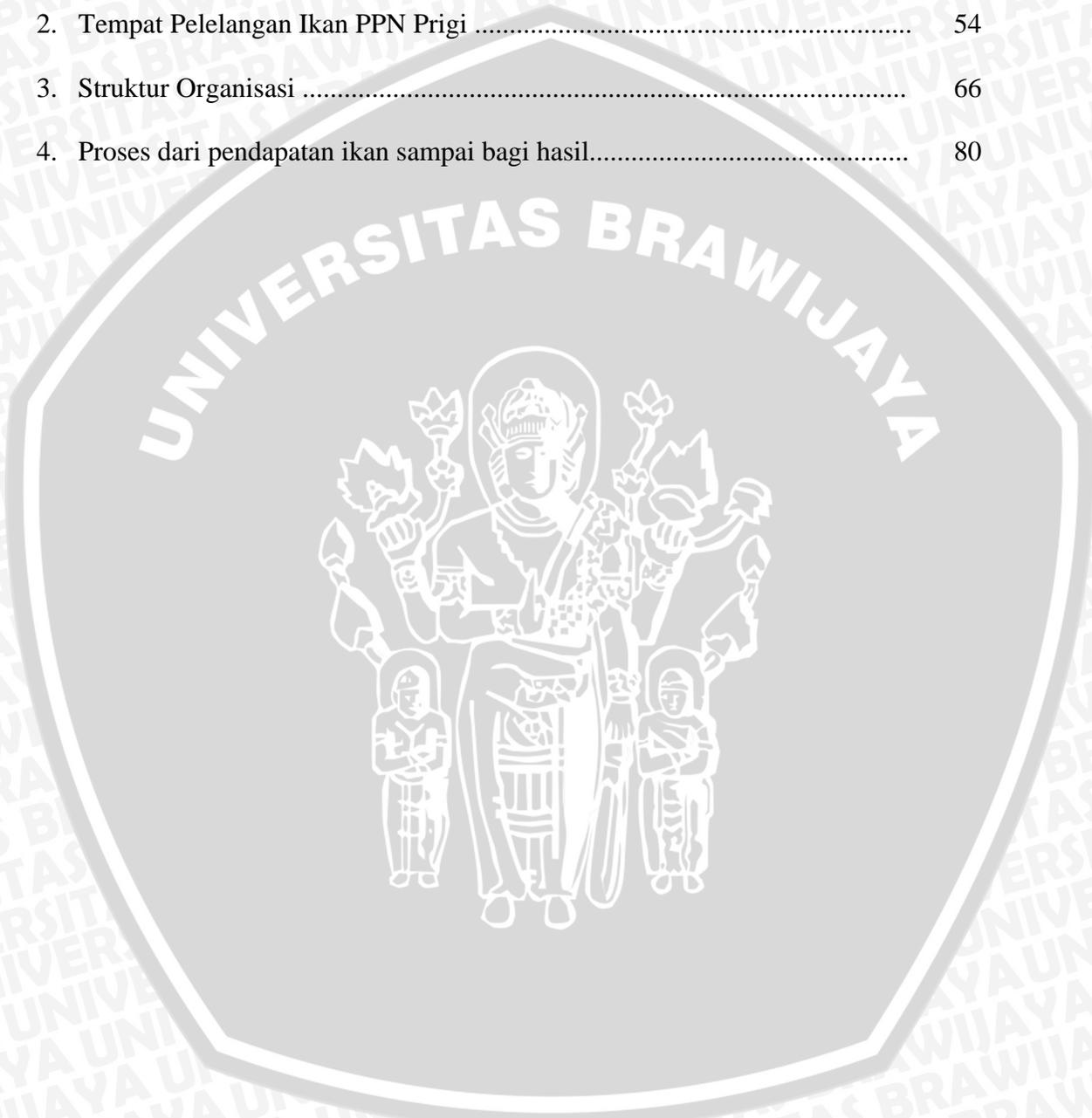


DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Jumlah Armada Penangkapan Menurut Ukuran Kapal di PPN Prigi Tahun 1999–2005.....	12
Tabel 2. Jenis Ikan Terbanyak di PPN Prigi Tahun 2005.....	13
Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Tasikmadu Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2007.....	41
Tabel 4. Komposisi Nelayan di PPN Prigi.....	41
Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Tasikmadu Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	42
Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Tasikmadu Berdasarkan Usia.....	43
Tabel 7. Jumlah Armada Penangkapan Menurut Ukuran Kapal di PPN Prigi Tahun 1999–2006.....	45
Tabel 8. Jumlah Alat Tangkap Menurut Jenisnya di PPN Prigi Tahun 1999-2006.....	46
Tabel 9. Perkembangan Produksi Perikanan Tahun 1999–2006.....	48
Tabel 10. Pendaratan Ikan di PPN Prigi Tahun 2006.....	49
Tabel 11. Jenis Ikan Terbanyak di PPN Prigi Tahun 2005.....	50
Tabel 12. Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.....	52
Tabel 13. Jumlah Penduduk Desa Tasikmadu Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2007.....	58
Tabel 14. Komposisi Nelayan di PPN Prigi.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Komponen-Komponen Dari Pranata Sosial.....	21
2. Tempat Pelelangan Ikan PPN Prigi	54
3. Struktur Organisasi	66
4. Proses dari pendapatan ikan sampai bagi hasil.....	80



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Peta Kabupaten Trenggalek	95
2. Denah lokasi PKL di perairan Prigi, Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek	96
3. Lay Out Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	97
4. Tabel Modal Investasi Awal Dan Besarnya Nilai Penyusutan Pada Usaha Penangkapan Dengan Alat Tangkap <i>Purse Seine</i> Tanpa Alat Bantu Rumpon Pada KM. Sri Mulya Di Perairan Prigi Kabupaten Trenggalek.....	98
5. Perhitungan Modal Kerja Pada Usaha Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Alat Tangkap <i>Purse Seine</i> dan Alat Bantu Rumpon Pada KM. Sri Mulya Di Perairan Prigi Kabupaten Trenggalek.	99
6. Tabel Produksi Pada Usaha Penangkapan Dengan Alat <i>Purse Seine</i> Yang tanpa Alat Bantu Rumpon Pada Km. Sri Mulya Di Pantai Prigi Pada Bulan Oktober- Nopember 2005	101
7. Perhitungan Analisis Usaha Pada Usaha Penangkapan Ikan Dengan Alat Tangkap <i>Purse Seine</i> tanpa Menggunakan Alat Bantu Rumpon Pada KM. Sri Mulya Perairan Prigi Kabupaten Trenggalek.....	103
8. Tabel Modal Investasi Awal Dan Besarnya Nilai Penyusutan Pada Usaha Penangkapan Dengan Alat Tangkap <i>Purse Seine</i> menggunakan Alat Bantu Rumpon Pada KM. Sri Mulya Di Perairan Prigi Kabupaten Trenggalek	104

9. Perhitungan Modal Kerja Pada Usaha Penangkapan Dengan Alat Tangkap <i>Purse Seine</i> yang menggunakan Alat Bantu Rumpon Pada KM. Sri Mulya Perairan Prigi Kabupaten Trenggalek.....	105
10. Tabel Produksi Pada Usaha Penangkapan Dengan Alat <i>Purse Seine</i> Yang Menggunakan Alat Bantu Rumpon Pada Km. Sri Mulya Di Pantai Prigi Pada Bulan Oktober - Nopember 2007.....	107
11. Perhitungan Analisis Usaha Pada Usaha Penangkapan Ikan Dengan Alat Tangkap <i>Purse Seine</i> yang Menggunakan Alat Bantu Rumpon Pada KM. Sri Mulya Perairan Prigi Kabupaten Trenggalek.....	109
12. Gambar Pelampung Rumpon Laut Dalam	114
13. Gambar Proses Pembuatan Atraktor	114
14. Gambar Tali Utama dan Pemberat Rumpon Laut Dalam	114
15. Gambar bahan dari Atraktor (Daun Kelapa) dan Getek	115
16. Gambar Persiapan Sebelum Berangkat Ke <i>Fishing Ground</i>	115
17. Gambar Hasil Tangkapan	115
18. Gambar Fasilitas PPN Prigi	116
19. Konstruksi <i>Purse Seine</i>	117
20. Kontruksi Rumpon Laut Dalam	118



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laut Indonesia yang memiliki luas 5,8 juta km², dengan potensi sumberdaya terutama sumberdaya ikan yang cukup besar baik dari segi kuantitas maupun diversitas. Potensi lestari sumberdaya ikan laut diperkirakan sebesar 6,26 juta ton pertahun dari perairan ZEE sekitar 1,86 juta ton pertahun. Dari seluruh potensi sumberdaya ikan tersebut, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,01 juta ton pertahun atau sekitar 80% dari potensi lestari. Potensi sumberdaya perikanan tersebut apabila dikelompokkan berdasarkan jenis ikan, terdiri dari ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, demersal, udang, cumi-cumi, dan ikan karang (Purwanti, 2003).

Kawasan pesisir dan lautan yang dimiliki Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur membentang dengan garis pantai sepanjang \pm 96 km dimana sebagian besar pantainya berbentuk teluk yaitu terdiri dari Teluk Panggul di Kecamatan Panggul, Teluk Munjungan di Kecamatan Munjungan dan yang paling besar adalah Teluk Prigi di Kecamatan Watulimo dengan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sekitar 35.424 km². Kawasan tersebut berpotensi dalam menopang pembangunan daerah ke depan. Selain terdapat Pelabuhan Perikanan Nusantara bertaraf Nasional, di kawasan pesisir tersebut juga dikembangkan potensi sektor pariwisata. Berbagai kekayaan sumber alam tersebut bisa menjadi sumber penghidupan masa depan bila dimanfaatkan secara optimal dan dijaga kelestariaanya (DKP Trenggalek, 2005).

Pantai Prigi terletak di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Secara geografis, pantai Prigi menempati posisi wilayah paling selatan – timur dari Kabupaten

Trenggalek, pada koordinat $8^{\circ} 11' - 8^{\circ} 23'$ LS serta $111^{\circ} 41' - 111^{\circ} 44'$ BT (Peta LLN edisi 1992) dengan luas wilayah 15.444 ha. Pantai Prigi semula sebuah pantai yang termarginalkan. Perubahan pengelolaan sumberdaya perikanan terjadi ketika pantai ini berkembang menjadi salah satu pemasok sumberdaya perikanan, baik sekala lokal, nasional bahkan internasional sehingga kawasan tersebut berpotensi dalam menopang pembangunan daerah ke depan. Selain terdapat Pelabuhan Perikanan Nusantara bertaraf Nasional, di kawasan pesisir tersebut juga dikembangkan potensi sektor pariwisata seperti pantai Prigi, pantai Pasir Putih dan pantai Karanggongso.

Perairan Prigi sebagai penghasil ikan-ikan pelagis kecil adalah yang terbesar di Pantai Selatan Jawa. Keadaan daerah ini seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia dipengaruhi oleh angin musim (mosoon) Barat yang bertiup dari Desember-Februari dan angin musim Timur dari Juni-Agustus. Diantara kedua musim tersebut terdapat musim pancaroba masing-masing dari Maret-Mei dan September-November. Sifat perairannya juga sesuai dengan sifat dari angin-angin musim tersebut (Anonymous, 1993).

Dari data Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Kabupaten Trenggalek (2005), kawasan pesisir tersebut dihuni masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan sebanyak 6.235 orang. Nelayan tersebut terdiri dari: Nelayan alat tangkap *purse seine* (3.000), nelayan alat tangkap *gill net* (102), nelayan alat tangkap jaring klitik (72), nelayan alat tangkap pancing ulur (1.298), nelayan alat tangkap pukut pantai (1.008), nelayan alat tangkap payang (320), nelayan alat tangkap pancing tonda (255), nelayan alat tangkap pancing prawe (180).

Produksi perikanan diluar ubur-ubur dalam kurun waktu 1998 - 2002 meningkat dari 5.573,9 ton menjadi 15.157,6 ton, pada tahun 2003 mengalami penurunan menjadi 14.280,7 ton ,pada tahun 2004 meningkat lagi menjadi 17.794 ton dan pada tahun 2005

mengalami penurunan menjadi 14.346. Selama 5 (lima) tahun terakhir, jenis ikan yang dominan tertangkap adalah tongkol (*Euthynnus sp*), layang (*Decapterus sp*), lemuru (*Sardinella sp*), dan layur (*Trichiurus sp*), sedangkan jenis ubur-ubur tiba-tiba muncul pada tahun 2002 - 2003 (74.610,7 ton ubur-ubur) sehingga sebagian besar nelayan di Prigi melakukan kegiatan penangkapan ubu-ubur. Sampai saat ini sebagian besar ikan hasil tangkapan dipasarkan dalam bentuk ikan olahan seperti ikan kering, ikan pindang, ikan asap.

Di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang tepatnya di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek sebagian besar penduduknya adalah nelayan yang menggunakan alat tangkap *purse seine*. *Purse seine* merupakan perkembangan dari jaring lingkaran tradisional yang cara pengoperasiannya dengan jalan melingkari gerombolan ikan. Pengoperasian *purse seine* dilakukan oleh rata-rata 22 orang dengan menggunakan 2 buah kapal diantaranya kapal jaring atau *purse seine* dan kapal pengangkut hasil tangkap.

Purse seine merupakan suatu alat penangkap ikan yang terdiri dari lembaran jaring yang digabung menjadi satu, pada bagian tepi atasnya terdapat pelampung dan tepi bawahnya terdapat pemberat serta sejumlah cincin sebagai tempat berlalunya tali kolor. Di dalam pengoperasian *purse seine*, tali kolor ditarik sehingga cincin-cincin yang terpasang pada jaring mengumpul jadi satu membentuk kantong. Karena pengoperasiannya dengan cara menarik tali kolor, maka *purse seine* disebut jaring "Slerek" (Subani *et al*, 1989).

Pemakaian alat bantu pengumpul ikan dewasa ini merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan produktivitas alat penangkap ikan, dan keberadaan rumpon menjadi sangat dibutuhkan peranannya dengan makin kompetitifnya usaha penangkapan

ikan di laut, karena dengan menggunakan rumpon akan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi penangkapan ikan (Bambang, 2001).

Fungsi utama rumpon bagi perikanan adalah suatu sarana pengumpul ikan sehingga ikan dapat ditangkap dengan mudah dan dalam jumlah yang relatif banyak. Menurut Bambang (2001), rumpon fungsinya hanya sebagai pembantu, yaitu membantu untuk mengumpulkan ikan pada suatu titik atau tempat untuk kemudian dilakukan operasi penangkapan.

Pada tahun 2002, DKP Trenggalek memberikan 2 (dua) buah rumpon kepada nelayan Prigi dengan menggunakan alat tangkap pancing tonda untuk mengembangkan metode penangkapannya. Tetapi nelayan Prigi yang tidak menggunakan alat tangkap pancing tonda menanggapi negatif kebijakan ini dengan alasan penggunaan rumpon akan menghalangi ikan melakukan *migrasi* ke tepi. Dampak bagi nelayan *purse seine* khususnya dalam usaha penangkapannya adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencari ikan lebih lama karena jarak yang ditempuh semakin jauh, sebagai akibat dari ikan yang sudah tidak lagi bermigrasi ke tepi. Hal ini juga diperparah dengan semakin meningkatnya biaya operasional. Disamping itu, pantai Prigi berbatasan langsung dengan Samudera Hindia yang pada musim-musim tertentu terjadi gelombang besar sehingga nelayan tidak berani melaut. Hal ini mengakibatkan produksi ikan tidak bisa *kontinue* sehingga menjadi kendala bagi perkembangan industri pengolahan ikan.

Pada tahun 2004 terjadi protes penggunaan alat bantu rumpon yang telah merugikan nelayan khususnya yang menggunakan jaring *purse seine*. Untuk menghindari konflik agar tidak semakin parah, DKP Trenggalek memberikan sosialisasi fungsi dan manfaat rumpon kepada masyarakat nelayan Prigi. Sosialisasi ini juga diperuntukkan

bagi nelayan jaring *purse seine* tentang manfaat rumpon yang sebelumnya dianggap merugikan mereka.

Penggunaan rumpon sudah diterima di semua kalangan masyarakat nelayan Prigi pada tahun 2006. Setelah dilakukan uji coba, rumpon ternyata membantu nelayan dalam penangkapan. Rumpon ini mampu meningkatkan produktivitas hasil tangkapan. Penerimaan penggunaan rumpon juga dilatar belakangi adanya musim paceklik yang menyebabkan kerugian pada usaha penangkapan.

Menurut Suyanto (2005) dalam Suharti, *et al* (2005) untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional, selain dipengaruhi sejumlah kelemahan internal, juga karena pengaruh faktor eksternal. Keterbatasan pendidikan, kurangnya kesempatan untuk mengakses dan menguasai teknologi yang lebih modern dengan ramah lingkungan, dan tidak dimilikinya modal yang cukup adalah faktor-faktor internal yang sering kali menyulitkan usaha-usaha untuk memberdayakan kehidupan para nelayan tradisional. Di lain pihak, ada sejumlah faktor eksternal, seperti makin terbatasnya potensi sumberdaya laut yang bisa dimanfaatkan nelayan, persaingan yang makin intensif, konflik alat tangkap dan klaim wilayah antar nelayan yang berkepanjangan, mekanisme pasar, posisi tawar nelayan di hadapan tengkulak dan keadaan infrastruktur perikanan yang tidak mendukung makin memperparah keadaan.

Dalam kaitan bisnis penangkapan ikan di pantai Prigi, seorang pemilik perahu/kapal tidak menentukan “target minimal” yang harus dipenuhi atau dicapai oleh para nahkoda atau awak kapal/perahunya berkenaan dengan hasil tangkapan ikannya. Kendatipun demikian, banyak atau sedikitnya hasil ikan sama sekali tidak berpengaruh terhadap sistem pembagian hasil ikan diantara juragan darat dan awak kapal, serta anggota nelayan lain yang termasuk anggota kelompok nelayan tersebut, dan atau orang-

orang lain yang terlibat dalam proses persiapan dan pelaksanaan operasi penangkapan ikan. Berapapun hasil perolehan ikan, sistem pembagian hasilnya tetap tidak berubah.

Menurut penelitian LSM PAMA (2003), secara garis besar nelayan pantai Prigi sistem penangkapannya adalah sistem jaring. Terutama jaring besar yaitu pada alat tangkap *purse seine* yang keberadaannya terus berkembang, kecuali sistem lain yaitu alat tangkap payang, bagan, jaring tarik dan *gill net*. Dalam masyarakat nelayan *purse seine* pantai Prigi sistem bagi hasilnya, secara normatif dikenal dengan sistem 1/3 bagian untuk awak kapal dan 2/3 bagian untuk nelayan pemilik yaitu juragan darat.

Sedangkan sistem bagi hasil nelayan *purse seine* yang menggunakan alat bantu rumpon di daerah pesisir pantai Prigi sistem bagi hasilnya menurut nelayan *purse seine* setempat secara normatif dikenal dengan sistem 50% bagian untuk awak kapal dan 50% bagian untuk nelayan pemilik yaitu juragan darat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian Skripsi dengan judul “Analisis sistem bagi hasil usaha penangkapan dengan alat tangkap *purse seine* yang menggunakan alat bantu rumpon di kawasan pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek”, Penelitian ini memfokuskan pada tingkat pendapatan nelayan dan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh nelayan *purse seine* yang menggunakan alat bantu rumpon.

1.2 Perumusan masalah.

Cara bagi hasil dalam kerjasama usaha penangkapan ikan yang saling menguntungkan antara nelayan dan juragan/pemilik kapal atau pemilik modal adalah satu alternatif sistem bagi hasil yang dapat berkembang karena kedua belah pihak mempunyai bentuk posisi tawar menawar dalam menentukan keeratan kerjasama. Pada

umumnya kedua belah pihak masing-masing mempunyai strategi usaha yang keduanya harus memadukannya. Dasar strategi usaha itu, selain dari pertimbangan untuk kelangsungan pengembangan usaha dan kesepakatan bekerja, lebih dari itu terbinanya saling percaya dalam usaha itu. Misal pemilik kapal menyerahkan pengelolaan kapal dan peralatan penangkapan ikan kepada Nahkoda, sehingga Nahkoda merasa memiliki kepastian pendapatan karena secara terbuka dapat dihitung. Penyerahan pengelolaan kapal telah memposisikan kedudukan Nahkoda yang sangat menentukan bagi ABKnya dan kedudukan merupakan kehormatan bagi seorang pelaut. Ditempat lain cara bagi hasil yang diterapkan pada dasarnya mengikuti ABK untuk turut menanggung resiko kerugian (Manadiyanto *et al.*, 1994; Sastrawidjaja *et al.*, 1992) Alim Isnansetyo, *et al* (2003).

Sistem bagi hasil penangkapan dengan alat tangkap *purse seine* di daerah pesisir pantai Prigi secara umum nelayan pemilik membebaskan biaya eksploitasi atau biaya operasional kepada para nelayan pendega dengan cara ditanggung bersama. Akibatnya ada dua pandangan yang berbeda, bahwa pihak pandega dengan aturan bagian dari sistem setempat tersebut merasa kurang puas seharusnya pendega tidak ikut menanggung biaya eksploitasi. Berbagai hal yang mendasarinya adalah bahwa sebagian besar nelayan pendega dari golongan ekonomi lemah tidak mampu menjamin persediaan bahan makanan yang cukup. Disisi lain pihak pemilik merasa bahwa hak yang diterima adalah cukup wajar, mengingat bahwa investasi untuk pemilikan alat tangkap cukup besar.

Disamping itu menurut pandangan nelayan pemilik, bahwa pihak nelayan pendega telah banyak diuntungkan dari pendapatan uang lauk/lawuhan (bagian ikan

pada setiap kesempatan operasi di laut yang diuangkan) dan uang insentif (hadiah pada hari raya atau saat hasil tangkapan melimpah).

Dalam sistem bagi hasil pada alat tangkap *purse seine* yang menggunakan alat bantu rumpon kebanyakan nelayan pemilik mendapatkan pinjaman modal dari bakul (pedagang ikan). Dalam pengembalian pinjaman kepada bakul, seluruh hasil tangkap nelayan *purse seine* yang di peroleh dari hasil penangkapan di rumpon tersebut harus dijual kepada bakul yang memberikan pinjaman.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan menggambarkan kerangka berpikir sebagai berikut:

Kajian Teori/normatif

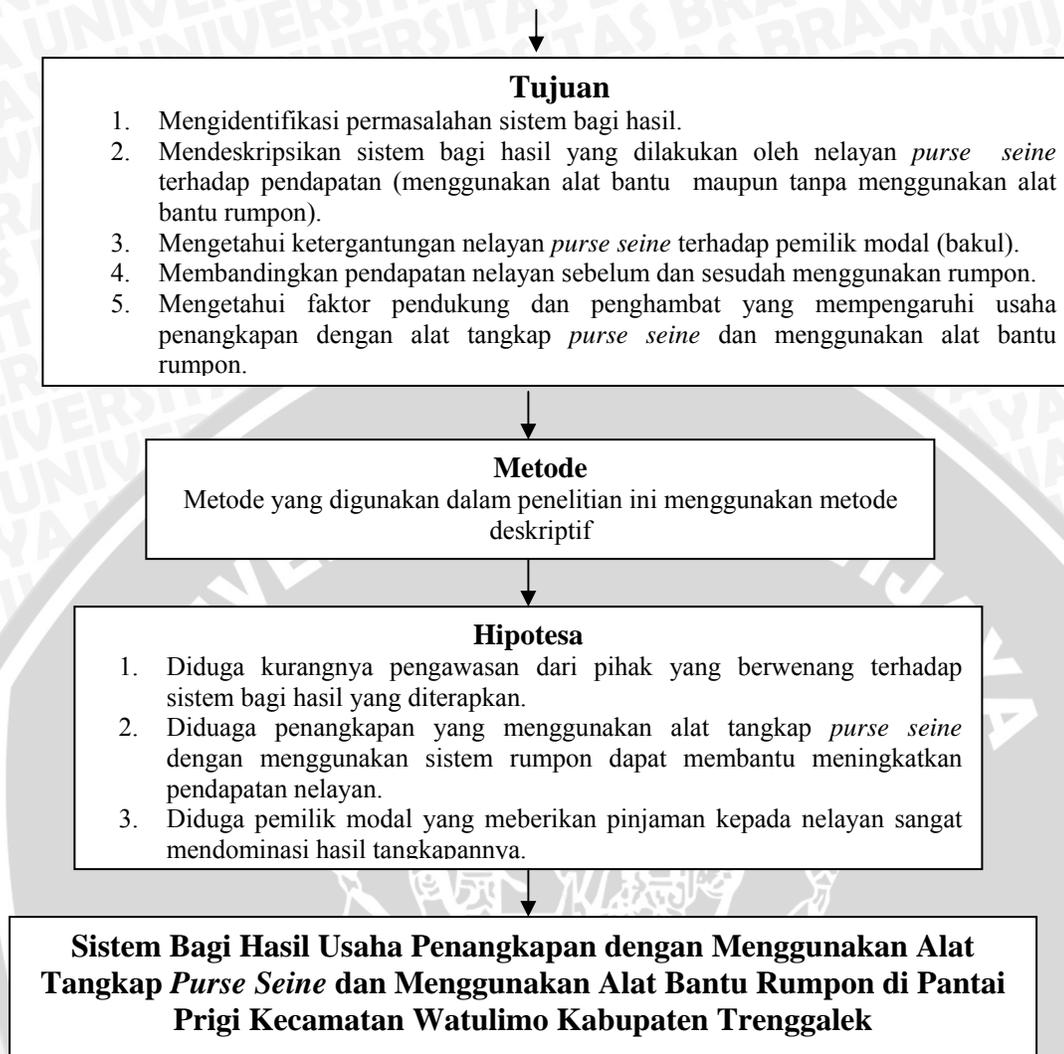
1. Sistem bagi hasil usaha penangkapan oleh juragan dan nelayan didaerah Palembang tampaknya berbeda dengan daerah lainnya. Usaha penangkapan di Juana, Tegal, Prigi dan Pekalongan menerapkan manajemen usaha yang mengarah pada pembebanan resiko kerugian melalui cara bagi hasil yang ditanggung bersama (Susilowati *et al.*, 1987) dan pemilik cenderung mengurangi resiko kerugiannya dengan memperbesar prosentase pembagian miliknya (Hariati dan Basuki, 1992).
2. Menurut Sastrawidjaja (1992) dalam Alim Isnansetyo, *et all* (2003) sistem bagi hasil merupakan cara yang sampai saat ini telah dapat diterima oleh hampir semua masyarakat nelayan yang pada dasarnya adalah alat kerjasama yang menghubungkan antara pemilik armada penangkapan dengan para tenaga kerja yang melakukan penangkapan, atau lebih dikenal dengan sebutan hubungan timbal balik antara juragan terhadap nahkoda beserta ABK-nya

Kajian empiris/fakta

1. Sistem pembagian hasil ikan antara juragan darat dan awak kapal, yaitu (50%) untuk juragan darat dan (50%) untuk awak kapal setelah mendapat uang hasil penjualan ikan dari bakul (meminjamkan rumpon kepada nelayan) dengan potongan 10% dari hasil penangkapan sampai lunas
2. Tetapi kenyataan potongan 10% terus berlaku setelah sampai pelunasan rumpon, dengan alasan untuk pembuatan rumpon yang baru apabila terjadi kerusakan atau hilang. Sehingga mempengaruhi bagi hasil nelayan.

Masalah

1. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan *purse seine* dengan menggunakan alat bantu maupun tanpa menggunakan alat bantu rumpon (gadangan) di kawasan Prigi?
2. Bagaimana pengaruh penerapan sistem bagi hasil terhadap pendapatan nelayan *purse seine* (menggunakan alat bantu maupun tanpa menggunakan alat bantu rumpon)?
3. Sejauh mana ketergantungan nelayan *purse seine* terhadap pemilik modal (bakul) dalam usaha ini?
4. Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi nelayan *purse seine* dalam usaha penangkapan dengan alat tangkap *purse seine* dan menggunakan alat bantu rumpon?



1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi permasalahan sistem bagi hasil.
2. Mendeskripsikan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan *purse seine* dengan menggunakan alat bantu rumpon di kawasan Prigi.
3. Mengetahui ketergantungan nelayan *purse seine* terhadap pemilik modal (bakul).
4. Membandingkan pendapatan nelayan sebelum dan sesudah menggunakan rumpon.

5. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi usaha penangkapan dengan alat tangkap *purse seine* dan menggunakan alat bantu rumpon.

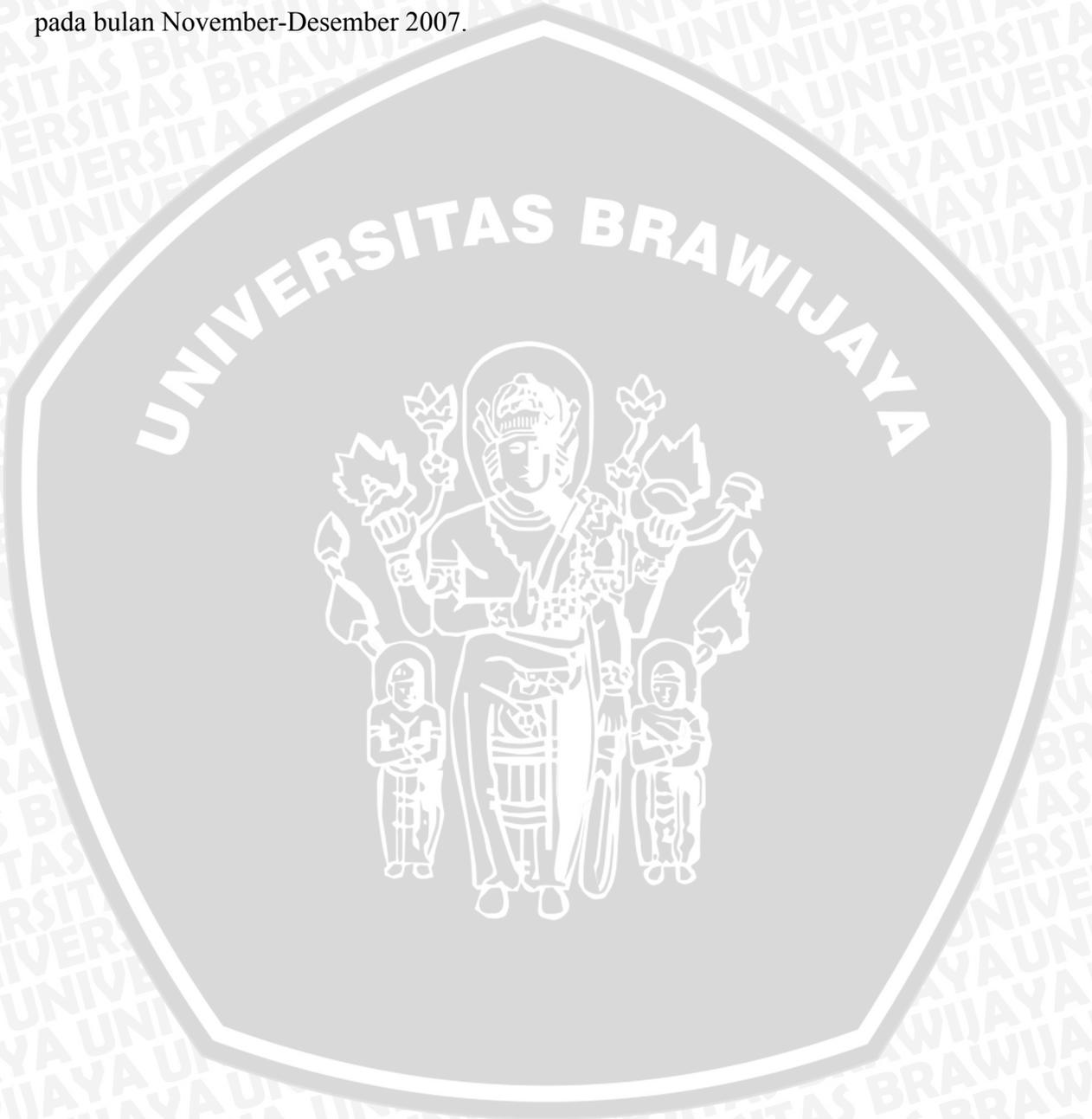
1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu kontribusi kepada beberapa pihak yaitu :

1. Mahasiswa dan lembaga akademis, untuk menambah khasanah keilmuan tentang permasalahan-permasalahan yang terkait dengan masalah-masalah di bidang perikanan terutama mengenai masalah sistem bagi hasil, khususnya pada masyarakat nelayan *purse seine* di kawasan Prigi serta sebagai salah satu bahan kajian untuk penelitian berikutnya.
2. Nelayan, memberikan alternatif sistem bagi hasil yang menguntungkan antara nelayan dengan pihak-pihak yang berkepentingan antara lain juragan darat dan bakul.
3. Pemerintah, sebagai pertimbangan dalam pembangunan perikanan kawasan Prigi khususnya dalam sistem bagi hasil.
4. Perusahaan, untuk menentukan langkah-langkah pengembangan usaha serta kebijakan yang berkenaan dengan usaha tersebut.
5. Bagi masyarakat di kawasan pesisir, sebagai informasi tambahan dalam usaha menggunakan rumpon pada pengoperasian alat tangkap "*purse seine*".

1.5 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan pesisir Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian adalah pada bulan November-Desember 2007.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Potensi Wilayah Pesisir pantai Prigi

Di wilayah pesisir pantai Prigi terdapat Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi yang dibangun di atas lahan seluas 27,5 Ha dengan luas tanah 11,5 Ha dan luas kolam labuh 16 Ha. Terletak di Teluk Prigi pada posisi koordinat $111^{\circ} 43' 58''$ BT dan $08^{\circ} 17' 22''$ LS, yang tepatnya di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Propinsi Jawa Timur. Dengan jarak ke ibu kota Propinsi (Surabaya) adalah ± 200 km, dan jarak ke ibu kota Kabupaten (Trenggalek) adalah ± 47 km.

Pada tahun 2005 perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah pelabuhan masih sedikit jumlahnya. Selain Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Prigi (PPPS Cabang Prigi), kegiatan perusahaan perikanan yang sudah menginvestasikan usahanya di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi adalah:

- a. PT. Prima Indo Bahari Sentosa bidang usaha *cold storage* dan pabrik es.
- b. PT. Bumi Mina Jaya bidang usaha tepung ikan dan pengolahan hasil perikanan.
- c. PT. Sumber Pangan Nasional bidang usaha *cold storage*.
- d. Perusahaan perseorangan sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan bidang usaha pengepakan ikan.
- e. Perusahaan pengelola ubur-ubur sebanyak 9 (sembilan) unit.

2.1.1 Jumlah Armada Perikanan dan Jenis Alat Tangkap

Jumlah armada perikanan tahun 2005 adalah 874 unit dengan ukuran kapal di bawah 30 GT, yaitu terdiri dari kapal berukuran <10 GT 694 unit (74,26%), 10–<20GT 105 unit (12,01%), dan 20–<30GT 120 unit (13,73%). Dibanding dengan tahun 2004 sebesar sebesar 862 unit, berarti mengalami peningkatan sebesar 12 unit (1,39%). Frekuensi kunjungan kapal tahun 2005 ini tercatat 33.529 kali yang berarti mengalami kenaikan sebesar 6.309 kali (23,18%) dari tahun 2004 sebesar 27.220 kali.

Berikut ini rincian jumlah armada penangkapan menurut ukuran kapal yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Kabupaten Trenggalek bisa dilihat pada Tabel1:

Tabel 1. Jumlah Armada Penangkapan Menurut Ukuran Kapal di PPN Prigi Tahun 1999–2005

No.	Tahun	Perahu Tanpa Motor	Kapal <10 GT	Kapal 10–<20 GT	Motor 20–<30 GT	Total
1.	1999	185	287	134	84	690
2.	2000	150	239	138	96	623
3.	2001	90	274	175	96	635
4.	2002	45	274	175	112	606
5.	2003	5	477	85	112	679
6.	2004	0	674	73	115	862
7.	2005	0	694	105	120	874
R (%)		0%	18%	1%	6%	5%

R : Rata-rata kenaikan/penurunan pertahun

Average rate of increase/decrease per years

Sumber: Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2005

Jumlah alat tangkap di PPN Prigi pada tahun 2005 adalah sebesar 1.757 unit yang terdiri dari Pancing Ulur 1.298 unit (73,88%), Pukat Cincin 240 unit (13,66%), Pancing Tonda 51 unit (2,90%), Pukat Pantai 42 unit (2,39%), Pancing Prawe 36 unit (2,05%), Jaring Klitik 36 unit (2,05%), Jaring Insang 34 unit (1,94%), dan Payang 20

unit (1,14%). Dibanding dengan alat tangkap pada tahun 2004 sebesar 1.556 unit, berarti mengalami peningkatan sebesar 201 unit (12,92%).

2.1.2 Produksi Perikanan

Perkembangan produksi hasil tangkap pada tahun 2005 volume jenis ikan yang terbanyak didaratkan di PPN Prigi adalah ikan cakalang, layang deles, layur, lemuru, tongkol como, tuna mata besar dan ubur-ubur. Produksi ubur-ubur hanya terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 58,95% dari produksi bulan tersebut. Jumlah produksi jenis ikan yang dominan adalah 12.973 ton atau 90,43% dengan nilai produksi Rp.45.820.250.000,-, sedangkan sisanya atau ikan jenis lainnya adalah sebesar 1.373 ton atau 9,57% dengan nilai produksi Rp. 5.249.600.000,-. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Jenis Ikan Terbanyak di PPN Prigi Tahun 2005

No.	Jenis Ikan	Volume (Ton)	Nilai (Rp. 000)
1.	Lemuru	3.502	3.951.750
2.	Tongkol como	2.602	13.755.050
3.	Layang deles	2.014	6.929.050
4.	Layur	1.297	6.841.500
5.	Ubur-ubur	1.245	747.000
6.	Tuna mata besar	1.179	7.678.350
7.	Cakalang	1.134	5.917.550
8.	Lainnya	1.373	5.244.250
	Jumlah	14.346	51.064.500

Sumber : Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2005

2.2 Pengertian umum bagi hasil

Menurut Pasal 1 Undang–undang No.16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan, arti bagi hasil perikanan:

Perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya.

Bagi perikanan laut: hasil ikan yang diperoleh dari penangkapan yang setelah diambil sebagian untuk “lawuhan” para nelayan penggarap menurut kebiasaan setempat dikurangi dengan beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan para nelayan penggarap.

Menurut Jenny dalam Tjondronegoro (1985) bagi hasil dalam pertanian merupakan suatu bentuk pemanfaatan tanah, dimana pembagian hasil terhadap dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja, dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil bruto tanah tersebut dan dalam bentuk natura sesuai dengan perkembangan usaha tani.

Menurut Dietzel dalam Tjondronegoro (1985) menganggap bagi hasil sebagai suatu perjanjian, dimana pemilik tanah mewajibkan keluarga buruh tani menggarap sebidang tanah, merupakan kesatuan usaha, selama waktu yang ditentukan dalam kontrak dengan memberikan bagian tertentu dari hasil bruto kepada penggarap sebagai upah.

Menurut Kobler dalam Tjondronegoro (1985) “Pengertian bagi hasil menunjukkan hubungan antara pemilik sebidang tanah atau orang lain yang berhak menggunakan, dengan penggarap. Bagi hasil merupakan suatu bentuk usaha, dimana pemungutan bunga (*rentetrekker*) tidak mengeksploitasi sasaran usaha dengan kerja sendiri atau sebagai pengusaha yang memimpin semua fungsi perusahaan. Orang yang menguasai bidang tanah tersebut menyuruh orang lain menggarapnya; yang menyerahkan tanah dan penggarap membagi bersama hasil bidang tanah itu menurut perbandingan umum yang tetap atau menurut perbandingan yang ditetapkan secara khusus”.

2.3 Pengertian sistem bagi hasil penangkapan

Menurut Sastrawidjaja (1992) dalam Alim Isnansetyo, *et all* (2003) sistem bagi hasil penangkapan merupakan cara yang sampai saat ini telah dapat diterima oleh

hampir semua masyarakat nelayan yang pada dasarnya adalah alat kerjasama yang menghubungkan antara pemilik armada penangkapan dengan para tenaga kerja yang melakukan penangkapan, atau lebih dikenal dengan sebutan hubungan timbal balik antara juragan terhadap nahkoda beserta ABK-nya. Usaha penangkapan di Palembang dengan menggunakan jaring Ampera atau Pukat Cincin Nahkoda dengan semua ABK-nya diberikan kepastian pendapatan yang akan mereka terima dengan cara penetapan harga ikan yang akan dibeli dari Nahkoda dengan memperhitungkan biaya eksploitasi dan pemeliharaan yang harus dibayar oleh juragan dan tidak dipikulkan kepada nelayan melalui pemotongan langsung dari jumlah hasil tangkapannya. Informasi kegiatan usaha penangkapan menyebutkan bahwa pemilik kapal atau juragan dan nahkoda serta Anak Buah Kapal (ABK) menjalin hubungan ekonomi penangkapan atas dasar usaha yang saling menguntungkan.

Cara bagi hasil dalam kerjasama usaha penangkapan ikan yang saling menguntungkan antara nelayan dan juragan/pemilik kapal atau pemilik modal adalah satu alternatif sistem bagi hasil yang dapat berkembang karena kedua belah pihak mempunyai bentuk posisi tawar-menawar dalam menentukan keeratan kerjasama. Pada umumnya kedua belah pihak masing-masing mempunyai strategi usaha yang keduanya harus memadukannya. Dasar strategi usaha itu, selain dari pertimbangan untuk kelangsungan pengembangan usaha dan kesepakatan bekerja, lebih dari itu terbinanya saling percaya dalam usaha itu. Misal pemilik kapal menyerahkan pengelolaan kapal dan peralatan penangkapan ikan kepada Nahkoda sehingga Nahkoda merasa memiliki kepastian pendapatan karena secara terbuka dapat dihitung. Penyerahan pengelolaan kapal telah memposisikan kedudukan Nahkoda yang sangat menentukan bagi ABKnya dan kedudukan merupakan kehormatan bagi seorang pelaut. Ditempat lain cara bagi

hasil yang diterapkan pada dasarnya mengikuti ABK untuk turut menanggung resiko kerugian (Manadiyanto *et al.*, 1994; Sastrawidjaja *et al.*, 1992) Alim Isnansetyo, *et all* (2003).

Sistem bagi hasil usaha penangkapan oleh juragan dan nelayan didaerah Palembang tampaknya berbeda dengan daerah lainnya. Usaha penangkapan di Juana, Tegal, Prigi dan Pekalongan menerapkan manajemen usaha yang mengarah pada pembebanan resiko kerugian melalui cara bagi hasil yang ditanggung bersama (Susilowati *et al.*, 1987) dan pemilik cenderung mengurangi resiko kerugiannya dengan memperbesar prosentase pembagian miliknya (Hariati dan Basuki, 1992).

Dalam kaitan bisnis penangkapan ikan di pantai Prigi, seorang pemilik perahu/kapal tidak menentukan “target minimal” yang harus dipenuhi atau dicapai oleh para juru mudi atau awak kapal/perahunya berkenaan dengan hasil tangkapan ikannya. Kendatipun demikian, banyak atau sedikitnya hasil ikan sama sekali tidak berpengaruh terhadap sistem pembagian hasil ikan diantara juragan darat dan awak kapal, serta anggota nelayan lain yang termasuk anggota kelompok nelayan tersebut, dan atau orang-orang lain yang terlibat dalam proses persiapan dan pelaksanaan operasi penangkapan ikan. Berapapun hasil perolehan ikan, sistem pembagian hasilnya tetap tidak berubah.

Menurut penelitian LSM PAMA (2003), secara garis besar nelayan pantai Prigi sistem penangkapannya adalah sistem jaring. Terutama jaring besar yaitu pada alat tangkap *purse seine* yang keberadaannya terus berkembang, kecuali sistem lain yaitu alat tangkap payang, bagan, jaring tarik dan *gill net*. Dalam masyarakat nelayan *purse seine* pantai Perigi, secara normatif dikenal dengan sistem 1/3 bagian untuk awak kapal dan 2/3 bagian untuk pemilik modal yaitu juragan darat. Namun, sejalan dengan semakin longgarnya aturan ikatan bagi hasil dan euforia reformasi, secara riil bagi hasil

berbalik menjadi 2/3 (65%) bagian untuk awak kapal dan 1/3 (35%) bagian untuk pemilik modal/ juragan darat. Hal ini terjadi karena:

1. Adanya budaya lawuan awak kapal yang berlebihan rata-rata 1-3 kantong plastik esekan dengan berat kurang lebih 33 kg per kantong plastik esek.
2. Posisi juragan darat yang lemah karena jumlahnya lebih sedikit dari pada jumlah awak kapal.
3. Adanya pelaksanaan bagi hasil para juragan darat yang tidak sama.
4. Adanya penyisihan ikan oleh pemikul.
5. Adanya penyisihan ikan “*krenthilan*” oleh awak kapal.
6. Kurangnya transparansi “*keterbukaan*” laporan keuangan juragan darat.

Sedangkan bagi hasil nelayan *purse seine* yang menggunakan alat bantu rumpon di daerah pesisir pantai Prigi menurut nelayan *purse seine* setempat secara normatif dikenal dengan sistem 50% bagian untuk awak kapal dan % bagian untuk pemilik modal yaitu juragan darat.

2.4 Pranata Kebudayaan

Kata “kebudayaan” berasal dari kata Sanskerta *buddhayah*, ialah bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti “budi” atau “akal”. Demikian, ke-budaya-an itu dapat diartikan “hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal”. Sehingga kebudayaan yaitu keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu (Koentjaraningrat, 1985)

Kebudayaan mempunyai tiga wujud: Wujud yang pertama adalah wujud ideal dari kebudayaan yang terdapat dalam kepala-kepala atau dengan kata lain dalam alam pikiran yang tidak dapat diraba atau difoto dari warga masyarakat dimana kebudayaan

yang bersangkutan itu hidup. Kebudayaan ideel ini dapat kita sebut adat tata kelakuan atau adat istiadat, maksudnya menunjukkan bahwa kebudayaan ideel itu berfungsi sebagai tata kelakuan yang mengatur, mengendalikan, memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat. Wujud kedua disebut sistem sosial mengenai kelakuan berpola dari manusia yang terdiri dari aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan, serta bergaul satu dengan yang lain sebagai rangkaian aktivitas manusia dalam suatu masyarakat yang terjadi di sekeliling kita sehari-hari, ini dapat diobservasi, difoto dan didokumentasi. Wujud ketiga disebut kebudayaan fisik merupakan seluruh total dari hasil fisik dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat yang berupa benda atau hal-hal yang bisa diraba, dilihat dan difoto. Kebudayaan antara lain merupakan keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya tersebut.

Adapun istilah peradapan dapat kita sejajarkan dengan bagian-bagian dan unsur-unsur dari kebudayaan yang halus dan indah seperti kesenian ilmu pengetahuan serta sopan-santun dan sistem pergaulan yang kompleks dalam suatu masyarakat, dan sering juga dipakai untuk menyebut suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan dan ilmu pengetahuan.

Perbedaan antara adat dan kebudayaan adalah soal lain, dan bersangkutan dengan konsepsi bahwa kebudayaan itu mempunyai tiga wujud, yaitu: (1) wujud ideel, (2) wujud kelakuan, dan (3) wujud fisik. Adat merupakan wujud ideel dari kebudayaan. Secara lengkap wujud itu dapat kita sebut *adat tata-kelakuan*, karena adat berfungsi sebagai pengatur kelakuan.

Disini adat dibagi dalam empat tingkat: Tingkat yang pertama adalah tingkatan yang paling luas ruang lingkupnya, tingkat ini adalah ide-ide yang mengkonsepsikan

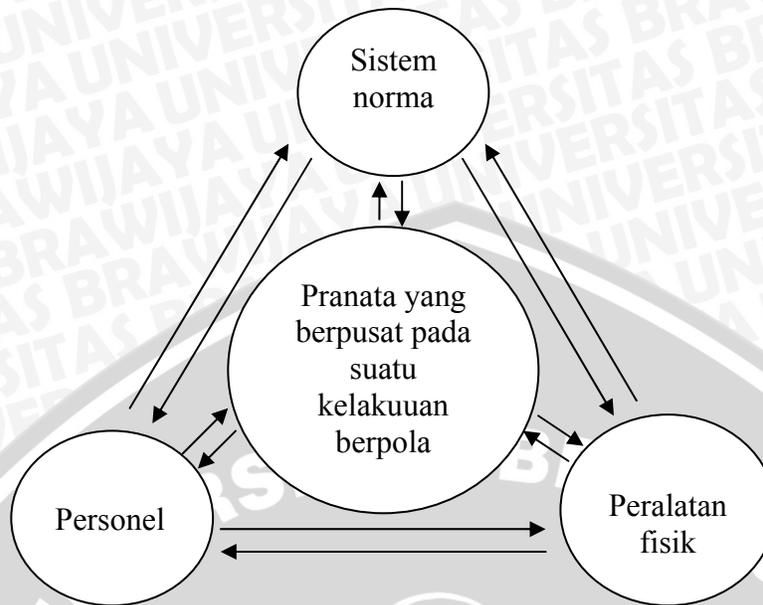
hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat. Konsepsi-konsepsi itu biasanya luas dan kabur atau tidak rasional biasanya berakar dalam jiwa manusia karena dalam kenyataannya jarang terjadi bahwa manusia itu dapat mencapai suatu hasil yang sama sekali terlepas dari usaha atau bantuan orang lain, tingkat ini dapat kita sebut sistem nilai-budaya. Tingkat adat kedua adalah sistem norma adalah nilai-nilai budaya yang sudah terkait kepada peranan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat. Peranan manusia dalam kehidupannya banyak dan sering berubah. Tingkat adat ketiga adalah sistem hukum (baik hukum adat maupun hukum tertulis) hukum sudah jelas mengenai bermacam-macam sektor hidup yang sudah terang batas-lingkupnya. Tingkat adat keempat adalah aturan khusus yang mengatur aktivitas-aktivitas yang amat jelas dan terbatas ruang lingkupnya dalam kehidupan masyarakat. Sehingga adat adalah bagian ideel dari kebudayaan.

Jadi suatu sistem nilai-budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat, karena suatu sistem nilai-budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia, sehingga mereka anggap amat bernilai dalam hidupnya, itulah sebabnya nilai-nilai-budaya tadi sukar diganti dengan nilai-nilai-budaya lain dalam waktu yang singkat. Konsep nilai-budaya atau *cultural value system* itu banyak dipakai dalam ilmu sosial yang terutama memfokuskan kepada kebudayaan dan masyarakat dan baru secara sekunder kepada manusia sebagai individu dalam masyarakat. Suatu sistem nilai budaya biasanya dianut oleh suatu persentase yang besar dari warga suatu masyarakat. Sebaliknya, karena berada dalam jiwa individu suatu sikap sering hanya ada pada individu-individu tertentu dalam masyarakat, yang berpengaruh dalam sistem nilai-budaya adalah sikap segan terhadap pekerjaan yang bersifat memberi pelayanan pada orang lain. Suatu nilai-budaya

yang perlu dimiliki oleh banyak manusia Indonesia dari semua lapisan masyarakat adalah nilai-budaya yang berorientasi ke masa depan, suatu nilai budaya semacam ini akan mendorong manusia untuk melihat dan merencanakan masa depan yang lebih saksama dan teliti, dan oleh karena itu akan memaksa manusia untuk hidup berhati-hati dan untuk hemat. Suatu nilai-budaya lain yang juga perlu adalah nilai-budaya yang berhasrat untuk mengeksplorasi lingkungan alam dan kekuatan-kekuatan alam. Suatu nilai semacam itu akan menambah kemungkinan inovasi, terutama inovasi dalam teknologi.

Adapun pranata itu mengenai kelakuan berpola manusia dalam kebudayaan yang menurut fungsi-fungsi khasnya dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam masyarakat, sehingga kelakuan berpola manusia di dalam muka bumi ini berbeda-beda dan pranata tersebut berjalan sesuai dengan kebudayaan dalam suatu masyarakat yang ada.

Pranata tersebut merupakan kelakuan berpola dari manusia dalam kebudayaan. Ada tiga wujud kebudayaan itu, ialah: (i) wujud ideel, (ii) wujud kelakuan, dan (iii) wujud fisik dari kebudayaan. Seluruh total dari kelakuan manusia yang berpola, tentu bisa kita perinci menurut fungsi-fungsi khasnya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia dalam masyarakatnya. Suatu sistem aktivitas khas dari kelakuan berpola (wujud kedua dari kebudayaan) beserta komponen-komponennya, ialah sistem norma dan tata kelakuannya (wujud pertama dari kebudayaan) dan peralatannya (wujud ketiga dari kebudayaan), ditambah dengan manusia dan personil-personilnya yang melaksanakan kelakuan berpola, itulah yang merupakan suatu pranata atau *institution*.



Gambar 1 Komponen-komponen dari pranata sosial

(Sumber: Koentjoroningrat, 1985)

Pranata ini di golongan menjadi suatu daftar dari tujuh sampai sepuluh golongan pranata, yang bentuknya akan menyerupai daftar dari ketujuh *unsur kebudayaan universal* (ialah unsur-unsur kebudayaan yang pasti ada dalam tiap kebudayaan di manapun juga di muka bumi ini). memang pranata-pranata kebudayaan itu dapat kita anggap sebagai suatu perincian lebih lanjut dari ketujuh unsur kebudayaan universal itu (Koentjoroningrat, 1985).

Di bawah ini akan dicantumkan suatu daftar dari beberapa puluh pranata kebudayaan yang digolongkan kedalam delapan kelompok, dengan memakai delapan kebutuhan hidup manusia sebagai prinsip penggolongan (tentu kebutuhan hidup manusia itu ada lebih dari delapan, tetapi disini hanya di cantumkan delapan hanya sebagai ilustrasi)

1. Pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan, ialah yang sering disebut *kinship* atau *domestik institutions*.

2. Pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk pencarian hidup, memproduksi, menimbun dan mendistribusikan harta dan benda, ialah *economic institutions*.
3. Pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna, ialah *educational institutions*.
4. Pranata-pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ilmiah manusia, melayani alam semesta sekelilingnya, ialah *scientific institutions*.
5. Pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan menyatakan rasa keindahannya, dan untuk rekreasi, ialah *aesthetic and recreational institutions*.
6. Pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau dengan alam gaib, ialah *religious institutions*.
7. Pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk mengatur kehidupan berkelompok secara besar-besaran atau hidup bernegara, ialah *political institutions*.
8. Pranata-pranata yang mengurus kebutuhan jasmani dari manusia ialah, *somatic institutions*.

Dalam sistem bagi hasil disini merupakan sebuah pranata kebudayaan yang termasuk dalam golongan pranata kebudayaan yang sesuai dengan no 2. Karena sistem bagi hasil sesuai dengan pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk pencarian hidup, memproduksi, menimbun dan mendistribusikan harta dan benda atau *economic institutions*. Karena sistem bagi hasil merupakan bentuk pembagian pendapatan dari hasil perolehan suatu penangkapan dan menentukan seberapa besar

pendapatan suatu individu atau manusia dalam masyarakat yang berada pada wilayah tertentu, sehingga bentuk tersebut termasuk dalam *economic institutions*.

Sistem bagi hasil penangkapan yang ada di Prigi merupakan pembagian hasil tangkapan antara pihak pemilik modal atau juragan darat dan pelaksana penangkapan atau awak kapal yang terdiri dari nakhoda dan ABKnya. Besarnya pendapatan yang diterima oleh kedua belah pihak merupakan kesepakatan awal mereka sebelum usaha tersebut dijalankan.

2.5 Pengertian Konflik

Syamsuddin (2004) merumuskan Konflik sebagai: "sebuah proses dimana sebuah upaya sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menghalangi usaha yang dilakukan oleh orang lain dalam berbagai bentuk hambatan (blocking) yang menjadikan orang lain tersebut merasa frustrasi dalam usahanya mencapai tujuan yang diinginkan atau merealisasi minatnya". Dengan demikian yang dimaksud dengan Konflik adalah proses pertikaian yang terjadi sedangkan peristiwa yang berupa gejolak dan sejenisnya adalah salah satu manifestasinya.

Ting Toomey seperti yang dikutip Budyatna (1994) dalam Wazir (2006), mendefinisikan konflik sebagai bentuk ketegangan inter atau intra personal yang intens sifatnya antara dua atau lebih pihak yang saling bergantung (*interdependent*) karena tujuan, kebutuhan, keinginan, nilai-nilai, keyakinan, dan atau sikap yang tidak sejalan. Selanjutnya Suseno (1999) dalam Wazir (2006) menjelaskan bahwa suatu konflik pecah apabila kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan bertabrakan. Bahwa kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan berkembang sampai ke konflik terbuka biasanya merupakan akibat emosi yang melekat pada pertentangan itu.

Menurut Johnson (1986) dalam Wazir (2006), berpendapat bahwa konflik adalah sesuatu yang selalu akan terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Setiap perubahan peradaban sosial yang terjadi akan membuahkan konflik kepentingan, hanya intensitas konflik tersebut yang berbeda satu sama lain. Lebih mendasar Dahrendorf (1959) mengemukakan teori konflik dalam Johnson (1986) dalam Wazir (2006) adalah sebagai berikut :

- Setiap masyarakat kapan saja tunduk pada proses perubahan; perubahan sosial ada di mana-mana.
- Setiap masyarakat kapan saja memperlihatkan perpecahan dan konflik; konflik sosial ada di mana-mana.
- Setiap elemen dalam masyarakat menyumbang disintegrasi dan perubahan.
- Setiap masyarakat didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain.

Menurut Pelly (1993) dalam Wazir (2006) menyebutkan tiga hal yang merupakan sumber-sumber konflik, yaitu :

1. Perebutan sumber daya, alat-alat produksi, dan kesempatan ekonomi
2. Perluasan batas-batas sosial budaya
3. Benturan kepentingan-kepentingan politik.

Konflik yang pertama biasanya dimenangkan individu atau kelompok yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang lebih unggul, baik ditinjau dari sumber daya manusia atau teknologi yang digunakan. Sumber konflik yang kedua dapat timbul apabila ada perbedaan tradisi, bahasa, hukum dan identitas sosial dapat menyatu dalam kepentingan politik yang dapat menyebabkan kecemburuan, prasangka sosial yang

pada gilirannya dapat menimbulkan konflik. Sumber konflik yang ketiga merupakan perbedaan kepentingan yang selalu terjadi dalam masyarakat yang heterogen.

Kawasan pantai yang merupakan perpaduan antara kegiatan di darat dengan di laut, dimana laut semakin memberikan kontribusi dalam penyediaan sumberdaya menyebabkan intensitas aktifitas ekonomi di wilayah ini sangat besar. Sehubungan dengan hal ini maka wilayah ini juga memiliki konflik yang tinggi pula. Konflik yang terjadi di Prigi mulanya pada tahun 2002, DKP Trenggalek memberikan 2 (dua) buah rumpon kepada nelayan Prigi dengan menggunakan alat tangkap pancing tonda untuk mengembangkan metode penangkapannya. Tetapi nelayan Prigi yang tidak menggunakan alat tangkap pancing tonda menanggapi negatif kebijakan ini dengan alasan, penggunaan rumpon akan menghalangi ikan melakukan *migrasi* ke tepi. Sehingga terjadi konflik ini dan terus memuncak yang mengarah pada *demo* menentang rumpon pada tahun 2004. Kemudian DKP Trenggalek memberikan sosialisasi fungsi dan manfaat rumpon kepada masyarakat nelayan Prigi.

2.6 Kebijakan Pembagian Hasil Usaha

Kebijakan tentang pembagian hasil usaha perikanan khususnya perikanan laut terdapat dalam Pasal 3 dan 4 Undang-undang No.16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan:

- Pasal 3 ayat (1) menyebutkan, Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi-hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut:
 - a. Jika dipergunakan perahu layar: minimum 75% dari hasil bersih
 - b. Jika dipergunakan kapal motor: minimum 40% dari hasil bersih

Ayat (2) menyebutkan pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat 1 pasal ini diatur oleh mereka sendiri dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menghindar terjadinya pemerasan dengan ketentuan bahwa perbandingan antara bagian terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).

- Pasal 4 menyebutkan, Angka bagian fihak nelayan penggarap sebagai yang tercabntum dalam pasal 3 ditetapkan dengan ketentuan, bahwa beban-beban yang bersangkutan dengan usaha perikanan itu harus dibagi sebagai berikut:
 - a. Beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan fihak nelayan penggarap: ongkos lelang, uang rokok/jajan/biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama dilaut. Biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yang disyahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II seperti untuk koperasi, dan pembuatan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain-lain.
 - b. Beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik: ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak,es dan lain sebagainya.

2.7 Alat Tangkap *Purse Seine*

2.7.1 Pengertian *Purse Seine*

Purse seine merupakan suatu alat penangkapan yang terdiri dari lembaran jaring yang digabung menjadi satu pada bagian tepi atasnya terdapat pemberat serta sejumlah

cincin sebagai tempat berlalunya tali kolor. Di dalam pengoperasian *purse seine*, tali kolor ditarik sehingga cincin-cincin yang terpasang pada jaring mengumpul jadi satu membentuk kantong. Karena pengoperasiannya dengan cara menarik tali kolor, maka disebut *purse seine* (Subani dan Barus, 1989).

Alat penangkap ikan muncul dalam masyarakat primitif dengan bentuk tombak, panah, lembing, dan pancing yang terbuat dari batu, kulit kerang, dan gigi binatang. Untuk menangkap ikan secara pasif di perairan dangkal. Munculnya jaring yang terbuat dari serat merupakan langkah penting dalam perkembangan alat tangkap. Kemudian berkembang pula berbagai jenis jaring insang, belat dari jaring serta alat yang lain yang terbuat dari jaring seperti jaring kantong, tangkul, pukut dan trawl.

Di Jawa Timur, terutama di pantai Utara Jawa, selat Madura dan pantai selatan Jawa Timur (Samudera Indonesia) terdapat beberapa jenis alat tangkap ikan, dimana untuk setiap daerah mempunyai ciri yang berbeda dengan daerah lain. Alat tangkap yang jenisnya sama untuk suatu daerah tertentu kadang-kadang mempunyai nama yang berbeda dengan daerah lain dan perbedaan pokok terdapat pada ukurannya. Perkembangan alat tangkap sudah mengalami kemajuan, dimana semua alat tangkap yang dipergunakan nelayan sudah menggunakan bahan sintesis.

2.7.2 Jenis-Jenis Jaring *Purse Seine*

Jenis *purse seine* yang satu sama lain ada perbedaan baik ukuran-ukurannya maupun bentuknya. Penggolongan dalam berbagai jenis *purse seine* ini didasarkan atas hal-hal seperti dibawah ini :

1. Berdasarkan jenis ikan yang akan ditangkap;
 - *Sardine purse seine*

- *Mackerel/Horse mackerel purse seine*
- Tuna dan *bonito purse seine*, yang dapat dibagi lagi menjadi :
 - a. *Small type tuna purse seine*
 - b. *Medium type tuna purse seine*
 - c. *Large type tuna purse seine*
- 2. Berdasarkan cara operasi;
 - *One boat purse seine*
 - *Two boat purse seine*
- 3. Berdasarkan waktu operasi;
 - *Day time sardine purse seine*
 - *Night time sardine purse seine*
 - *Day time mackerel/horse mackerel purse seine*
 - *Night time mackerel/horse mackerel purse seine*

Menurut Nomura. M, dan T. Yamazaki (1977) mengklasifikasikan purse seine menjadi tiga yaitu berdasarkan :

1. Jumlah kapal yang mengoperasikan yaitu satu kapal (*one boat system*) dan system dua kapal (*two boat system*).
2. Konstruksi alat tangkap yaitu menggunakan kantong (*bag net*) dan tanpa menggunakan kantong.
3. Badan jarring utama (*basic shapes*) yaitu tipe Amerika dengan satu kapal, tipe Jepang dengan satu kapal dan tipe Jepang dengan dua kapal.

2.8 Pengertian Rumpon

Menurut Sukandar (2005) rumpon adalah salah satu jenis alat bantu penangkapan ikan berbentuk alat, obyek atau struktur yang bersifat permanen atau sementara yang didesain dan dikonstruksi dari jenis material alami dan buatan yang dijangkar menetap atau dapat dipindahkan di laut dalam atau di laut dangkal. Menurut Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 1977, rumpon didefinisikan sebagai berikut: rumpon adalah alat bantu penangkap ikan yang dipasang dan ditempatkan pada perairan laut.

Pemakaian alat bantu pengumpul ikan dewasa ini merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan produktivitas alat penangkap ikan, dan keberadaan rumpon menjadi sangat dibutuhkan peranannya dengan makin kompetitifnya usaha penangkapan ikan di laut, karena dengan menggunakan rumpon akan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi penangkapan ikan (Bambang, 2001).

Fungsi utama rumpon bagi perikanan adalah suatu sarana pengumpul ikan sehingga ikan dapat ditangkap dengan mudah dan dalam jumlah yang relatif banyak. Menurut Bambang (2001), rumpon fungsinya hanya sebagai pembantu, yaitu membantu untuk mengumpulkan ikan pada suatu titik atau tempat untuk kemudian dilakukan operasi penangkapan.

2.9 Pengoperasian Alat Tangkap

Kegiatan menuju lokasi penangkapan dilakukan setelah persiapan perlengkapan telah selesai. Nahkoda kapal dan anak buah kapal (ABK) naik ke atas kapal, sebelum berangkat mesin kapal dipanasi terlebih dahulu selama 10 – 15 menit. Sedangkan untuk melihat arah dan posisi kapal serta untuk melihat koordinat lintang dan bujur posisi rumpon laut nelayan menggunakan alat *Global Positioning System* (GPS). Kemudian

kapal dijalankan keluar dari kolam labuh, nahkoda memegang GPS di layar posisi awal pelabuhan Prigi berada pada koordinat 08°17'190" LS dan 111°43'623" BT. Setelah posisi kapal berada di luar kolam labuh kapal dijalankan menuju ke daerah *fishing ground* yang sudah ditetapkan.

Setelah sampai daerah *fishing ground* dilakukan *setting* rumpon, setelah selesai maka selanjutnya dilakukan *setting* lampu petromak (pelak) sebagai alat penarik perhatian ikan yang ada di daerah sekitar rumpon. Kegiatan ini selesai pada jam 18.00 WIB. Kegiatan nelayan berikutnya adalah istirahat sambil menunggu pada saat ikan makan sehingga ikan banyak terkumpul di sekitar rumpon.

Setelah terkumpulnya banyak ikan di dalam rumpon pertama nelayan yang dilakukan adalah menaruh pelak di permukaan air biar ikan yang ada di sekitar rumpon akan naik keatas dan mengelilingi pelak setelah itu nelayan dapat melakukan penangkapan.

Setelah melakukan penangkapan yang dilakukan yaitu *Setting* atraktor. Sebelum dilakukan pekerjaan ini terlebih dahulu dipersiapkan (getek) rakitan bambu untuk tempat daun kelapa dalam melakukan pemasangan di rumpon. Karena daun kelapa sebagai atraktor yang berfungsi sebagai tempat berlidung dan terdapat substrat yang menempel pada daun kelapa menyebabkan banyaknya fitoplankton di area sekitar rumpon. Setelah pemasangan atraktor kembali kepelabuhan untuk menjual hasil tangkapannya

2.10 Sistem Gadangan

Menurut warga pesisir prigi dari hasil wawancara, sistem gadangan adalah sistem penangkapan dengan menggunakan alat tangkap *purse seine* yang dilakukan dengan cara

berburu pada malam hari atau juga disebut *one day fishing*. Penangkapan dengan sistem gadangan ada tiga istilah yaitu sebagai berikut:

1. Gadangan itu sendiri.
2. Ngoncor, sistem penangkapan dengan menggunakan alat tangkap *purse seine* yang dilakukan pada malam hari dengan menggunakan alat bantu berupa lampu (cahaya).
3. Gerakan, bagian dari sistem gadangan tetapi penangkapan dilakukan pada siang hari. Penangkapan dengan sistem gerakan ini dilakukan pada waktu musim bulan purnama.



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, M, 2003;54).

Penelitian ini tergolong penelitian survei. Menurut Sangarimbun (1995), penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Selanjutnya data hasil dari kuisioner tersebut diolah dan dianalisa untuk diinterpretasikan.

Menurut Ismadi (1998) dalam Ansori (2004), studi kasus (*case study*) adalah mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat yang mendalam dan hasilnya merupakan gambaran lengkap dan terorganisir baik mengenai unit sosial tersebut yang mungkin dapat mengkonsentrasikan diri pada faktor-faktor khusus tertentu ataupun dapat mencakup keseluruhan faktor-faktor dan kejadian-kejadian.

Secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana

fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2002).

3.1 Penentuan Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di daerah Prigi karena peneliti mempunyai akses lebih luas untuk menghimpun informasi mengingat tempat tersebut adalah daerah asal peneliti. Selain itu alat bantu rumpon tergolong baru dijalankan bagi nelayan yang menggunakan alat tangkap *purse seine* yang ada di kawasan Prigi.

3.2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian pada penelitian ini adalah nelayan pengguna *purse seine* di daerah Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Obyek ini dipilih karena alat bantu rumpon tergolong baru dijalankan bagi nelayan yang menggunakan alat tangkap *purse seine* karena sebelumnya dalam penangkapan ikan dengan alat tangkap *purse seine* tidak menggunakan alat bantu rumpon. Selain itu juga para nelayan yang ada di kawasan Prigi banyak yang menggunakan alat tangkap *purse seine* dikarenakan alat tangkap ini dapat menghasilkan jumlah tangkapan yang lebih besar bila dibandingkan dengan alat tangkap yang lain, disamping biaya operasional yang dikeluarkan tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan nelayan pancing tonda yang juga memakai alat bantu rumpon.

Pada penelitian ini yang menjadi fokus kajian antara lain tentang sistem bagi hasil yang diterapkan di kawasan Prigi khususnya nelayan jaring *purse seine* yang menggunakan alat bantu rumpon. Selain itu juga untuk mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan pendapatan nelayan hubungannya dengan sistem bagi hasil serta faktor pendukung dan penghambat usaha penangkapan tersebut.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer atau data tangan pertama menurut Nazir (1983) adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung sebagai sumber informasi yang dicari.

3.3.1 Data Primer

Jenis data primer yang dikumpulkan dari masyarakat pesisir Prigi Kabupaten Trenggalek adalah :

1. Penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan *purse seine* dengan menggunakan alat bantu rumpon.
2. Pinjaman oleh pemilik modal (bakul) pada usaha tersebut.
3. Faktor pendukung dan penghambat usaha penangkapan dengan menggunakan alat bantu rumpon.

Pengumpulan data primer tersebut dilakukan dengan melalui teknik survei menggunakan alat bantu kuesioner dan wawancara pada responden.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder pengumpulannya bukan diusahakan sendiri secara langsung oleh peneliti, tetapi diambil dari berbagai instansi yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) kabupaten Trenggalek, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (PPN) Prigi, Kantor desa Tasikmadu, dari laporan-laporan, jurnal penelitian, maupun bahan kepustakaan lainnya yang menunjang. Jenis data yang dikumpulkan meliputi: Data geografis dan batas

wilayah, kondisi umum wilayah, kondisi secara umum penduduk, armada penangkapan dan alat tangkap yang digunakan penduduk, kegiatan perikanan yang dilakukan penduduk dan catatan nelayan ketika menggunakan sistem rumpon.

3.4. Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Metode ini digunakan untuk mencapai tujuan dan maksud tertentu (*purpose*) guna mengambil elemen-elemen yang dimaksud dalam sampel yang dilakukan dengan sengaja, dengan catatan bahwa sampel tersebut representatif atau mewakili populasi dan informasi yang mendahului tentang keadaan populasi tersebut sudah diketahui sebelumnya dengan benar dan tidak diragukan lagi (Marzuki, 2002).

Pemilihan sampel survei sedapat mungkin mewakili kelompok nelayan “*purse seine*” di kawasan pantai Prigi. Dalam penelitian ini dilakukan pengambilan sebanyak 10 sampel dari sekitar 205 jumlah kapal *purse seine* (Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2005) kawasan pantai Prigi. Sampel tersebut diambil berdasarkan domisili (desa) asal nelayan, status kepemilikan nelayan (juragan) dan jumlah kapal atau perahu yang dimiliki nelayan bersangkutan tujuannya adalah untuk mengetahui pendapatan nelayan asli di kawasan pantai Prigi.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- **Wawancara**

Wawancara yang digunakan di sini adalah wawancara mendalam yang bertujuan untuk memperoleh pandangan melalui reaksi, tanggapan serta interpretasi dan tanggapan terhadap warga mengenai masyarakat (Burhan, 2001).

Wawancara dilakukan terhadap responden yang secara aktif terlibat dalam kegiatan perikanan tangkap, khususnya nelayan pengguna *purse seine* yang menggunakan alat bantu rumpon di Prigi, juragan “*purse seine*” yang menggunakan alat bantu rumpon di Prigi, pada pemilik modal (bakul) yang berinvestasi pada usaha tersebut, kepala TPI dan tokoh masyarakat. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang bersifat terbuka juga dengan menggunakan alat bantu kuesioner agar lebih terarah.

- **Observasi**

Pengamatan dilakukan untuk memperoleh informasi dan memahami kondisi lingkungan masyarakat pesisir secara langsung untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan nyata. Observasi dilakukan dengan melihat secara langsung aktivitas nelayan *purse seine*.

Menurut Wuisman (1991), observasi dilakukan dengan mengembangkan pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai kejadian-kejadian nyata dalam kehidupan sehari-hari maupun proses interaksi sosial yang berlangsung dalam lingkungan sosial tertentu. Data dikumpulkan melalui observasi langsung (*direct observation*) dalam mengadakan observasi terhadap bermacam-macam situasi, kelakuan dan kejadian nyata diciptakan dengan melakukan interaksi sosial tatap muka (*face to face social interaction*) dengan anggota atau kelompok lingkungan sosial dalam kehidupan sehari-hari masa sekarang.

- **Studi Pustaka**

Studi pustaka dilakukan untuk menentukan pendekatan teoritik termasuk pengumpulan data sekunder yang sesuai dengan permasalahan penelitian, baik berupa

tulisan-tulisan yang dimuat dalam buku-buku teks, jurnal ataupun penelitian sebelumnya (Nazir, 1983).

Studi pustaka ini untuk memberikan informasi yang lebih banyak tentang kejadian-kejadian yang tidak terekam di lapang sebagai pisau analisa dan pengungkapan fakta.

3.5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini akan di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisa deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti tentang status manusia, suatu kondisi, suatu sistem penilaian atau kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari metode ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, aktual, dan aktual mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Marzuki, 1983).

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan setelah selesai pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder. Tujuan analisis data adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi suatu data yang teratur serta tersusun lebih berarti (Hadi,1989).

Analisis deskriptif yang digunakan terdiri dari analisis deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif.

3.5.1 Deskriptif Kualitatif

Menurut Arikunto (1992), deskriptif kualitatif menggambarkan keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Yang termasuk dalam analisa ini mengenai yaitu mengidentifikasi permasalahan sistem bagi hasil, mendeskripsikan sistem bagi hasil

yang dilakukan oleh nelayan *purse seine* dengan menggunakan alat bantu rumpon di kawasan Prigi, mengetahui ketergantungan nelayan *purse seine* terhadap pemilik modal (bakul), mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi usaha penangkapan dengan alat tangkap *purse seine* dan menggunakan alat bantu rumpon, membandingkan sistem bagi hasil pada usaha penangkapan yang menggunakan alat bantu rumpon dan gadangan.

3.5.2 Deskriptif Kuantitatif.

Menurut sugiyono (2002), dalam analisa Deskriptif kuantitatif dilakukan perhitungan untuk menguji hipotesa yang telah diajukan. Untuk pendekatan kuantitatif digunakan Analisa Keuntungan Usaha dan Analisa R/C (*Revenue Cost Ratio*).

Untuk mengetahui pengaruh dari pemasangan rumpon terhadap peningkatan produksi dan pendapatan nelayan *purse seine* kawasan Prigi maka dilakukan perbandingan usaha yaitu antara profil usaha sebelum memasang rumpon dengan profil usaha sesudah memasang rumpon sebagai berikut.

- **Analisa Keuntungan Usaha**

Keuntungan usaha yang besar menunjukkan efisiensi usaha yang optimal. Soekartawi (1986), menyatakan bahwa keuntungan usaha atau pendapatan bersih adalah besarnya penerimaan setelah dikurangi biaya proses produksi tetap maupun tidak tetap. Keuntungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\pi = TR - TC$$

Keterangan :

π = Keuntungan

TR = *Total Revenue* (total penerimaan)

$TC = Total\ Cost$ (total biaya)

Total Revenue merupakan penerimaan total yang didapat dari hasil penjualan output yaitu harga produk dikalikan dengan jumlah produk.

$$TR = PQ \times Q$$

Keterangan :

$TR = Total\ Revenue$ (total penerimaan)

$PQ =$ Harga produk

$Q =$ Jumlah produk

Sedangkan Total Cost didapat dari variabel cost dengan fix cost. Rumusnya sebagai berikut :

$$TC = VC + FC$$

Keterangan :

$VC =$ Variabel Cost

$FC =$ Fixed Cost

Sedangkan untuk mengetahui sistem bagi hasil dalam usaha penangkapan *purse seine* yang menggunakan alat bantu rumpon tersebut menggunakan metode wawancara dengan informan dari yang terlibat aktif secara langsung dalam usaha penangkapan tersebut. Informan tersebut diantaranya adalah pemilik usaha *purse seine* (juragan) daerah pantai Prigi, nahkoda beserta ABKnya, pemilik modal (bakul), pemerintah daerah atau Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek dan tokoh masyarakat setempat. Disamping itu, untuk mengetahui informasi mengenai penggunaan rumpon pada daerah penelitian Kabupaten Trenggalek dilakukan penelusuran diberbagai media cetak dan elektronik.

BAB IV

KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak Geografis

Desa Tasikmadu terletak pada posisi koordinat $8^{\circ} 17' 43''$ LS dan $8^{\circ} 24' 25''$ LS serta $111^{\circ} 43' 08''$ BT dan $111^{\circ} 45' 08''$ BT. Desa Tasikmadu terdiri dari 3 dusun, 6 RW, dan 37 RT. Luas wilayah dari Desa Tasikmadu sekitar 2.845,743 Ha. Adapun batas-batas dari Desa Tasikmadu adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Besuki dan Samudera Hindia.

4.2 Topografi

Secara umum kondisi topografis Desa Tasikmadu adalah perpanjangan lereng pegunungan kapur selatan dengan rata-rata ketinggian tiga meter diatas permukaan laut. Struktur tanahnya sangat bagus untuk tanaman jati, selain itu juga digunakan untuk area persawahan yang banyak terdapat di bagian utara Desa Tasikmadu.

Perairan Desa Tasikmadu merupakan perairan teluk dengan dasar lumpur bercampur pasir dan sedikit berbatu karang. Teluk ini dinamakan teluk prigi yang mempunyai kedalaman 6-45 meter.

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi yang dibangun di atas lahan seluas 27,5 Ha dengan luas tanah 11,5 Ha dan luas kolam labuh 16 Ha. Terletak di Teluk Prigi pada posisi koordinat $111^{\circ} 43' 58''$ BT dan $08^{\circ} 17' 22''$ LS, yang tepatnya di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Propinsi Jawa Timur. Dengan jarak ke ibu kota Propinsi (Surabaya) adalah ± 200 km, dan jarak ke ibu kota Kabupaten (Trenggalek) adalah ± 47 km.

Sungai-sungai di wilayah Watulimo berukuran kecil, oleh karena itu hanya berfungsi sebagai sarana pengairan sawah. Tinggi daerah Watulimo sekitar 299 meter dari permukaan laut. Suhu perairan Watulimo rata-rata 27° C. Sedangkan keadaan curah hujan pertahun di wilayah Watulimo 27,0 mm per tahun.

Iklm di wilayah Watulimo adalah iklim tropis yang mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau terjadi pada Bulan April sampai Bulan Oktober, sedangkan musim penghujan terjadi pada Bulan Oktober sampai Bulan April.

4.3 Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

Desa Tasikmadu mempunyai jumlah penduduk pada tahun pendataan 2007 sekitar 10.278 orang dengan komposisi 5.085 orang penduduk laki-laki dan 5.193 orang penduduk perempuan dan jumlah Kepala Keluarga 3.756 jiwa. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk Desa Tasikmadu berdasarkan lapangan usahanya pada tahun pendataan 2007.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Tasikmadu Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2007

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Bidang Perikanan	1.948	27,20
2	Bidang Pertanian/Peternakan	4.022	56,15
3	Bidang Perdagangan	279	3,89
4	Pegawai Negeri (TNI, POLRI)	194	2,70
5	Pegawai Swasta	521	7,27
6	Industri	18	0,25
7	Jasa	172	2,40
8	DLL	8	0,11
Jumlah		7.162	100

Sumber : Kantor Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, 2007

Dari data kependudukan Desa Tasikmadu didapatkan bahwa sejumlah petani lebih banyak dari pada nelayan. Hal ini disebabkan karena pada musim tanam mereka banyak turun sebagai petani, pemilik, penggarap maupun buruh tani. Setelah selesai musim tanam mereka menjadi ABK dan juragan kapal yang menjadi kelompoknya dengan istilah yang mereka pakai yaitu Ngadim. Sedangkan untuk melihat rincian nelayan berdasarkan alat tangkap yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Kabupaten Trenggalek bisa dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Komposisi Nelayan di PPN Prigi

No	Jenis Nelayan	Jumlah Nelayan (Jiwa)	Persentase (%)
1	Nelayan alat tangkap <i>purse seine</i>	3.000	48,11
2	Nelayan alat tangkap <i>gill net</i>	102	1,64
3	Nelayan alat tangkap jaring klitik	72	1,15
4	Nelayan alat tangkap pancing ulur	1.298	20,82
5	Nelayan alat tangkap pukat pantai	1.008	16,16
6	Nelayan alat tangkap payung	320	5,14
7	Nelayan alat tangkap pancing tonda	255	4,09
8	Nelayan alat tangkap pancing prawe	180	2,88
TOTAL		6.235	100

Sumber: Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2005

Dibandingkan dengan tahun 2004 yaitu jumlah nelayan adalah 5.526 orang, maka tahun 2005 jumlah nelayan adalah 6.235 orang terdapat peningkatan jumlah nelayan sebesar 709 orang atau 12,83%.

Tingkat pendidikan penduduk di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek sebagian besar tamat SD/ sederajat sebanyak 3.255 orang, kemudian tamat SLTP/ sederajat sebanyak 2.803 orang, kemudian tamat SLTA/ sederajat sebanyak 2.582 orang, tamat perguruan tinggi sebanyak 178 orang, dan tidak tamat SD/ sederajat sebanyak 1.251 orang. Selengkapnya data tentang jumlah penduduk Desa Tasikmadu berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Tasikmadu Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Pasca Sarjana	2	0,01
2	Sarjana/Diploma	176	1,74
3	SLTA/Sederajat	2.582	25,64
4	SLTP/Sederajat	2.803	27,83
5	SD/Sederajat	3.255	32,32
6	Tidak tamat SD/Tidak Sekolah	1.251	12,42
TOTAL		10.069	100

Sumber: Kantor Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, 2007

Berdasarkan data diatas sebagian besar penduduk Tasikmadu tamat SD sebanyak 3.255 orang sehingga kurang mampu diajak untuk berkembang dalam mengelola sumberdaya perikanan di prigi karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

Berdasarkan penggolongan usia, penduduk Desa Tasikmadu paling banyak berada pada umur kurang dari 15 tahun sebanyak 2.169 orang, sedangkan yang paling rendah berada pada kisaran 55 - 65 tahun sebanyak 1.276 orang. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Tasikmadu Berdasarkan Usia

No	Umur	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Lebih dari 65 tahun	1.289	12,54
2	55 – 65 tahun	1.276	12,41
3	45 – 54 tahun	1.293	12,58
4	35 – 44 tahun	1.342	13,05
5	25 – 34 tahun	1.387	13,49
6	15 – 24 tahun	1.522	14,80
7	Kurang dari 15 tahun	2.169	21,10
TOTAL		10.278	100

Sumber: Kantor Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, 2007

Berdasarkan agama yang dianut, mayoritas penduduk Desa Tasikmadu beragama Islam sebanyak 10.237 orang kemudian agama Kristen sebanyak 40 orang, dan agama Hindu sebanyak 1 orang. Untuk menunjang kegiatan keagamaan terdapat sarana peribadatan yaitu masjid dan mushola serta gereja. Di desa Tasikmadu sering diadakan kegiatan keagamaan antara lain seperti yasinan yang diadakan secara bergiliran dan setiap sore anak-anak mengaji di langgar. Hal ini membuktikan keagamaan di lingkungan mereka berjalan secara rutinitas sehingga melekat dalam kegiatan mereka sehari-hari yang akhirnya menjadi kebiasaan mereka.

4.4 Keadaan umum perikanan

4.4.1 Kegiatan Usaha Perikanan

Kegiatan usaha perikanan yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi baik di bidang penangkapan maupun pengolahan pada umumnya masih bersifat tradisional. Pada tahun 2005 perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah pelabuhan masih sedikit jumlahnya. Selain Perum Prasarana Perikanan Samudera

Cabang Prigi (PPPS Cabang Prigi), kegiatan perusahaan perikanan yang sudah menginvestasikan usahanya di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi adalah:

- f. PT. Prima Indo Bahari Sentosa bidang usaha *cold storage* dan pabrik es.
- g. PT. Bumi Mina Jaya bidang usaha tepung ikan dan pengolahan hasil perikanan.
- h. PT. Sumber Pangan Nasional bidang usaha *cold storage*.
- i. Perusahaan perseorangan sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan bidang usaha pengepakan ikan.
- j. Perusahaan pengelola ubur-ubur sebanyak 9 (sembilan) unit.

4.4.2 Musim Penangkapan Ikan

Musim penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi pada tahun 2006 terjadi antara bulan Juli sampai Desember dengan puncak musim pada bulan Desember. Pada bulan-bulan tersebut terjadi kenaikan produksi bila dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, hal ini dipengaruhi oleh musim, angin dan arus laut.

4.4.3 Jumlah Armada Perikanan dan Jenis Alat Tangkap

Jumlah armada perikanan tahun 2006 adalah 1.107 unit dengan ukuran kapal di bawah 30 GT, yaitu terdiri dari kapal berukuran <10 GT 741 unit (66,93%), 10–<20GT 136 unit (12,28%), dan 20–<30GT 230 unit (20,77%). Dibanding dengan tahun 2005 sebesar sebesar 874 unit, berarti mengalami peningkatan sebesar 233 unit (21,04%). Frekuensi kunjungan kapal tahun 2006 ini tercatat 22.952 kali yang berarti mengalami penurunan sebesar 10.577 kali (20%) dari tahun 2005 sebesar 33.529 kali.

Berikut ini rincian jumlah armada penangkapan menurut ukuran kapal yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Kabupaten Trenggalek bisa dilihat pada Tabel7:

Tabel 7. Jumlah Armada Penangkapan Menurut Ukuran Kapal di PPN Prigi Tahun 1999–2006

No.	Tahun	Perahu Tanpa Motor	Kapal <10 GT	Kapal 10–<20 GT	Motor 20–<30 GT	Total
1.	1999	185	287	134	84	690
2.	2000	150	239	138	96	623
3.	2001	90	274	175	96	635
4.	2002	45	274	175	112	606
5.	2003	5	477	85	112	679
6.	2004	0	674	73	115	862
7.	2005	0	649	105	120	874
8.	2006	0	741	136	230	1.107
R (%)		0%	18%	5%	19%	8%

R : Rata-rata kenaikan/penurunan pertahun

Average rate of increase/decrease per years

Sumber: Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2007

Jumlah alat tangkap di PPN Prigi pada tahun 2006 adalah sebesar 1.677 unit yang terdiri dari Pancing Ulur 1.298 unit (77,40%), Pukat Cincin 115 unit (6,85%), Pancing Tonda 57 unit (3,39%), Pukat Pantai 42 unit (2,50%), Pancing Prawe 36 unit (2,14%), Jaring Klitik 36 unit (2,14%), Jaring Insang 43 unit (2,56%), dan Payang 36 unit (2,14%). Dibanding dengan alat tangkap pada tahun 2005 sebesar 1.757 unit, berarti mengalami penurunan sebesar 80 unit (17%). Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8. Jumlah Alat Tangkap Menurut Jenisnya di PPN Prigi Tahun 1999-2006

No	Jenis Alat Tangkap (<i>Fishing Gear Type</i>)	Tahun / <i>Years</i> (unit)								R(%)
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
1	Pukat Cincin / <i>Purse Seine</i>	96	105	105	112	112	230	240	115	11
2	Jaring Insang / <i>Gill Net</i>	13	8	8	8	10	17	34	43	26
3	Payang / <i>Boat Seine</i>	44	42	40	30	35	28	20	36	2
4	Pukat Pantai / <i>Beach Seine</i>	27	27	27	33	33	40	42	42	7
5	Pancing Prawe / <i>Long Line</i>	75	278	278	278	282	25	36	36	32
6	Pancing Ulur / <i>Hand Line</i>	450	150	200	242	286	1.158	1.298	1.298	46
7	Pancing Tonda / <i>Trawl Line</i>	0	0	0	0	0	28	51	57	47
8	Jaring Klitik / <i>Shrimp Entangling Gill Net</i>	0	2	2	0	2	30	36	50	29
Jumlah (unit) / <i>Total (units)</i>		705	612	660	703	760	1.556	1.757	1.677	17

R : Rata-rata kenaikan/penurunan pertahun

Average rate of increase/decrease per years

Sumber : Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2007

Jumlah alat tangkap payang pada tahun 2005 menurun 11% karena pada kapal payang tidak dapat beroperasi jauh di tengah laut karena ukuran kapal yang kecil sehingga pendapatan dari nelayan payang menurun disebabkan letak *fishing ground* yang jauh dilepas pantai selatan tetapi pada tahun 2006 terjadi kenaikan sebesar 2 % dan pada pancing tonda pada tahun 2006 meningkat 47% karena pada pancing tonda kapalnya dilengkapi dengan palkah untuk mempertahankan kualitas ikan supaya tetap segar sehingga nilai ekonomisnya semakin tinggi, bila dibandingkan dengan hasil tangkap *purse seine* tangkapan dengan alat tangkap tonda lebih baik dan nilai

ekonomisnya lebih tinggi sehingga nelayan yang menggunakan alat tangkap tonda meningkat tajam dibandingkan dengan alat tangkap *purse seine* yang mengalami penurunan sebesar 11 % dikarenakan biaya operasional yang meningkat sehingga terlalu berat untuk nelayan menengah kebawah dalam melakukan operasional. Alternatif yang mereka jalankan yaitu beralih menggunakan alat tangkap payang dalam melakukan penangkapan karena biaya operasional yang tidak terlalu mahal.

Berdasarkan laporan oleh PMP2SP Jawa Timur tahun 2000/2001 dijelaskan bahwa daerah Prigi dibedakan menjadi 4 daerah yaitu, 1) daerah operasi lepas pantai yang dilakukan oleh nelayan gill net, prawe dan pancing ulur, 2) daerah operasi luar pantai terutama dilakukan oleh alat *purse seine* dan payang, 3) daerah operasi pantai secara khusus dilakukan oleh jaring tarik dan 4) daerah operasi karang untuk menangkap udang barong dan ikan karang terutama dilakukan oleh jaring pethotan, belenger, ether dan pithil.

Alat tangkap gill net dioperasikan didaerah luar pantai, diluar teluk Prigi sampai \pm 40 mil kearah Samudera Indonesia. Alat tangkap ini sering dioperasikan dengan alat tambahan pancing prawe. Hasil tangkapan gill net ini terutama adalah jenis ikan tuna dan cakalang. Alat ini yang juga dioperasikan pada daerah diluar teluk Prigi ini adalah pancing ulur.

Untuk daerah operasi jaring *purse seine* dan payang hampir tumpang tindih. Namun perbedaan terletak pada jaring payang lebih memungkinkan untuk dioperasikan di daerah pinggir, bahkan mendekati tepi karang dan pantai curam. Daerah operasi kedua alat tangkap ini terletak pada sekitar gugus pulau-pulau didalam teluk Prigi (pulau Saai, Anakan, Tanengan, Bayulangu, Solno, Batay, Siklapa, Sababahan, Seksal).

Daerah operasi jaring tarik di Prigi dibagi menjadi 3 lokasi utama yaitu, 1) Labuhan Prigi, 2) Labuhan Damas, 3) Labuhan Karanggongso. Masing-masing daerah terbagi atas sub area. Area Prigi terdiri dari penangkapan : Siwaan-1, Siwaan-2, Udang Galah, Waru Doyong, Ngresep, Blandoyo dan Cengkong Klulon. Daerah operasi pantai Damas dibagi atas sub area: Wonojoyo, Ngekel, Pancer Bang, Nemplung Kulon, Bujelan, Ngrumpelan dan Gledong. Area penangkapan pantai Karanggongso terdiri atas: Pasir Putih, Watu Dukuh, dan Den Roso. Daerah penangkapan yang banyak dipilih adalah Prigi dan Damas.

Sedangkan untuk daerah operasi alat tangkap jaring pethotan, pithi, blengker dan edher adalah diujung goa batu dan karang malang. Karena kedua lokasi tersebut merupakan tepian pantai curam, maka banyak habitat untuk tempat berlindung ikan-ikan karang dan udang barong.

Penangkapan ikan diperairan umum dilakukan disungai dan *ceck dam* yang ada dengan mempergunakan alat tangkap yang sederhana seperti jala dan pancing. Meskipun jumlahnya kecil namun kegiatan penangkapan diperairan umum dilakukan disemua wilayah kecamatan kabupaten Trenggalek. Usaha penangkapan ikan di perairan umum merupakan usaha sampingan bagi penduduk yang mayoritas adalah pantai.

Perkembangan produksi hasil tangkap pada tahun 2006 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Selengkapnya data tentang perkembangan produksi perikanan disajikan dalam Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9. Perkembangan Produksi Perikanan Tahun 1999–2006

No.	Tahun	Volume (Ton)
1	1999	13.340
2	2000	8.937
3	2001	14.028
4	2002	57.293
5	2003	46.756
6	2004	17.794
7	2005	14.346
8	2006	23.603

Sumber: Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2006

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2006 produksi perikanan yang didaratkan adalah 23.603 ton atau produksi rata-rata 64.666 ton per hari. Jika dibandingkan dengan tahun 2005 maka jumlah produksi perikanan tahun 2006 mengalami kenaikan 64,52% atau 9.257 ton.

Produksi perikanan yang didaratkan selama tahun 2006 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10. Pendaratan Ikan di PPN Prigi Tahun 2006

No.	Bulan	Volume (Ton)	Nilai (Rp. 000)
1.	Januari	255	1.161.300
2.	Pebruari	313	1.104.300
3.	Maret	307	1.347.700
4.	April	218	1.048.450
5.	Mei	468	2.121.350
6.	Juni	990	3.617.250
7.	Juli	3.432	15.488.450
8.	Agustus	3.236	7.706.350
9.	September	2.503	7.867.000
10.	Oktober	2.927	8.198.600
11.	Nopember	3.560	14.321.500
12.	Desember	5.394	19.903.650
	Jumlah	23.603	83.485.900

Sumber : Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2006

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa musim ikan hanya terjadi selama 6 (enam) bulan yaitu bulan Juli sampai bulan Desember dengan puncak musim pada bulan Desember. Pada bulan Desember produksi ikan yang didaratkan mencapai 5.394 ton atau 22,85% dari total pendaratan ikan. Sedangkan pendaratan ikan yang paling sedikit terjadi pada bulan April yaitu 218 ton atau 9,23%.

Volume jenis ikan yang terbanyak didaratkan di PPN Prigi adalah ikan cakalang, layang deles, layur, lemuru, tongkol como, tuna mata besar dan ubur-ubur. Produksi ubur-ubur hanya terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 58,95% dari produksi bulan tersebut. Jumlah produksi jenis ikan dominan adalah 12.973 ton atau 90,43% dengan nilai produksi Rp.45.820.250.000,-, sedangkan sisanya atau ikan jenis lainnya adalah sebesar 1.373 ton atau 9,57% dengan nilai produksi Rp. 5.249.600.000,-. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 11. Jenis Ikan Terbanyak di PPN Prigi Tahun 2005

No.	Jenis Ikan	Volume (Ton)	Nilai (Rp. 000)
1.	Lemuru	3.502	3.951.750
2.	Tongkol como	2.602	13.755.050
3.	Layang deles	2.014	6.929.050
4.	Layur	1.297	6.841.500
5.	Ubur-ubur	1.245	747.000
6.	Tuna mata besar	1.179	7.678.350
7.	Cakalang	1.134	5.917.550
8.	Lainnya	1.373	5.244.250
	Jumlah	14.346	51.064.500

Sumber : Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2005

4.4.4 Lembaga Perikanan

a. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi adalah Unit Pelaksana Teknis Departemen Kelautan dan Perikanan dibidang prasarana Pelabuhan Perikanan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2004, ruang lingkup penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan adalah sebagai prasarana perikanan meliputi perencanaan dan penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, pengusahaan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi sebagai suatu lingkungan kerja menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan, pengembangan, pemeliharaan serta pemanfaatan sarana pelabuhan perikanan.
2. Pelayanan teknis kapal perikanan.
3. Koordinasi pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban dan pelaksanaan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan.
4. Pengembangan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat perikanan.
5. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di wilayahnya untuk peningkatan produksi, distribusi dan pemasaran hasil perikanan.
6. Pelaksanaan pengawasan penangkapan, pengolahan, pemasaran dan mutu hasil perikanan.
7. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik perikanan.
8. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan publikasi hasil riset, produksi dan pemasaran hasil perikanan tangkap di wilayahnya.
9. Pemantauan wilayah pesisir dan fasilitasi wisata bahari.

10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Fasilitas pelabuhan yang telah dibangun di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Berikut tabel rincian fasilitas pelabuhan.

Tabel 12. Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

No.	Nama Fasilitas	Jumlah / Volume
I	Fasilitas Pokok	
	1. Lahan : a. Tanah	11,5 Ha
	b. Kolam	15 Ha
	2. Kolam Pelabuhan : a. Sebelah Barat	7 Ha
	b. Sebelah Timur	8 Ha
	3. Break Water	710 m
	4. Dermaga	652 m
	5. Jalan Komplek	1.123,5 m
	5. Revetment	830 m
II	Fasilitas Fungsional	
	1. Kantor	655 m ²
	2. Gedung TPI : 1. Sebelah Barat	940 m ²
	2. Sebelah Timur	400 m ²
	3. Pabrik Es	20 ton/hari
	4. SPDN / BBM	50 ton
	5. Tower Air	30 ton
	6. Bak Air	40 ton
	7. Bengkel	120 m ²
	8. Jaringan Listrik PLN	250 KVA
	9. MCK	90 m ²
	10.Pos Keamanan : a. Pos Satpam	26 m ²
	b. Pos Terpadu	120 m ²
	11.Telepon	7 unit
	12.Lampu Suar	4 unit
III	Fasilitas Penunjang	
	1. Rumah Dinas	4 unit
	2. Guest House	1 unit
	3. BPN	300 m ²
	4. Kios BAP	54 m ²
	5. Gudang	200 m ²
	6. Kios Tertutup	16 unit x 24 m ²
	7. Kios Terbuka	14 unit x 22,5 m ²
	8. Gudang Pengepakan	180 m ²
	9. Kendaraan Dinas	6 Bh. Roda 2, 2 Bh. Roda 4

Sumber : Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2005

b. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek adalah perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan, yang diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2003.

Berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 804 Tahun 2003, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang kelautan dan perikanan.

Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 804 Tahun 2003, mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan program dan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kelautan, usaha kelautan dan perikanan serta budidaya dan perbenihan perikanan.
2. Penyelenggaraan koordinasi dengan Lembaga Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang kelautan dan perikanan.
3. Penjabaran dan pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan wewenang daerah di bidang kelautan dan perikanan.
4. Pelaksanaan pelayanan perijinan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan.
5. Penyelenggaraan dan pengelola administrasi dan urusan rumah tangga Dinas.
6. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Departemen) Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Prigi

Pelaksana pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Prigi tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 yaitu KUD Mina Tani Sempurna, sedangkan tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 yaitu Sinati dan KBN. Untuk tahun 2003 sampai dengan sekarang pelaksana pengelolanya yaitu UPTD Kabupaten Trenggalek. Adapun fungsi dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Prigi diantaranya :

1. Menjamin kelestarian sumberdaya alam.
2. Mengembangkan potensi ekonomi masyarakat.
3. Memberdayakan kapasitas dan partisipasi masyarakat nelayan.



Gambar 2. Tempat Pelelangan Ikan PPN Prigi

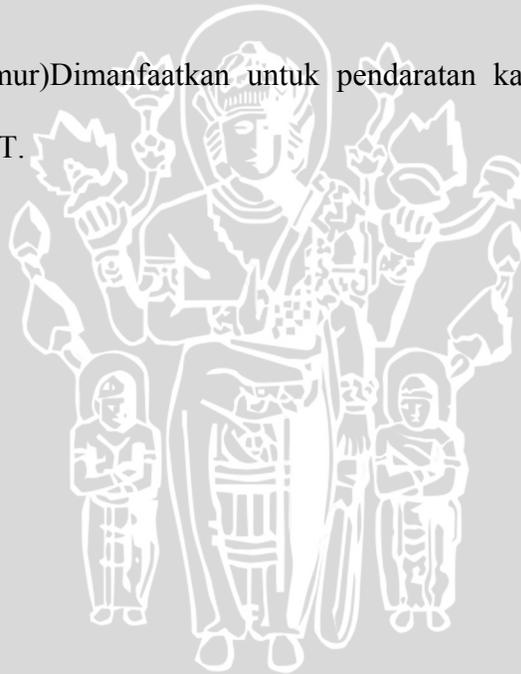
Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI adalah Bupati dan dalam pelaksanaan operasional sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Struktur organisasi TPI Prigi berdasarkan Perda No. 28 / 2002 adalah :

1. Kepala TPI, dengan fungsi sebagai manager dan administrator.

2. Kepala Bidang Tata Usaha, Kepala Bidang Keuangan, Kepala Bidang Lelang, Kepala Bidang Jasa Sarana dan Prasarana, Kepala Bidang Kepegawaian.
3. Kepala Sub Bidang terdiri dari 4 Juru yaitu Buku, Lelang, Timbang, Loket.
4. Jumlah petugas TPI yaitu 20 personil terdiri dari :
 - a. 7 (Tujuh) personil PNS.
 - b. 13 (Tiga belas) personil karyawan tetap.

Manfaat dan tingkat operasional dari TPI Prigi yaitu :

1. TPI I (TPI Barat) Dimanfaatkan untuk pendaratan kapal yang kapasitasnya lebih dari 15 GT.
2. TPI II (TPI Timur) Dimanfaatkan untuk pendaratan kapal yang kapasitasnya kurang dari 15 GT.



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Nelayan *Purse Seine* Pesisir Pantai Prigi

5.1.1 Perilaku Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang memiliki karakter yang keras karena dipengaruhi faktor geografis daerah. Masyarakat pesisir pada umumnya memiliki persoalan yang lebih kompleks dibandingkan dengan masyarakat di daerah pertanian. Masyarakat pesisir memiliki ciri-ciri khusus seperti penggunaan wilayah pesisir dan lautan yang bersifat *common property* sebagai faktor produksi, jam kerja yang harus mengikuti siklus bulan yaitu dalam 30 hari (satu bulan) yang dapat dimanfaatkan untuk melaut (kerja nelayan) hanya 20 hari sisanya mereka relatif menganggur. Selain daripada itu pekerjaan menangkap ikan adalah merupakan pekerjaan yang penuh resiko dan umumnya hanya dapat dikerjakan oleh lelaki sehingga keluarga yang lain tidak dapat membantu secara penuh.

5.1.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Tasikmadu

Desa Tasikmadu merupakan desa yang penduduknya heterogen terdiri dari penduduk asli dengan mayoritas suku Jawa serta penduduk pendatang yang berasal dari suku Madura dan suku Bugis (Sulawesi). Dengan komposisi suku Jawa (97%), suku Madura (2%), dan suku Bugis (0,5%). Bahasa pengantar mereka adalah bahasa Jawa, Madura dan bahasa Indonesia, sedangkan mata pencahasrian masyarakat Desa Tasikmadu mayoritas sebagai petani cengkeh dan sisanya bercocok tanam padi baik sebagai petani milik, petani penggarap maupun buruh tani. Namun hasil yang didapatkan

dari hasil sebagai petani lebih kecil dari hasil yang didapat dari hasil melaut (manangkap ikan di laut), sehingga mereka umumnya juga melakukan kegiatan penangkapan (menjadi nelayan) terutama bagi mereka yang mempunyai tanah sawah atau tegalan.

Pada saat musim ikan dipantai Prigi Desa Tasikmadu banyak didatangi penduduk yang biasanya berasal dari daerah pantai utara Jawa seperti Lamongan, Tuban, Pasuruan dan Situbondo. Musim ikan dipantai Prigi terjadi antara bulan Juli sampai Desember dengan puncak musim pada bulan Desember. Pada bulan-bulan tersebut terjadi kenaikan produksi bila dibandingkan dengan dengan bulan-bulan lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh musim, angin dan arus laut.

Dari data kependudukan Desa Tasikmadu juga didapatkan bahwa sejumlah petani lebih banyak dari pada nelayan. Hal ini disebabkan karena pada musim tanam mereka banyak turun sebagai petani, pemilik, penggarap maupun buruh tani. Setelah selesai musim tanam mereka menjadi ABK dan juragan kapal yang menjadi kelompoknya dengan istilah yang mereka pakai yaitu Ngadim.

Berdasarkan data yang didapat dari kantor Desa Tasikmadu bahwa lapangan usaha bidang perikanan menempati urutan kedua setelah pertanian /peternakan. Untuk lebih jelasnya data mengenai kependudukan Desa Tasikmadu berdasarkan mata pencaharian/lapangan usaha dapat dilihat pada tabel 13 berikut.

Tabel 13. Jumlah Penduduk Desa Tasikmadu Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2007

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Bidang Perikanan	1.948	27,20
2	Bidang Pertanian/Peternakan	4.022	56,15
3	Bidang Perdagangan	279	3,89
4	Pegawai Negeri (TNI, POLRI)	194	7,20
5	Pegawai Swasta	521	7,27
6	Industri	18	0,25
7	Jasa	172	2,40
8	DLL	8	0,11
Jumlah		7.162	100

Sumber : Kantor Desa Tasikmadu, 2007

Nelayan dipantai Prigi memiliki kemampuan masing-masing dalam melakukan penangkapan ikan. Untuk nelayan asal Madura dikenal dengan sebutan nelayan Andon. Nelayan Andon menggunakan perahu payang dan alat tangkap jaring (purse seine). Sedangkan untuk nelayan asal Bugis dikenal dengan sebutan nelayan sekoci. Nelayan sekoci menggunakan perahu sekoci dan alat tangkap pancing tonda dalam operasi penangkapan. Nelayan dipantai Prigi menggunakan rumpon sebagai alat bantu pengumpul ikan dan GPS (*Global Positioning System*) sebagai penentu posisi rumpon.

Kegiatan yang dilakukan oleh nelayan lokal selama tidak melaut, biasanya beristirahat di rumah atau memperbaiki kapal jika ada kerusakan. Apabila ada musim tanam mereka banyak turun sebagai petani, pemilik, penggarap maupun buruh tani. Bagi nelayan andon yang tidak mempunyai tempat tinggal umumnya beristirahat di tempat tinggal sementara di rumah-rumah nelayan lokal yang menjadi anggota tersebut, selain itu ada juga yang tinggal di rumah pengamba yang mereka ikuti yang terletak didekat pantai yang disediakan khusus buat ABK.

Keberadaan nelayan dengan alat tangkap purse seine pada saat ini lebih dominan dari pada nelayan dengan alat tangkap gill net, pancing kiltik, pancing ulur alat tangkap

lainnya yang beroperasi dipantai Prigi. Alat tangkap tersebut digunakan karena cocok dengan jenis ikan di kawasan Prigi yaitu jenis ikan pelagic antaranya tongkol (*Euthynnus sp*), layang (*Decapterus sp*), lemuru (*Sardinella sp*), dan cakalang (*Katsuwonus sp*), sehingga dapat menghasilkan produksi yang maksimal. Komposisi nelayan yang beroperasi dipantai Prigi dapat dilihat berdasarkan alat tangkap yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Kabupaten Trenggalek.

Tabel 14. Komposisi Nelayan di PPN Prigi

No	Jenis Nelayan	Jumlah Nelayan (Jiwa)	Persentase (%)
1	Nelayan alat tangkap <i>purse seine</i>	3.000	48,11
2	Nelayan alat tangkap <i>gill net</i>	102	1,64
3	Nelayan alat tangkap jaring klitik	72	1,15
4	Nelayan alat tangkap pancing ulur	1.298	20,82
5	Nelayan alat tangkap pukut pantai	1.008	16,16
6	Nelayan alat tangkap payang	320	5,14
7	Nelayan alat tangkap pancing tonda	255	4,09
8	Nelayan alat tangkap pancing prawe	180	2,88
TOTAL		6.235	100

Sumber: Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2005

Dibandingkan dengan tahun 2004 yaitu jumlah nelayan adalah 5.526 orang, maka tahun 2005 jumlah nelayan adalah 6.235 orang terdapat peningkatan jumlah nelayan sebesar 709 orang atau 12,83%.

5.2 Profil Alat Tangkap *Purse Seine* dan Alat Bantu Rumpon.

5.2.1 Alat Tangkap *Purse Seine*

Purse seine merupakan suatu alat penangkap ikan yang terdiri dari lembaran jaring yang digabung menjadi satu, pada bagian tepi atasnya terdapat pelampung dan tepi bawahnya terdapat pemberat serta sejumlah cincin sebagai tempat berlalunya tali kolor. Di dalam pengoperasian *purse seine*, tali kolor ditarik sehingga cincin-cincin yang terpasang pada jaring mengumpul jadi satu membentuk kantong. Karena

pengopersiannya dengan cara menarik tali kolor, maka *purse seine* disebut jaring "Slerek" (Subani *et al*, 1989).

Prinsip dasar kerja daripada alat tangkap *purse seine* adalah dengan cara melingkari gerombolan ikan, dimana pada saat pengoperasian jaring ini dilingkarkan pada sasaran yang kemudian dilakukanlah penarikan tali kolor sehingga ikan-ikan yang dilingkari tersebut tidak dapat keluar dari jaring.

Setting alat tangkap *purse seine* yang dilakukan dalam satu trip biasanya sekitar dua sampai tiga kali, tergantung hasil yang diperoleh. Apabila dalam satu kali setting hasil tangkap sudah dirasa banyak maka setting berikutnya tidak dilakukan. Keberhasilan setting ini tergantung dari konstruksi alat, daerah penangkapan dan ketrampilan nelayan dalam menebar dan menarik jaring.

5.2.2 Alat Bantu Rumpon

Pemakaian alat bantu pengumpul ikan dewasa ini merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan produktivitas alat penangkap ikan, dan keberadaan rumpon menjadi sangat dibutuhkan peranannya dengan makin kompetitifnya usaha penangkapan ikan di laut, karena dengan menggunakan rumpon akan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi penangkapan ikan (Bambang 2001).

Fungsi utama rumpon bagi perikanan adalah suatu sarana pengumpul ikan sehingga ikan dapat ditangkap dengan mudah dan dalam jumlah yang relatif banyak. Menurut Bambang (2001), rumpon fungsinya hanya sebagai pembantu, yaitu membantu untuk mengumpulkan ikan pada suatu titik atau tempat untuk kemudian dilakukan operasi penangkapan.

Penggunaan rumpon laut dalam ditujukan terutama untuk menangkap ikan pelagis besar. Menurut Bambang (2001), bila semula penggunaan rumpon itu ditujukan terutama untuk ikan-ikan pelagis kecil, tetapi dengan payaos (rumpon laut dalam) motivasi utama lebih ditekankan untuk menangkap ikan pelagis besar terutama tuna, cakalang dan sejenisnya yang mempunyai kedudukan penting dalam perdagangan (*ekspor*).

Rumpon merupakan *fishing ground* buatan dengan menciptakan kondisi lingkungan yang disukai oleh ikan. Salah satunya untuk menciptakan rantai makanan. Rantai makanan dibagi menjadi dua proses. Proses pertama menciptakan berlangsungnya hukum alam pada kehidupan ikan yaitu bersifat predator (ikan besar memakan ikan kecil). Pada proses yang kedua adalah terjadi pengumpulan berbagai jenis dan ukuran ikan, bila diperkirakan telah berkumpul ikan-ikan akan ditangkap.

▪ Jenis-Jenis Rumpon

1. Rumpon Tradisional

Rumpon tradisional umumnya terdiri dari empat komponen utama, yaitu; pelampung, tali jangkar, jangkar serta pemberat, dan pemikat atau *attractor*, yang umumnya kesemuanya terbuat dari bahan alami. Bahan-bahan yang dipakai dalam rumpon tradisional diantaranya : 1). Pelampung yang terbuat dari rakit bambu, Tali jangkar, terbuat dari bahan ijuk atau rotan. 2). Bahan ijuk banyak digunakan oleh nelayan Jawa dan Madura, sedangkan bahan rotan umumnya digunakan oleh nelayan Sulawesi. 3). Pemberat, umumnya terbuat dari batu dan jangkar kayu. 4). Pemikat (*attractor*), terbuat dari pelepah daun kelapa, daun lontar dan ranting bambu.

2. Rumpon Modern

Rumpon modern merupakan pengembangan dari rumpon tradisional berupa konstruksi maupun bahan yang digunakan sehingga dapat lebih tahan lama. Alat tangkap yang digunakan dalam menangkap ikan di sekitar rumpon pada umumnya berupa huhate dan pancing ulur serta *drift vertical line*. Bahan yang dipakai dalam rumpon modern diantaranya : 1). Pelampung, terbuat dari bahan plat besi atau bahan sintetis lainnya yang dibentuk menjadi ponton (pelampung rumpon payaos), seperti drum yang dilapisi *fibre glass* atau dapat pula drum yang diisi dengan busa (*plastic foamed*). 2). Tali jangkar, umumnya tersusun dari rangkaian kabel baja (*steel wire*), rantai besi, tali sintetis (tali *polyethylene* atau tali *poly propylene*) dan dilengkapi pula dengan segel dan swivel. 3). Pemberat, umumnya terbuat dari semen cor yang dilengkapi jangkar besi. 4). Pemikat (*attractor*), umumnya masih menggunakan bahan alami, antara lain: daun kelapa, daun nipah atau ranting bambu. Atraktor juga dapat dibuat dari bahan sintetis, seperti: ban sepeda, pita plastik, tali (rafia) yang diurai, jaring bekas dan lain-lain.

▪ Pemasangan Rumpon

Sebelum melabuhkan rumpon, terlebih dahulu dilakukan survei perairan untuk memperoleh masukan dan bahan pertimbangan dalam menentukan lokasi yang sesuai untuk menerjunkan rumpon. Survei perairan di sepanjang landas kontinen Samudera Hindia menggunakan sejumlah peralatan, antara lain:

1. Penentuan posisi kapal dan kedudukan rumpon menggunakan GPS (*Global Positioning System*).
2. Arah haluan, baringan kapal terhadap benda-benda daratan dilakukan dengan kompas tangan.

Hasil survei menunjukkan bahwa penempatan rumpon sebaiknya pada perairan landas kontinen berkisar 1 mil hingga 5 mil dari garis pantai, karena kedalaman perairan pada jarak lebih dari 5 mil diluar garis pantai cenderung berubah tajam memasuki lereng kontinen, Penempatan rumpon pada lereng kontinen sangat riskan bagi rumpon karena beberapa hal, antara lain:

1. Jangkar rumpon dapat tergelincir (*sliding*) ke dasar perairan yang lebih dalam.
2. Tali utama dapat bergesekan langsung dengan tubir karang
3. Hepasan gelombang pada lereng kontinen lebih besar dibandingkan pada landas kontinen

Pelaksanaan pemasangan atau penerjunan rumpon sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari, sebab pada saat itu kondisi laut umumnya dalam keadaan tenang. Adapun urutan pelaksanaan penerjunan rumpon dapat dijelaskan sebagai berikut:

- o Pangkal tali atraktor dikaitkan dengan pelampung
- o Ujung tali atraktor dikaitkan dengan pangkal tali pemberat rangkap dua
- o Bila kapal sudah mendekati posisi lokasi penerjunan, kapal mengambil posisi melawan arus
- o Pelampung yang diterjunkan, disusul tali atraktor yang diulur dan dilanjutkan dengan rakitan atraktor diterjunkan secara satu persatu agar tidak saling terkait.

5.3 Struktur Masyarakat Pesisir

Pada masyarakat pesisir, struktur masyarakat dalam kaitannya dengan perekonomian dibedakan berdasarkan penguasaan alat produksi, tingkat skala investasi modal usahanya dan pola hubungan kerja (Kusnadi, 2002). Di pantai Prigi, penguasaan alat-alat produksi terdiri dari pemilik perahu (juragan darat) dan nelayan buruh atau biasa disebut ABK (Anak Buah Kapal). ABK merupakan sekelompok orang yang melakukan operasi penangkapan ikan dengan keahliannya masing-masing. Semakin ahli seorang ABK dalam operasi penangkapan maka semakin penting pula peran dan tanggung jawab pekerjaannya.

Berdasarkan tingkat skala investasi modal usahanya terbagi ke dalam kategori nelayan besar dan nelayan kecil (juragan darat). Nelayan besar adalah nelayan yang menginvestasikan modal dalam usahanya relatif besar. Biasanya nelayan besar tidak ikut melaut, mereka hanya menyediakan kebutuhan yang diperlukan untuk melaut dalam bentuk uang dan memiliki asisten atau kaki tangan untuk mengurus keperluan tersebut tanpa harus terjun langsung. Sedangkan nelayan kecil adalah nelayan yang

menginvestasikan modal dalam usahanya relatif sedikit, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan melaut/ operasi penangkapan ditangani sendiri. Apabila modal yang diperlukan untuk melaut tidak mencukupi, biasanya mereka akan meminjam kepada pemilik sumber modal baik berbentuk lembaga formal maupun nonformal.

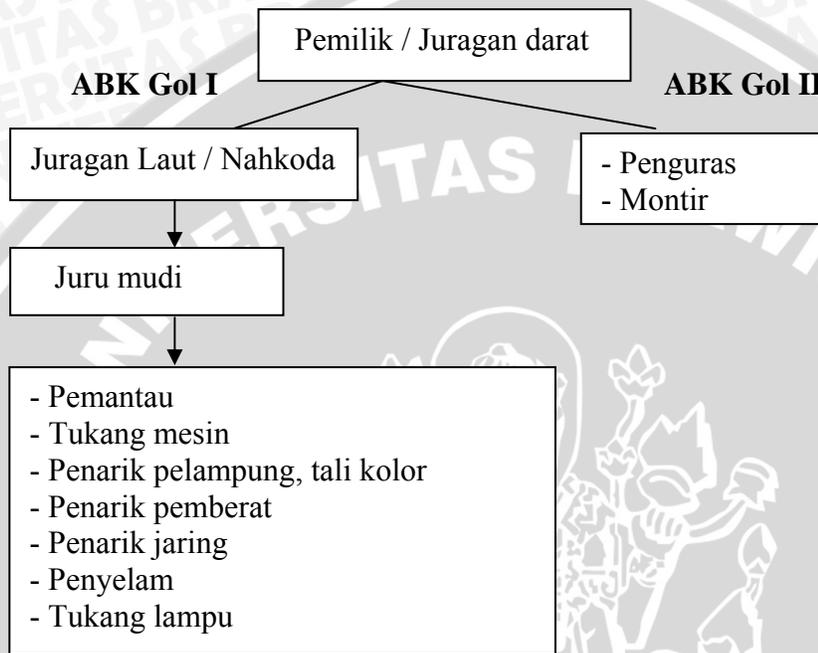
Pada lokasi penelitian di daerah Prigi pemilik modal nonformal sebagian besar dilakukan oleh bakul. Bakul disini merupakan pedagang ikan dan mereka biasanya orang yang memberikan pinjaman kepada pihak juragan darat yang membutuhkan bantuan modal untuk melanjutkan atau mengembangkan usahanya. Contohnya dalam pembuatan rumpun memerlukan dana yang besar sehingga juragan darat melakukan pinjaman modal kepada bakul. Kebanyakan pihak juragan darat dalam melakukan pinjaman lebih memilih lembaga nonformal (bakul) dari pada lembaga formal karena prosedurnya mudah, tanpa jaminan dan bisa sewaktu-waktu bila dibandingkan dengan lembaga formal yang prosedurnya berbelit-belit.

5.3.1 Struktur Organisasi dan Ketenagakerjaan Pada Nelayan *Purse Seine*

Struktur organisasi merupakan keseluruhan yang menunjukkan antara fungsi-fungsi *otoritas relatif* dan bertanggung jawab atas masing-masing fungsi, atau dapat dikatakan sebagai kerangka dasar menyeluruh yang mempersatukan fungsi-fungsi suatu organisasi dan menetapkan hubungan yang *definitif* antara personil yang melaksanakan fungsi tersebut. Hasil dari proses pengorganisasian adalah sebuah struktur yang memberikan suatu susunan yang sistematis dari tugas-tugas yang diserahkan, dimana setiap bagian komponen mempunyai tugas tertentu, semuanya membantu kepada tujuan secara keseluruhan.

Struktur Organisasi dimaksudkan sebagai pengelompokan kegiatan yang diperlukan yakni penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antara masing-masing unit tersebut (Manullang, 1992). Dalam usaha penangkapan terdapat dua fungsi yaitu majikan (pemilik) dan pekerja terlihat pada diagram struktur organisasi.

Struktur Organisasi pada Nelayan *Purse Seine*



(Gambar. 3 Struktur Organisasi Pada Nelayan *Purse Seine*)

Sumber: Hasil Penelitian, 2007

Dari struktur organisasi tersebut dapat dilihat pemilik (juragan darat) sebagai pemimpin dan membawahi dua golongan. Golongan pertama adalah ABK (Anak Buah Kapal) yang terlibat langsung dalam operasi penangkapan yaitu diantaranya juragan laut (nahkoda) 1 orang, wakil nahkoda 1 orang, tukang mesin 1 orang, penarik pelampung dan tali kolor 2 orang, penarik pemberat 2 orang, penarik jaring 10 orang, penyelam 1 orang, tukang lampu 1 orang. Sedangkan golongan kedua adalah ABK yang ada di darat yaitu diantaranya penguras 2 orang, montir 1 orang dan penjual ikan dilakukan oleh juragan darat dengan jumlah 1 nahkoda dan 19 ABK. Tugas nahkoda dan 22 ABK menurut golongannya:

1. Pekerja pada golongan pertama adalah sebagai berikut beserta tugasnya:

- Juagan laut (nahkoda) sebagai pemegang kendali jalannya kapal dan sebagai pemimpin untuk mengkoordinasi seluruh ABK yang terlibat dalam operasi penangkapan dalam melakukan penangkapan.
- Juru mudi sebagai pengendali jalannya kapal pengangkut ikan.
- Pemantau sebagai pembantu nahkoda dalam mengkoordinasi seluruh ABK dalam melakukan penangkapan.
- Tukang mesin tugasnya memperbaiki mesin apabila terjadi kerusakan mesin dalam melakukan operasional.
- Penarik pelampung dan penarik kolor tugasnya menarik pelampung juga sekaligus menarik kolor dan menata kembali pelampung disaat melakukan penangkapan.
- Penarik pemberat tugasnya menarik pemberat dan menata kembali pemberat disaat melakukan penangkapan.
- Penarik jaring (*purse seine*) tugasnya menarik jaring dan menatanya kembali disaat melakukan penangkapan.
- Penyelam tugasnya yaitu apabila terjadi kesalahan teknis dalam melakukan penangkapan seperti apabila jaring tersangkut pada baling-baling kapal.
- Tukang lampu tugasnya yaitu *setting* pelak sebelum melakukan penangkapan dan penerangan yang ada di kapal.

2. Pekerja pada golongan kedua adalah sebagai berikut beserta tugasnya:

- Penguras perahu

Pengurus perahu adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas menjaga perahu pada saat perahu berlabuh dan membersihkan perahu sebelum kapal kembali melaut. Secara umum pengurus perahu bertanggungjawab atas kebersihan, kerapian dan kecantikan kapal, keamanan dan kesiapan Baito (kapal beserta perlengkapannya), yaitu :

- Menguras air di kapal/ perahu
- Mengamankan kapal dari ombak besar agar tidak hanyut dibawa arus.
- Mengecat perahu (cat dari pemilik)
 - Menyiapkan segala fisik perahu untuk melaut.
 - Menyiapkan segala sesuatu perlengkapan operasional

Pengurus perahu pada umumnya tidak memiliki koordinator, mereka bekerja secara individu dan dipilih langsung oleh pemilik perahu. Menurut salah seorang pemilik perahu: Apabila terjadi kerusakan pada waktu menjaga perahu, pengurus tersebut akan mendapatkan sanksi baik moral atau mungkin sanksi material tergantung pada proses kejadian.

- Montir tugasnya memperbaiki mesin kapal apabila terjadi kerusakan yang parah dan *service* mesin sebelum melakukan operasional.

Di dalam struktur organisasi tersebut seluruh ABK yang ikut terlibat langsung dalam operasi penangkapan “produksi” dalam melakukan tugasnya bertanggungjawab kepada nahkoda dan nahkoda bertanggungjawab kepada juragan darat, sedangkan ABK yang ada di darat bertanggung jawab langsung kepada juragan darat.

Sehingga golongan pertama sebagai tenaga ”produksi” berada dibawah pengawasan juragan laut, sedangkan golongan kedua sebagai pekerja di darat berada dibawah pengawasan pemilik (juragan darat).

Di luar struktur organisasi atau selain ABK yang terlibat langsung dalam proses sistem bagi hasil yaitu:

1. Ngadem yaitu nelayan buruh yang tidak tetap dan dapat berpindah-pindah dari kapal satu ke kapal yang lain.

2. Bakul yaitu pedagang ikan baik berskala kecil maupun berskala besar.
3. Manol yaitu orang yang bertugas mengangkut keranjang yang berisi ikan dari perahu ke Tempat Pelelangan Ikan atau dari TPI ke mobil angkut.

1 5.3.2 Pola Hubungan *Patron-Client* Pada Usaha Penangkapan Dengan Alat Tangkapan Purse Seine Yang Menggunakan Alat Bantu Rumpon

Pola hubungan *patron-client* banyak terjadi di berbagai daerah, termasuk di daerah pesisir. *Patron* adalah seseorang yang menggabungkan status, kekuatan, pengaruh, simbol kekuatan bagi orang lain dalam mempertahankan dirinya atau menolong orang lain untuk melindungi dirinya. *Client* adalah orang yang bersedia membantu patron dan memiliki ciri status yang lebih rendah. Hubungan *patron-client* tidak terbentuk dengan sendirinya, tetapi diciptakan dengan membuat suatu kontrak kerja secara tidak tertulis. Biasanya hubungan ini bersifat kepercayaan sehingga tidak ada hitam diatas putih dan memiliki kekuatan hukum yang lemah apabila terjadi pelanggaran kontrak. Namun, hal ini jarang sekali terjadi atau bahkan tidak ada sama sekali karena hubungan kemasyarakatan yang bersifat kekeluargaan dan mementingkan kebutuhan bersama.

Hubungan *patron-client* terjadi pada 2 pasangan yaitu: pasangan pasangan pemilik kapal (juragan/*patron*) dan *Anak Buah Kapal (client)*, dan Bakul (pengambek/*patron*) dan pemilik kapal (*client*).

Pola hubungan kerja distratifikasikan menjadi dua kategori yaitu:

1. Nelayan pemilik/juragan darat (*patron*) dengan nelayan ABK (*client*).

Hubungan nelayan ini bersifat struktural fungsional dimana kedua belah pihak saling ketergantungan. Nelayan pemilik membutuhkan nelayan pandhega dalam melakukan operasi penangkapan sehingga perahu yang dimiliki oleh nelayan pemilik dapat berproduksi. Sebaliknya nelayan pandhega membutuhkan nelayan pemilik untuk mendapatkan upah dari operasi penangkapan.

2. Bakul (*patron*) dengan Nelayan Pemilik/juragan darat (*client*).

Hubungan ini bersifat struktural fungsional dimana kedua belah pihak saling ketergantungan. Nelayan pemilik membutuhkan bakul untuk pembuatan rumpon, karena pembuatan rumpon membutuhkan dana yang cukup besar. Sebaliknya bakul membutuhkan hasil tangkapan dari nelayan pemilik untuk keberlangsungan usahanya.

5.4 Sistem Bagi Hasil

Menurut harahap (1993), sistem bagi hasil dalam perikanan tangkap adalah merupakan suatu bentuk pemanfaatan faktor produksi dengan pembagian hasil terhadap suatu unsur produksi yang lain, yaitu tenaga kerja, dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil bersih usaha dan juga dalam bentuk lawuhan sesuai dengan hasil produksi yang diperoleh pada saat tersebut.

Jumlah yang dilakukan dalam pembagian adalah hasil bersih usaha, yaitu hasil produksi/revenue (nilai produksi setelah diambil untuk pembagian lawuhan) dikurangi biaya operasional dan retribusi. Pembagian lawuhan sebagai bekal hidup bagi keluarga nelayan selama ditinggal melaut. Besar dan perbandingannya tidak tetap tergantung jumlah produksi dan keadaan pada waktu itu. Sebagai contoh untuk alat tangkap *purse seine* di daerah Prigi. Bila hasil produksi 8 – 10 keranjang dalam sekali trip, maka jumlah lawuhan yang dibagikan untuk ABK adalah 1 keranjang atau 10 % dari hasil penangkapan.

Sehingga untuk menghitung pendapatan aktual nelayan pendhega perlu diperhatikan pendapatan dari sisi bagian lawuhan, yang bisa juga pendapatan dalam satu petengan (satu periode penangkapan dalam satu bulan) nilainya lebih tinggi dari pada pembagian hasil bersih yang diterima.

5.4.1 Kelembagaan Bagi Hasil

Pola hubungan kerja diantara kesatuan alat tangkap menentukan sistem bagi hasil pada masyarakat perikanan tangkap. Semakin kompleks perikanan tangkap tersebut

semakin kompleks dan beragam sistem bagi hasil yang terjadi. Salah satu contoh adalah perikanan tangkap *purse seine*. Dimana lembaga yang berhubungan keterlibatan (peran) cukup banyak, antara lain nelayan pemilik, nahkoda dan ABK-nya (pendhega), ngadem, bakul, Pemilik perusahaan (*cold storage* dan tepung), manol dan TPI (Tempat Pelelangan Ikan). Faktor-faktor ini pada akhirnya menentukan sistem bagi hasil setempat. Sistem bagi hasil pada akhirnya menentukan pula salah satu pendapatan nyata pada kesatuan perikanan tangkap baik nelayan pemilik maupun nelayan pendhega. Dengan demikian tingkat pendapatan akan sangat beragam sekali tergantung berbagai faktor diatas, disamping faktor kesediaan sumberdaya alam itu sendiri.

5.4.2 Sistem Bagi Hasil Pada Masyarakat Nelayan

Bagi hasil perikanan tangkap terjadi karena adanya pemanfaatan faktor produksi dari dua sisi, pemilik modal dan faktor produksi yang lain yaitu tenaga kerja. Sistem bagi hasil dalam masyarakat nelayan dapat dibedakan menjadi dua. **Pertama**, adalah sistem bagi hasil normatif Nasional, yaitu yang merujuk kepada Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan yang disahkan oleh Pemerintah sejak tahun 1964. **Kedua**, sistem bagi hasil yang disebut normatif lokal/akual, yaitu aturan bagi hasil yang disepakati secara normatif oleh masyarakat nelayan, dan yang sebenarnya terjadi. Pada kenyataannya, undang-undang sistem bagi hasil normatif nasional tidak pernah diterapkan dalam masyarakat nelayan tradisional, justru sistem bagi hasil normatif lokal yang diterapkan.

1. Sistem bagi hasil normatif nasional

Undang-Undang Bagi Hasil (UUBH) Perikanan No. 16 tahun 1964 yang telah disahkan bulan juli 1964. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan, jika suatu usaha perikanan

diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi-hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut:

- Jika dipergunakan perahu layar: minimum 75 % dari hasil bersih untuk para nelayan pendega;
- Jika dipergunakan kapal motor: minimum 40 % untuk para nelayan pendega;
- Mengenai hasil ikan liar: minimum 60 % dari hasil bersih untuk nelayan pendega.

Apabila diperjelas, maka makna dari ketentuan tersebut menyatakan, bahwa nelayan pendega (ABK) berhak sejumlah 75 % dari hasil tangkap (juragan : ABK = 25 : 75), sedangkan jika menggunakan motor perbandingan tersebut menjadi (juragan : ABK = 60 : 40). Ikan liar atau lebih dikenal ikan rucah adalah jenis ikan yang tertangkap selain dari tujuan penangkapan. Sebagai contoh, sasaran utama ikan tongkol, kemudian ada jenis ikan selain tongkol yang tertangkap, maka yang 60 % menjadi hak ABK. Tetapi aturan ini akan susah diterapkan apabila alat tangkap yang digunakan mempunyai sasaran banyak jenis atau bermacam-macam spesies ikan.

Ayat (2) menyebutkan pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat 1 pasal ini diatur oleh mereka sendiri dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menghindari terjadinya pemerasan dengan ketentuan bahwa perbandingan antara bagian terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).

Pasal 4 menyebutkan, angka bagian pihak nelayan penggarap sebagai yang tercantum dalam pasal 3 ditetapkan dengan ketentuan, bahwa beban-beban yang bersangkutan dengan usaha perikanan itu harus dibagi sebagai berikut:

- c. Beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap: ongkos lelang, uang rokok/jajan/biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama dilaut. Biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yang disyahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II seperti untuk koperasi, dan pembuatan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain-lain.
- d. Beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik: ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya.

Di dalam uraian UUBH tersebut dijelaskan pembagian hasil antara juragan darat dengan pandega (ABK) serta biaya operasional di tanggung oleh juragan darat, tetapi sistem bagi hasil penangkapan dengan alat tangkap *purse seine* di daerah pesisir pantai Prigi secara umum nelayan pemilik membebaskan biaya eksploitasi atau biaya operasional kepada para nelayan pendega dengan cara ditanggung bersama.

2. Sistem bagi hasil normatif lokal

Sistem bagi hasil dalam usaha penangkapan boleh dikatakan telah melembaga di pedesaan pantai. Sistem bagi hasil ini berbeda untuk masing-masing alat tangkap. Upah kerja dari nelayan umumnya dikenal dengan sebutan bagian, yaitu bagian atas hasil tangkapan yang diperoleh dalam setiap trip. Besar upah kerja yang diperoleh anak buah kapal (pendega) bervariasi antara satu jenis alat tangkap dengan jenis alat tangkap yang lain. Upah kerja itu juga berbeda-beda dari suatu daerah ke daerah lain, antara lain

dipengaruhi oleh jumlah tenaga yang tersedia di daerah ataupun dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat nelayan setempat.

Didalam sistem bagi hasil sangat terkait dengan pola hubungan kerja yang terjadi. Pola hubungan kerja utamanya ditentukan pola penguasaan di darat dan penguasaan di laut. Penguasaan di darat lebih dikenal dengan juragan darat, adalah sebagai pemilik alat produksi. Penguasaan di laut juragan laut/nahkoda adalah orang yang ditunjuk pemilik untuk memimpin operasi penangkapan. Penunjukan terhadap nahkoda terutama didasarkan atas pertimbangan kemampuan dan pengalamannya dalam mengoperasikan alat tangkap, sehingga persentase bagi hasil yang diterima nahkoda lebih besar dibandingkan dengan sesama ABK yang lain.

Sistem bagi hasil normatif lokal, dianggap lebih dapat berjalan sesuai dengan nilai, norma dan tradisi turun-temurun masyarakat nelayan. Sekalipun demikian sistem bagi hasil setempat, tidak pula dapat memberikan tingkat kepuasan baik bagi nelayan pendega maupun nelayan pemilik.

Secara umum nelayan pemilik membebankan biaya eksploitasi atau biaya operasional kepada para nelayan pendega dengan cara ditanggung bersama. Penanggungungan bersama ini lebih dikenal dengan bagi tengah. Resiko ini diperhitungkan dari hasil penangkapan setelah dilelang (potong biaya retribusi dan biaya angkut).

Akibatnya bahwa ada dua pandangan yang berbeda, bahwa pihak pendega dengan aturan bagian dari sistem setempat tersebut merasa kurang puas seharusnya pendega tidak ikut menanggung biaya eksploitasi. Berbagai hal yang mendasarinya adalah bahwa sebagian besar nelayan pendega dari golongan ekonomi lemah tidak mampu menjamin persediaan bahan makanan yang cukup. Disisi lain pihak pemilik

merasa bahwa hak yang diterima adalah cukup wajar, mengingat bahwa investasi untuk pemilikan alat tangkap cukup besar.

Disamping itu menurut pandangan nelayan pemilik, bahwa pihak nelayan pendega telah banyak diuntungkan dari pendapatan uang lauk/lawuhan (bagian ikan pada setiap kesempatan operasi di laut yang diuangkan) dan uang insentif (hadiah pada hari raya atau saat hasil tangkapan melimpah). Karena pendapatan nelayan pendega selain dari bagi hasil mendapat insentif dari pemilik alat dan bagian natura (ikan) yang bisa diuangkan.

Dari ketidakpuasan ini muncul berbagai bentuk penyimpangan dalam sistem bagi hasil normatif lokal, terutama dengan masuknya pihak-pihak lain yang tidak ikut dalam operasi penangkapan untuk meminta bagian ikan atau para ABK sengaja mengambil ikan agak berlebihan (*esekan*) disamping mendapat lawuhan (bagian natura). Akibatnya bagi hasil secara aktual ini tidak menguntungkan bagi suatu tatanan usaha. Insentif ekonomi bagi pengusaha maupun pendega menjadi kurang nyata. Kenyataan dengan sedikit penyimpangan seperti ini menjadi suatu kesepakatan baru, dengan derajat nilai penyimpangannya bervariasi tergantung masing-masing perilaku nelayan dalam satu kesatuan unit armada penangkapan tersebut.

Walaupun ada sedikit-sedikit penyimpangan dalam sistem bagi hasil, namun kelembagaan ini nampaknya tetap eksis dan menjadi kesepakatan yang tidak pernah muncul konflik secara terbuka. Berikut ini adalah contoh penerapan sistem bagi hasil untuk armada penangkapan kapal *purse seine*.

5.5 Identifikasi Permasalahan Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil penangkapan dengan alat tangkap *purse seine* di daerah pesisir pantai Prigi secara umum nelayan pemilik membebankan biaya eksploitasi atau biaya

operasional kepada para nelayan pendega dengan cara ditanggung bersama. Penanggung bersama ini lebih dikenal dengan bagi tengah. Resiko ini diperhitungkan dari hasil penangkapan setelah dilelang (potong biaya retribusi dan biaya angkut).

Akibatnya ada dua pandangan yang berbeda, bahwa pihak pendega dengan aturan bagian dari sistem setempat tersebut merasa kurang puas seharusnya pendega tidak ikut menanggung biaya eksploitasi. Berbagai hal yang mendasarinya adalah bahwa sebagian besar nelayan pendega dari golongan ekonomi lemah tidak mampu menjamin persediaan bahan makanan yang cukup. Disisi lain pihak pemilik merasa bahwa hak yang diterima adalah cukup wajar, mengingat bahwa investasi untuk pemilikan alat tangkap cukup besar.

Disamping itu menurut pandangan nelayan pemilik, bahwa pihak nelayan pendega telah banyak diuntungkan dari pendapatan uang lauk/lawuhan (bagian ikan pada setiap kesempatan operasi di laut yang diuangkan) dan uang insentif (hadiah pada hari raya atau saat hasil tangkapan melimpah).

Aktifitas sistem bagi hasil tersebut terjadi beberapa penyimpangan pada normatif lokal yang dilakukan di TPI, penyimpangan ini sering dilakukan oleh juru mudi dan *manol* (orang yang bertugas mengangkut keranjang yang berisi ikan dari perahu ke Tempat Pelelangan Ikan atau dari TPI ke mobil angkut). Disini juru mudi mengambil sejumlah ikan untuk semua awak kapal baik ABK sendiri maupun yang *ngadem* (nelayan buruh yang tidak tetap) yang dinamakan *esekan*, *esekan* merupakan pembagian hasil tangkap diluar sistem bagi hasil. Disamping itu *manol* juga melakukan kecurangan pada waktu mengangkut keranjang, mereka mengambil ikan tanpa sepengetahuan (ngetrol) oleh juragan darat. Tetapi perilaku seperti ini minim sekali

dilakukan apabila rumpon tersebut pembuatannya dapat pinjaman dari bakul karena dalam proses pembongkarannya langsung diawasi oleh bakul.

Dalam sistem bagi hasil pada alat tangkap *purse seine* yang menggunakan alat bantu rumpon kebanyakan nelayan pemilik mendapatkan pinjaman modal dari bakul (pedagang ikan). Dalam pengembalian pinjaman kepada bakul, seluruh hasil tangkap nelayan *purse seine* yang di peroleh dari hasil penangkapan di rumpon tersebut dijual kepada bakul yang memberikan pinjaman. Bakul tersebut memberikan potong sebesar 10% sebagai pengembalian pinjaman, ini dilakukan bakul terus menerus sampai pinjaman tersebut lunas. Selain itu ada juga pinjaman tersebut sudah lunas tetapi masih juga di potong 10%, dengan alasan apabila ada kerusakan atau rumpon hilang uang tersebut akan digunakan untuk pembuatan rumpon kembali. Disamping itu pembelian yang dilakukan oleh bakul tersebut dibawah harga setandart, misalnya apabila harga ikan di pasaran Rp5.000,-/kg bakul tersebut membeli dengan harga Rp4.500,-/kg.

Menurut pandangan nelayan pemilik pembelian hasil tangkapnya yang dilakukan oleh bakul merugikan usahanya, tetapi nelayan pemilik tetap melakukan kesepakatan ini untuk keberlangsungan dari usaha penangkapannya. Sistem ini dianggap sebagai budaya lokal yang memberikan imbal balik kepada bakul yang telah memberikan modal pembuatan rumpon.

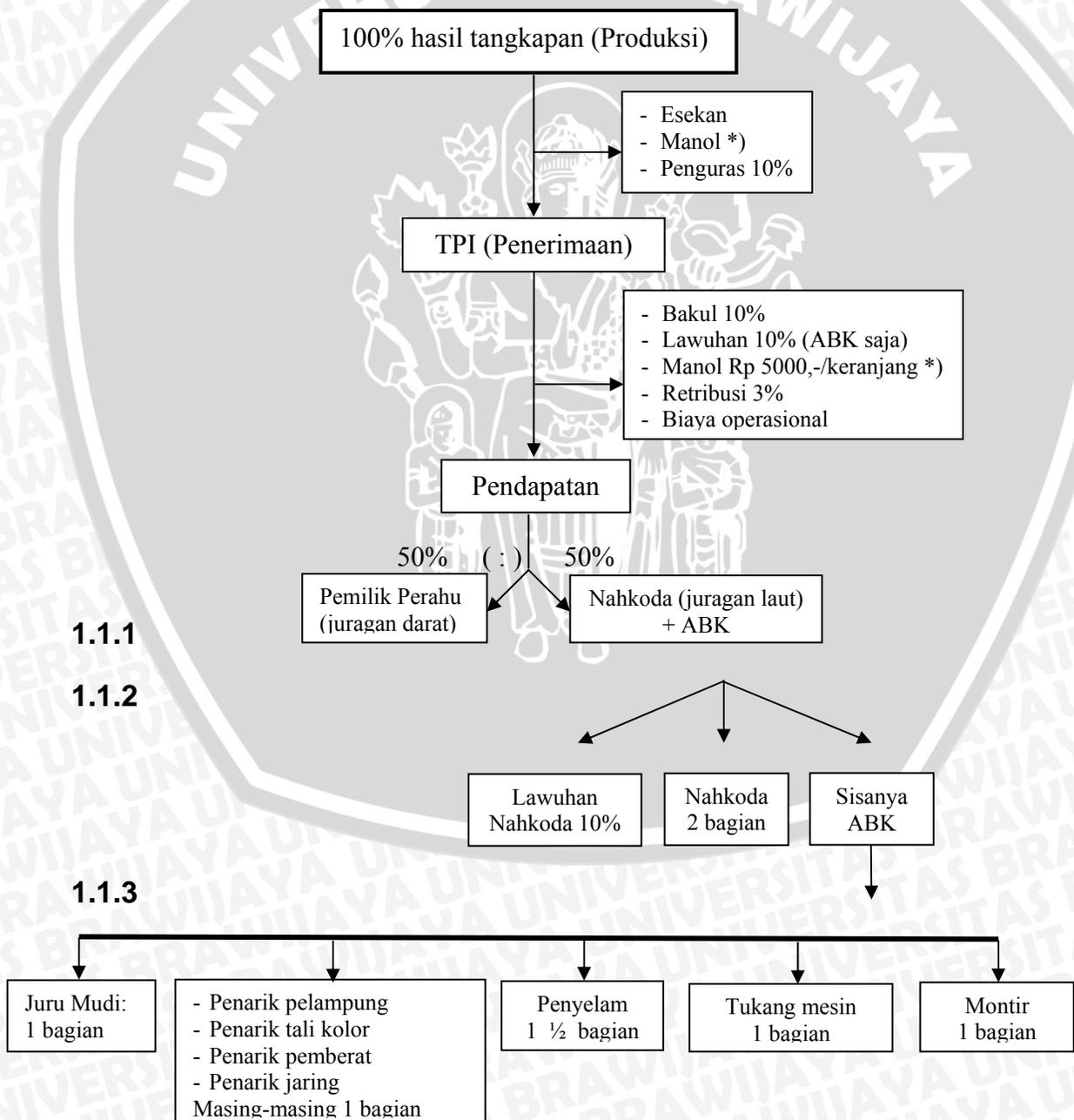
Dari ketidakpuasan ini muncul berbagai bentuk penyimpangan dalam sistem bagi hasil normatif lokal, terutama dengan masuknya pihak-pihak lain yang tidak ikut dalam operasi penangkapan untuk meminta bagian ikan atau para ABK sengaja mengambil ikan agak berlebihan (*esekan*) disamping mendapat lawuhan (bagian natura). Akibatnya bagi hasil secara aktual ini tidak menguntungkan bagi suatu tatanan usaha. Insentif ekonomi bagi pengusaha maupun pendega menjadi kurang nyata. Kenyataan dengan sedikit penyimpangan seperti ini menjadi suatu kesepakatan baru, dengan derajat nilai penyimpangannya bervariasi tergantung masing-masing perilaku nelayan dalam satu kesatuan unit armada penangkapan tersebut. Walaupun ada sedikit-sedikit penyimpangan dalam sistem bagi hasil, namun kelembagaan ini nampaknya tetap eksis dan menjadi kesepakatan yang tidak pernah muncul konflik secara terbuka.

5.6 Bagi Hasil Pada Usaha Penangkapan Dengan Alat Tangkapan *Purse Seine* Yang Menggunakan Alat Bantu Rumpon.

Bagi hasil pada kapal *purse seine* yang menggunakan alat bantu rumpon dibagi dua antara pemilik kapal dengan ABK (50%:50%) dari pendapatan bersih setelah dikurangi untuk biaya operasional, biaya manol, pengembalian kepada bakul dan biaya

lain-lainnya. Untuk bagian ABK dibagi lagi untuk 2 bagian bagi nahkoda (juragan darat) dan sisanya untuk ABK lainnya.

Proses dari pendaratan ikan sampai bagi hasil dapat dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 4. Proses dari pendaratan ikan sampai bagi hasil

Keterangan: *) Manol biasanya mengambil tanpa sepengetahuan juragan atau bakul (disebut *ngetrol*)

*) Jika manol tersebut melakukan *ngetrol*, tidak dapat upah Rp 5000,-/keranjang dari pemilik kapal

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan dari proses pembongkaran hasil tangkap dari kapal *purse seine* sampai dengan pembagian hasil. Pada proses pembongkaran hasil tangkap menuju TPI disini biasanya terjadi beberapa penyelewengan yang dilakukan oleh juru mudi dan *manol* (orang yang bertugas mengangkut keranjang yang berisi ikan dari perahu ke Tempat Pelelangan Ikan atau dari TPI ke mobil angkut). Disini juru mudi mengambil sejumlah ikan untuk semua awak kapal baik ABK sendiri maupun yang *ngadem* (nelayan buruh yang tidak tetap) yang dinamakan *esekan* (pembagian hasil tangkap diluar sistem bagi hasil). Disamping itu *manol* juga melakukan kecurangan pada waktu mengangkut keranjang, mereka mengambil ikan tanpa sepengetahuan (*ngetrol*) juragan darat. Tetapi perilaku seperti ini minim sekali dilakukan apabila alat bantu rumpon tesebut dalam pembuatannya mendapatkan pinjaman modal dari bakul (pedagang ikan) karena dalam proses pembongkarannya langsung diawasi oleh bakul.

Disamping itu nelayan *purse seine* yang mendapat pinjaman modal dari bakul berupa rumpon, seluruh hasil tangkapan dibeli dan dikuasai oleh bakul tersebut, karena bakul disini benar-benar menghitung pendapatan atau keuntungan yang mereka peroleh dengan uang yang mereka keluarkan karena usaha ini membutuhkan modal yang cukup besar. Sehingga manol dan juru mudi tidak leluasa melakukan hal yang seperti diatas. Berbeda dengan sistem gadangan karena modal operasional yang digunakan tidak cukup besar dan modal operasional itu sendiri ditanggung bersama antara juragan darat dengan nelayan pandeganya.

Selain adanya *esekan* bagi ABK dan *ngadem*, adapula pembagian 10% dari hasil tangkap diperuntukkan bagi pengurus sebagai upahny, acontohnya jika mendapat hasil tangkap 10 keranjang ikan pengurus mendapat 1 keranjang ikan. Dalam hal ini yang menyisihkan bagian adalah juru mudi.

Setelah ikan sampai di TPI dan telah dilakukan potongan *esekan*, *ngetrol* (jika ada) dan 10% untuk pengurus kemudian dilakukan transaksi antara pihak bakul dengan juragan darat. Disini bakul memberikan potongan sebesar 10% apabila modal yang digunakan dalam pembuatan rumpon adalah pinjaman dari bakul, sebagai pengembalian modal untuk pengadaan rumpon. Sehingga juragan darat mendapat penerimaan sebesar 90% dari seluruh hasil penjualan kotor hasil tangkap. Dari hasil penerimaan tersebut ada beberapa potongan yaitu:

1. Sebagai lawuhan berupa uang sebesar 10% untuk seluruh ABKnya.
2. Pembayaran manol @ Rp 5.000,-/keranjang (jika tidak terjadi "ngetrol").
3. Retribusi sebesar 3% diserahkan ke pihak TPI.
4. Biaya operasional sebesar 3 juta (diterima oleh juragan darat).

Dari beberapa potongan tersebut diperoleh pendapatan bersih yang siap untuk dilakukan bagi hasil. Dari pendapatan bersih dilakukan pembagian hasil tangkapan (dalam bentuk uang) dibagi dua antara pemilik perahu dengan nahkoda dan ABK (50%:50%).

Pada pembagian hasil antara pemilik perahu dan ABK terdapat 1 Nahkoda (Juragan Laut) dan 19 Anak Buah Kapal (ABK). Sistem pengupahan kepada Nahkoda dan ABK dilakukan setelah mendapat uang dari pembeli (bakul). Sebelum melakukan sistem pengupahan menghitung pendapatan bersih yaitu penjualan hasil tangkap seluruhnya di kurangi total biaya. Pendapatan yang di terima oleh Juragan darat dan

upah yang diberikan kepada Juragan Laut dan ABK yaitu setelah pendapatan bersih dibagi dua yaitu 50% bagian untuk juragan darat dan 50% bagian untuk Nahkoda (Juragan laut) dan 19 ABK dengan pembagian Juragan laut mendapat (2 bagian dan 10% untuk lawuhan) dan sisanya untuk 19 ABK. Dari 19 ABK masing-masing mendapat 1 bagian kecuali 1 ABK yang mendapatkan 1,5 bagian yaitu penyelam.

Dalam usaha penangkapan ini ada 2 sistem yaitu sistem gadangan (berburu) dan sistem rumpon (menunggu dengan membuat rumah ikan tersebut), dalam hal perbaikan kapal ditangguhkan pada sistem gadangan. Karena dalam sistem rumpon pembagian hasilnya dilakukan per trip setelah mendapat uang dari hasil penjualan kepada bakul, sehingga belum diketahui kapal tersebut terjadi kerusakan. Semua perbaikan kapal ditangguhkan pada sistem gadangan, karena sistem gadangan pembagian hasilnya dilakukan pada waktu akhir musim, sehingga apabila ada kerusakan dapat diketahui.

5.7 Ketergantungan Nelayan *Purse Seine* Terhadap Pemilik modal (Bakul).

Kebanyakan nelayan pemilik di pesisir pantai Prigi dalam menjalankan usaha penangkapan dengan menggunakan alat bantu rumpon membutuhkan modal yang sangat besar kurang lebih 20 juta. Untuk mendapatkan modal sebesar itu nelayan *purse seine* melakukan pinjaman kepada pemilik modal yaitu bakul (pedagang ikan yang berskala besar). Kebanyakan pihak juragan darat dalam melakukan pinjaman lebih memilih lembaga nonformal (bakul) dari pada lembaga formal karena prosedurnya mudah, tanpa jaminan, tanpa bunga, bisa sewaktu-waktu dan hanya atas dasar kepercayaan, bila dibandingkan dengan lembaga formal lebih mudah memperoleh pinjaman, karena lembaga formal prosedur yang digunakan berbelit-belit dan belum tentu mendapat pinjaman yang diinginkan. Oleh karena itu timbul ketergantungan nelayan *purse seine* terhadap pemilik modal.

Hubungan ini bersifat struktural fungsional dimana kedua belah pihak saling ketergantungan. Nelayan pemilik membutuhkan bakul untuk pembuatan rumpon, karena pembuatan rumpon membutuhkan dana yang cukup besar. Sebaliknya bakul membutuhkan hasil tangkapan dari nelayan pemilik untuk keberlangsungan usahanya.

5.8 Pendapatan Sebelum Dan Sesudah Memasang Rumpon

Tujuan didirikannya suatu usaha adalah untuk memperoleh keuntungan dan pendapatan bersih. Sebelum melakukan perhitungan tentang pendapatan bersih harus dilakukan perhitungan tentang pendapatan kotor atau sering disebut dengan nilai produksi dalam rupiah, yaitu hasil perkalian antara volume produksi dengan harga jual

per satuan harga. Sedangkan pendapatan bersih adalah merupakan selisih antara pendapatan kotor yang diterima selama periode tertentu dengan total biaya yang dikeluarkan selama periode waktu tersebut.

Penentuan harga ikan tiap kali produksi sangat ditentukan oleh mekanisme lelang, sehingga harga ikan bervariasi. Tetapi apabila dalam usaha penangkapan tersebut menggunakan rumpon dan dibiayai oleh bakul, harga ikan hasil tangkapan tidak melalui mekanisme lelang di TPI tetapi langsung diterima oleh bakul tersebut dengan harga standart. Berdasarkan data dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi harga ikan pada bulan September 2007 adalah sebesar Rp 5000 untuk jenis ikan Layang, ikan Lemuru sebesar Rp 1.250, ikan Tongkol sebesar Rp 5.600, ikan Cakalang sebesar Rp 5.650, dan ikan Tuna sebesar Rp 6.500.

5.8.1 Pendapatan Sebelum Menggunakan Rumpon

Dari data yang diperoleh dilakukan perhitungan, modal total yang digunakan dalam usaha penangkapan dengan alat *purse seine* sebelum menggunakan rumpon KM. Sri Mulya kurang lebih Rp 233.248.333,- yang terdiri dari modal investasi awal sebesar Rp 180.800.000,- dan modal kerja rata-rata sebesar Rp 52.448.333,- perbulan atau Rp 2.722.416,- pertrip. Untuk lebih jelasnya data mengenai investasi modal tetap dan modal kerja yang digunakan dapat dilihat pada lampiran 4 dan 5.

Dalam usaha ini modal tidak tetap yang ada terdiri dari pembelian solar, besin, minyak tanah, keperluan kapal dan biaya-biaya lainnya. Biaya tetap pada usaha ini terdiri dari penyusutan kapal, mesin kapal, *purse seine* dan jangkar dengan nilai total sebesar Rp 24.580.000,- pertahun dan perbulan sebesar Rp. 2.048.333,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 5.

Dari data yang diperoleh produksi satu bulan ikan Tuna 390 kg, baby Tuna 385 kg, cakalang 10.590 kg, layang 3410 kg. Jadi total penerimaan dalam satu bulan adalah Rp 77.806.500,- untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 6. penerimaan setelah dikurangi dengan total biaya dalam satu bulan sebanyak 20 trip sebesar Rp 52.448.333,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 7.

Pada usaha ini total biaya perbulan adalah Rp 52.448.333,-, pendapatan yang di hasilkan perbulan adalah sebesar Rp 77.806.500,-. Sehingga penerimaan yang diterima oleh KM. Sri Mulya ini adalah sebesar Rp 25.358.167,- perbulan. Untuk lebih jelasnya perhitungan nilai keuntungan pada usaha ini dapat dilihat pada lampiran 7. Serta digunakan untuk pembayaran kepada manol (tukang pikul keranjang) sebesar Rp 800.000,- dan pembayaran retribusi sebesar Rp 736.750,- kepada pihak TPI. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 7.

Usaha penangkapan dengan alat tangkap purse seine tanpa menggunakan alat bantu rumpon pada KM. Sri Mulya ini memperoleh pendapatan sebesar Rp 23.821.417,- perbulan.

5.8.2 Pendapatan Sesudah Menggunakan Rumpon

Dari data yang diperoleh dilakukan perhitungan, modal total yang digunakan dalam usaha penangkapan dengan alat tangkap *purse seine* yang menggunakan rumpon KM. Sri Mulya kurang lebih Rp 197.400.000,- yang terdiri dari modal investasi awal sebesar Rp 183.300.000,- dan modal kerja rata-rata sebesar Rp14.100.000,- perbulan atau Rp 2.820.000,- pertrip. Untuk lebih jelasnya data mengenai investasi modal tetap dan modal kerja yang digunakan dapat dilihat pada lampiran 8 dan 9.

Dalam usaha ini modal tidak tetap yang ada terdiri dari pembelian solar, besin, minyak tanah, keperluan kapal dan biaya-biaya lainnya. Total biaya Rp 2.820.000,- pertrip dan perbulannya adalah sebesar Rp 14.100.000,-. Biaya tetap pada usaha ini terdiri dari penyusutan kapal, mesin kapal, *purse seine*, rumpon laut dalam, pelak dan jangkar dengan nilai total sebesar Rp 24.900.000,- pertahun dan perbulan sebesar Rp. 2.075.000,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 9.

Dari data yang diperoleh produksi perbulan ikan Tuna 180 kg, baby Tuna 1.251 kg, cakalang 6.999 kg, layang 4.990 kg. Jadi total pendapatan dalam satu bulan adalah Rp 108.827.000,- untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 10. Penerimaan setelah dikurangi dengan total biaya dalam satu bulan Rp 14.100.000,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 11.

Pada usaha ini total biaya perbulan adalah Rp 14.100.000,-, penerimaan yang di hasilkan perbulan adalah sebesar Rp 108.827.250,-. Sehingga penerimaan yang diterima oleh KM. Sri Mulya ini adalah sebesar Rp 94.727.250,- perbulan. Untuk lebih jelasnya perhitungan nilai keuntungan pada usaha ini dapat dilihat pada lampiran 11.

Pada usaha ini rumpon yang digunakan adalah pinjaman dari bakul, sehingga pendapatan nelayan dipotong sebesar 10% sebagai pengembalian pinjaman kepada bakul sebesar Rp 9.472.725,-. Serta digunakan untuk pembayaran kepada manol (tukang pikul keranjang) sebesar Rp 1.325.000,- dan pembayaran retribusi sebesar Rp 2.517.900,- kepada pihak TPI. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 11.

Usaha penangkapan dengan alat tangkap *purse seine* yang menggunakan alat bantu rumpon pada KM. Sri Mulya ini memperoleh pendapatan sebesar Rp 81.411.625,- perbulan.

Selisih pendapatan kapal *purse seine* yang menggunakan rumpon dengan produksi kapal *purse seine* yang tanpa menggunakan rumpon yaitu sebesar Rp 57.590.200,- per bulan atau 341,75 %. Artinya pendapatan kapal *purse seine* yang menggunakan rumpon terjadi kelipatan sebesar 3 (tiga) kali lipat lebih dari pada pendapatan kapal *purse seine* yang tanpa menggunakan rumpon. Jumlah pendapatan dalam hal ini dipengaruhi oleh besarnya biaya pengeluaran (TC), kualitas, jenis, dan harga ikan yang diperoleh.

Sistem bagi hasil kapal *purse seine* tanpa menggunakan rumpon dilakukan pada akhir musim (1 bulan). Dalam 1 bulan kapal *purse seine* KM. Sri Mulya sebelum menggunakan rumpon melakukan penangkapan sebanyak 20 trip. Sedangkan sistem bagi hasil kapal *purse seine* yang menggunakan alat bantu rumpon dilakukan pada saat setelah memperoleh hasil penjualan dari pedagang (bakul). Dalam 1 bulan kapal *purse seine* KM. Sri Mulya yang menggunakan alat bantu rumpon melakukan penangkapan sebanyak 5 trip.

5.8.3 Pembagian Hasil Tangkap Sebelum Dan Sesudah Menggunakan Rumpon

Pembagian Hasil Penangkapan sebelum Menggunakan Rumpon

No	Status nelayan	Jumlah orang	Tugas	Bagian per orang	Bagian % per orang
----	----------------	--------------	-------	------------------	--------------------

1	Juragan darat	1	Pemilik alat	41.5	66.666
2	Juragan laut	1	Nahkoda	2.0	3.212
3	Juru mudi	1	Pengemudi perahu	1.5	2.41
4	Juru mesin	2	Mengendalikan mesin	$1.5 \times 2 = 3$	$2.41 \times 2 = 4.82$
5	Juru pengamat	1	Menemukan gerombolan ikan	1.25	2.0
6	Juru lampu	2	Mengoperasikan lampu	$1.0 \times 2 = 2$	$1.61 \times 2 = 3.21$
7	Juru tali	1	Menarik tali	1.0	1.61
8	Penguras	2	Mempersiapkan operasi penangkapan, perawatan kapal dan alat tangkap	$1.0 \times 2 = 2$	$1.61 \times 2 = 3.21$
9	Juru jaring (ABK biasa)	9	Mengoperasikan alat menata pelampung	$1.0 \times 9 = 9$	$1.61 \times 9 = 14.5$

Pembagian Hasil Penangkapan Sesudah Menggunakan Rumpon

No	Status nelayan	Jumlah orang	Tugas	Bagian per orang	Bagian % per orang
1	Juragan darat	1	Pemilik alat	50	50%
2	Juragan laut	1	Nahkoda	2.0	4.86
3	Juru mudi	1	Pengemudi perahu	1	2.43
4	Juru mesin	2	Mengendalikan mesin	$1 \times 2 = 2$	$2.43 \times 2 = 4.86$
5	Juru pengamat	1	Menemukan gerombolan ikan	1	2.43
6	Juru lampu	2	Mengoperasikan lampu	$1.0 \times 2 = 2$	$2.43 \times 2 = 4.86$
7	Juru tali	1	Menarik tali	1.0	2.43
8	Penyelam	1	Memangsang aktraktor pada rumpon	1.5	3.64
9	Juru jaring (ABK biasa)	10	Mengoperasikan alat menata pelampung	$1.0 \times 10 = 9$	$2.43 \times 9 = 24.3$

5.9 Matriks Perbandingan Antara Sebelum Menggunakan Rumpon Dan Setelah Menggunakan Rumpon.

No	Keterangan	Sebelum menggunakan rumpon	Sesudah menggunakan rumpon
----	------------	----------------------------	----------------------------

1.	Sistem bagi hasilnya	Pembagian hasil tangkapan untuk juragan darat 2/3 bagian dan untuk ABK 1/3 bagian dari pendapatan bersih selama 1 musim /sebulan.	Pembagian hasil tangkapan untuk juragan darat 50% bagian dan untuk ABK 50% bagian dari pendapatan bersih dalam 1 trip.
2.	Penyelewengan yang dilakukan oleh ABK dan yang lainnya	Banyak terjadi penyelewengan karena biaya eksploitasi di tanggung bersama antara juragan dengan ABKnya.	Sedikit terjadi penyelewengan apabila usaha tersebut modal yang digunakan dapat pinjaman dari bakul karena bakul mengawasi penuh dalam proses pembongkaran.
3.	Modal operasional yang digunakan	Lebih banyak, karena selama 1 musim melakukan operasional rata-rata 18 trip	Lebih sedikit, karena selama 1 musim melakukan operasional rata-rata 10 trip
4.	Sistem penangkapan yang digunakan.	Sistem berburu (aktif) tidak tentu, selama kurang lebih 12 jam	Sistem menunggu (pasif) sudah ditentukan karena sudah terdapat rumah ikan buatan, selama kurang lebih 24 jam
5.	Pendapatan yang diperoleh	Nelayan mengalami penurunan pendapatan karena adanya faktor alam	Pendapatan nelayan meningkat dengan adanya rumah ikan buatan (rumpon)

Di lihat dari hasil perbandingan antara sebelum dan sesudah memakai rumpon yang lebih memberikan kesejahteraan adalah yang menggunakan alat bantu rumpon, karena dengan menggunakan alat bantu rumpon menurut hasil penelitian yang kami peroleh pendapatan operasional nelayan *purse seine* meningkat. Selain itu dilihat dari fungsi utama rumpon bagi perikanan adalah suatu sarana pengumpul ikan sehingga ikan dapat ditangkap dengan mudah dan dalam jumlah yang relatif banyak. Menurut Bambang (2001), rumpon fungsinya hanya sebagai pembantu, yaitu membantu untuk mengumpulkan ikan pada suatu titik atau tempat untuk kemudian dilakukan operasi penangkapan.

Apabila dibandingkan dengan sebelum menggunakan alat bantu rumpon nelayan dalam melakukan penangkapan tidak dapat menentukan *fishing ground* hanya menebak sehingga pendapatan yang diperoleh tidak tentu tergantung dengan rezeki masing-masing, selain itu karena pengaruh alam yang sekarang banyak hutan gundul sehingga apabila terjadi hujan banyak lumpur yang terbawa oleh air sungai ke pantai dan menutupi karang-karang yang biasa digunakan ikan untuk melakukan pemijahan dan migrasi ikan menjadi terpengaruh karena habitatnya rusak

5.10 Faktor Pendukung Dan Penghambat Yang Mempengaruhi Usaha Penangkapan Dengan Menggunakan Alat Bantu Rumpon.

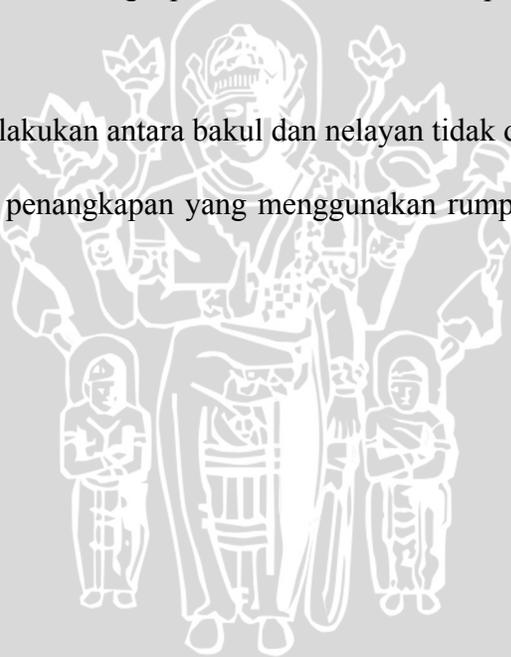
a. Faktor Pendukung

- Sistem rumpon yang dapat memusatkan gerombolan ikan mempermudah nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan.
- Dalam melakukan penangkapan, nelayan langsung menuju *fishing ground*.
- Bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Trenggalek yang mendanai pembuatan dan pemasangan rumpon dengan sistem kredit lunak sebagai upaya untuk sosialisasi manfaat rumpon kepada nelayan.
- Adanya pengawasan langsung dari bakul sehingga tidak banyak terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh ABK.

b. Faktor Penghambat

- Rumpon hilang terseret arus laut karena tali jangkar tidak mampu menahan tahanan arus terhadap tali jangkar dan atraktor.

- Rumpon rusak karena tali rumpon terputus terpotong oleh baling-baling kapal yang lewat di perairan, pelampung tertabrak oleh kapal, atau karena vandalisme (dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab).
- Gelombang besar yang menyebabkan aktivitas nelayan purse seine dalam melakukan penangkapan ikan terganggu, karena kondisi ini sangat membahayakan keselamatan para nelayan.
- Rumpon yang baru dipasang kurang memberikan hasil maksimal, karena ikan yang berkumpul dalam rumpon masih sedikit.
- Dalam membeli hasil tangkapan bakul melakukan potongan terhadap hasil tangkap nelayan.
- Transaksi yang dilakukan antara bakul dan nelayan tidak dengan cara tunai.
- Sistem bagi hasil penangkapan yang menggunakan rumpon belum diatur dalam UU.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil kegiatan penelitian di wilayah Perairan Prigi Kabupaten Trenggalek Jawa Timur, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil yang diterapkan di wilayah pesisir Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek secara umum nelayan pemilik membebaskan biaya eksploitasi atau biaya operasional kepada para nelayan pendega dengan cara ditanggung bersama, karena pihak nelayan pendega telah banyak diuntungkan dari pendapatan uang lauk/lawuhan (bagian ikan pada setiap kesempatan operasi di laut yang diuangkan) dan uang insentif (hadiah pada hari raya atau saat hasil tangkapan melimpah). Disamping itu dalam pengembalian pinjaman kepada bakul sebesar 10 % dan pembelian hasil tangkapnya dibawah standart yang dilakukan oleh bakul menurut nelayan pemilik merugikan usahanya, tetapi nelayan pemilik tetap melakukan kesepakatan ini untuk keberlangsungan dari usaha penangkapannya. Sistem ini dianggap sebagai budaya lokal yang memberikan imbal balik kepada bakul yang telah memberikan modal pembuatan rumpon.
2. Pembagian hasil pada usaha penangkapan dengan menggunakan alat tangkap *purse seine* yang menggunakan alat bantu rumpon dilakukan pada saat itu juga setelah mendapat uang dari hasil penjualan kepada bakul dan pengurangan biaya operasional sehingga memperoleh pendapatan dan dilakukan pembagian uang hasil tangkapan dibagi dua antara pemilik kapal dengan ABK (50%:50%).

3. Karena dalam mengembangkan usaha penangkapan seperti pengadaan rumpon membutuhkan biaya sangat besar sehingga pihak nelayan pemilik dalam melakukan pinjaman lebih memilih lembaga nonformal (bakul) dari pada lembaga formal karena prosedurnya mudah, tanpa jaminan, bisa sewaktu-waktu, tanpa bunga dan hanya atas dasar kepercayaan bila dibandingkan dengan lembaga formal yang prosedurnya berbelit-belit, sehingga timbul ketergantungan nelayan *purse seine* terhadap pemilik modal. Hubungan ini bersifat struktural fungsional dimana kedua belah pihak saling ketergantungan.
4. Penggunaan rumpon dalam usaha penangkapan mampu meningkatkan produksi hasil tangkap dan pendapatan nelayan dibandingkan tanpa menggunakan rumpon. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan antara nelayan *purse seine* sebelum menggunakan alat bantu rumpon dan setelah menggunakan alat bantu rumpon yaitu sebesar Rp 24.558.167,-/bulan (sebelum menggunakan rumpon) Rp 83.929.525,-/bulan (setelah menggunakan rumpon). Jadi menggunakan alat bantu rumpon dapat meningkatkan pendapatan sebesar 341,75 %. Artinya pendapatan kapal *purse seine* yang menggunakan rumpon terjadi kelipatan sebesar 3 (tiga) kali lipat lebih dari pada pendapatan kapal *purse seine* yang tanpa menggunakan rumpon.
5. Dengan menggunakan alat bantu rumpon dapat meningkatkan pendapatan nelayan *purse seine* dan memberikan kesejahteraan lebih baik.
6. Faktor Pendukung usaha penangkapan dengan menggunakan alat bantu penangkapan berupa rumpon yaitu (1) Sistem rumpon yang dapat memusatkan gerombolan ikan mempermudah nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan; (2) Dalam melakukan penangkapan, nelayan langsung menuju *fishing ground*; (3) Bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Trenggalek yang mendanai pembuatan dan

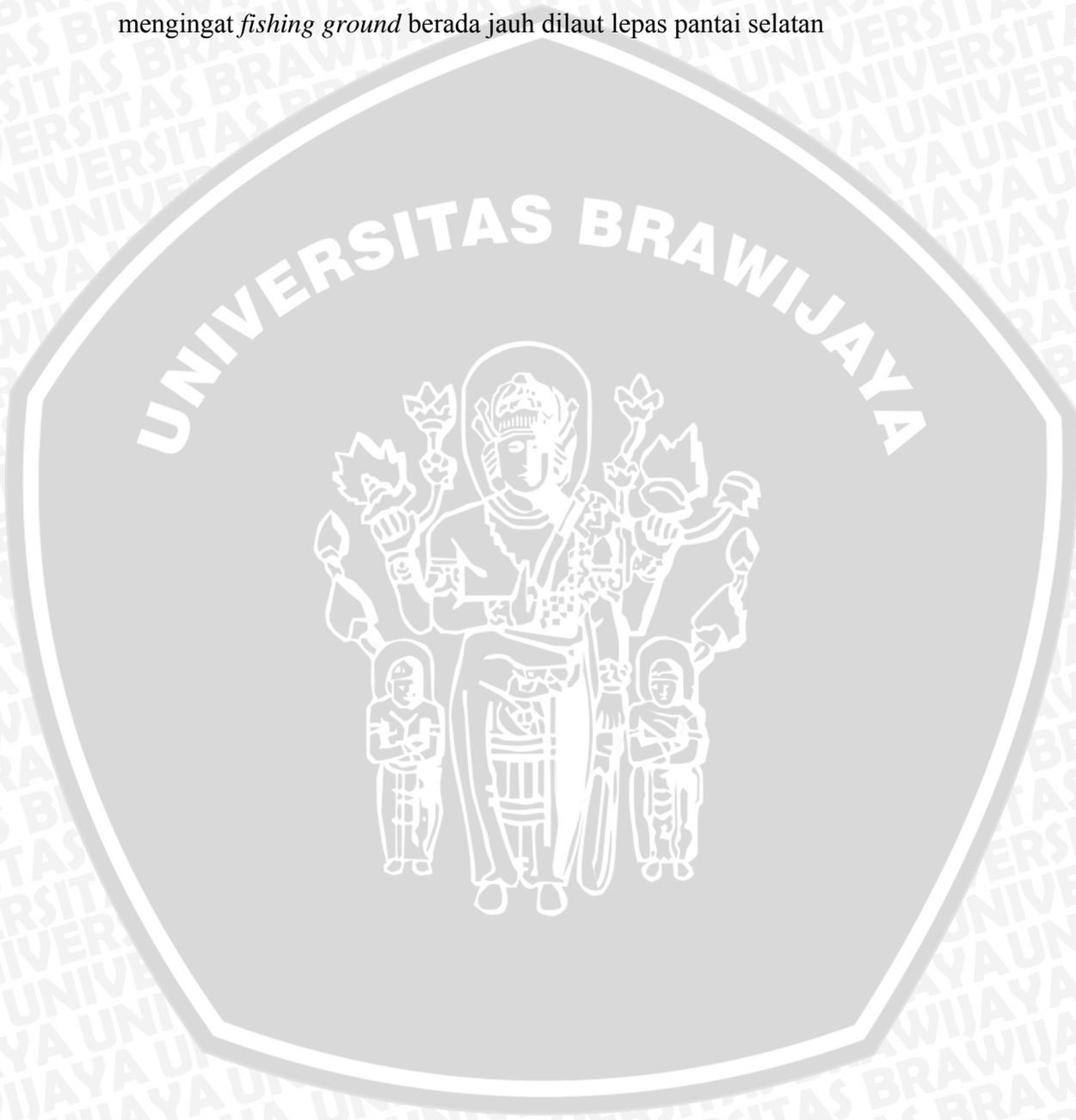
pemasangan rumpon dengan sistem kredit lunak sebagai upaya untuk sosialisasi manfaat rumpon kepada nelayan. Adapun kendala dalam usaha penangkapan dengan menggunakan rumpon antara lain (1) Rumpon hilang terseret arus laut karena tali jangkar tidak mampu menahan tahanan arus terhadap tali jangkar dan traktor; (2) Rumpon rusak karena tali rumpon terputus terpotong oleh baling-baling kapal yang lewat di perairan, pelampung tertabrak oleh kapal, atau karena vandalisme (dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab); (3) Gelombang besar yang menyebabkan aktivitas nelayan purse seine dalam melakukan penangkapan ikan terganggu, karena kondisi ini sangat membahayakan keselamatan para nelayan; (4) Rumpon yang baru dipasang kurang memberikan hasil maksimal, karena ikan yang berkumpul dalam rumpon masih sedikit.

6.2 Saran

Dari hasil kegiatan penelitian di wilayah perairan Prigi Kabupaten Trenggalek Jawa Timur, maka disarankan untuk:

1. Terhadap aparat PPN Prigi Perlu adanya peningkatan keamanan yang lebih baik terhadap usaha ini supaya dalam melakukan operasional dilaut maupun setelah pendaratan hasil tangkap nelayan bisa merasa aman.
2. Perlu adanya pengorganisasian nelayan rumpon untuk membentuk kelompok atau paguyuban antara nelayan rumpon untuk menghindari konflik antar nelayan.
3. Perlu adanya informasi kepada investor dalam mengembangkan usaha tersebut.
4. Perlu adanya peningkatan SDM dengan cara meningkatkan tingkat pendidikan supaya lebih mampu mengelola sumberdaya perikanan di prigi.

5. Perlu adanya kajian dalam 1 tahun untuk mengetahui besarnya keuntungan dan kelayakan usaha.
6. Terhadap aparat PPN Prigi lebih di perhatikan lagi tingkat keamanan, karena mengingat *fishing ground* berada jauh dilaut lepas pantai selatan

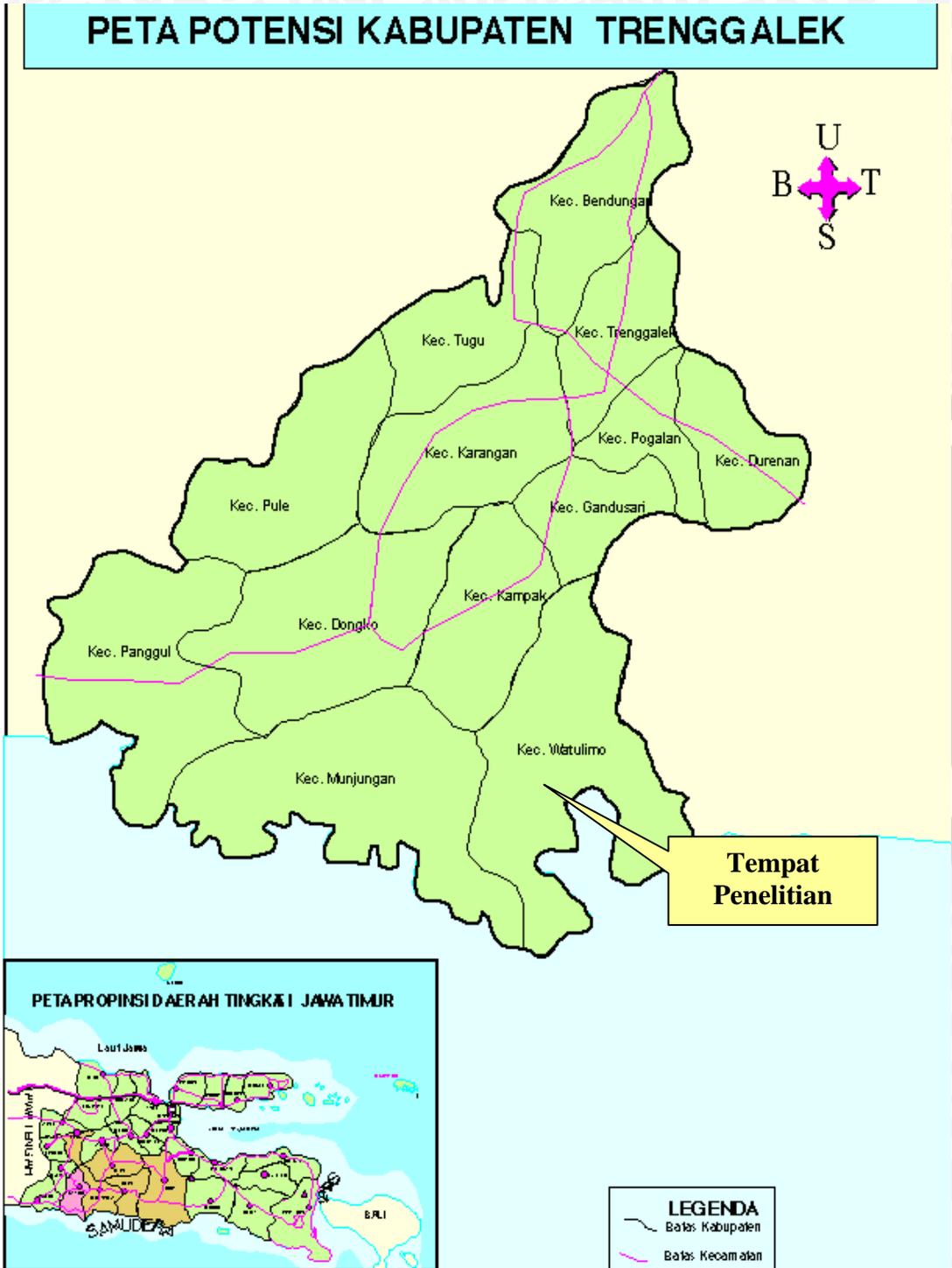


DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous, 1993. **Status Perikanan Ikan Pelagis Kecil Dan Kemungkinan Pemanfaatannya Sebagai Umpan Hidup Untuk Perikanan Rawai Tuna Di Prigi, Jawa Timur.** Jurnal Penelitian Perikanan Laut no 80 1993. Balai Penelitian Perikanan Laut. Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta
- Ansori, Isa. 2004. **Perubahan Sosial Nelayan Pancing dan Kebijakan Motorisasi Perikanan di Teluk Prigi (Studi Kasus Nelayan di Teluk Prigi Kecamatan Watu Limo Kabupaten Trenggalek Propinsi Jawa Timur).** Skripsi. Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya Malang. Tidak Diterbitkan.
- Arikunto, S. 1992. **Porsedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.** Melton Jaya. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2001. **Metodologi Penelitian Kuantitatif.** PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Dahuri R., Rais Y., Putra S.,G., Sitepu, M.J. 2001. **Pengelolaan Sumber daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu.** PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Darwisito Suria, Arifin Taslim dan Paongan Yulianus. 2002. **Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat Di Indonesia.** (on Line) www.ipb.ac.id
- Dinas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2006. **Laporan Tahunan.** Prigi
- Dirjen Perikanan Tangkap. 2004. **Info Aktual: Perikanan Tangkap Indonesia.** Dinas Kelautan dan Perikanan RI. www.dkp.go.id
- Hadi, S. 1989. **Metode Reseach Jilid I.** Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Harahap, Nuddin, 1993. **Kekuatan Tradisi dalam Sistem Bagi Hasil dan Analisis Frofitabilitas Usaha Penangkapan Ikan di Jawa Timur,** The Toyota Foundation.
- Koentjoroningrat, 1985. **Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan.** PT Gramedia. Jakarta.
- LSM PAMA, 2003. **Pendampingan Penataan Sistem Bagi Hasil.** Co-fish project.
- Manullang. 1992. **DASAR-DASAR MANAJEMEN.** Ghalia Indonesia. Jakarta

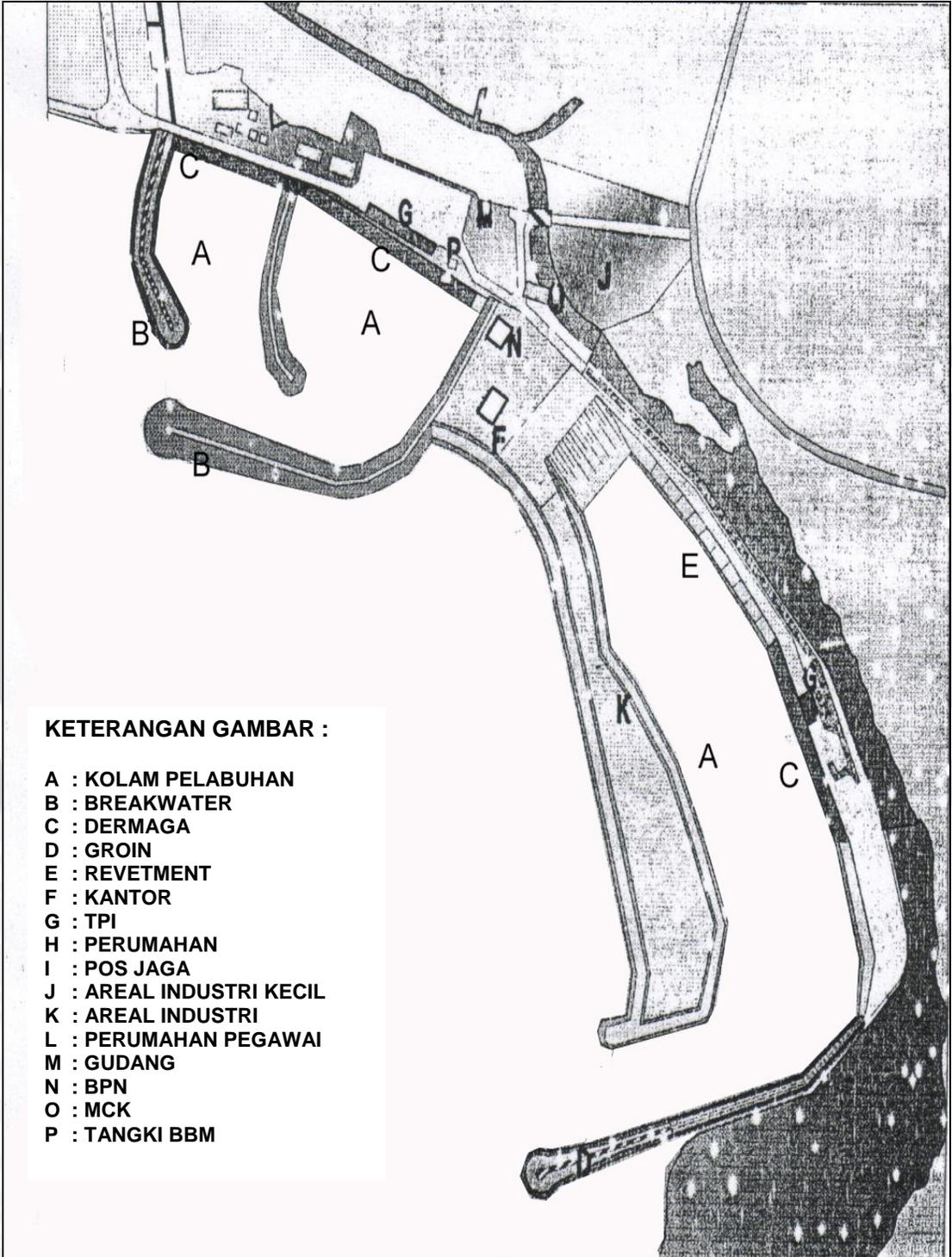
- Marzuki, 1983. **Metodologi Riset**. Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi. UII. Yogyakarta.
- Marzuki, 2002. **Metodologi Riset**. Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi. UII. Yogyakarta.
- Nazir, M. 1983. **Metode Penelitian Ilmiah**. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Purwanti, P. 2003. **manajemen industri perikanan**. Fakultas Perikanan. Universitas Brawijaya. Malang
- Sangarimbun, Masri dan Effendi Sofian, 1995. **Metode Penelitian Survei**. LP3ES. Jakarta
- Soekartawi, A. Suharjo JL. Dillon dan JB Hardaker. 1986. **Ilmu Usaha Tani dan Pengembangan Petani Kecil**. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Subani, W dan H.R Barus. 1989. **Alat penangkapan ikan dan udang laut di indonesia**. Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta
- Sugiyono. 2002. **Metode Penelitian Bisnis**. CV Alfabeta. Jakarta.
- Suharti, Rr. Halim, Khambali, Basyid. 2005. **Model-Model Pemberdayaan Masyarakat**. Pustaka Pesantren. Yogyakarta.
- Sukandar, 2005. **Modul Kuliah Penangkapan**. (*modul file*). LPTKP Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya. Malang.
- Syamsuddin, 2004. **Konflik dalam Organisasi dan Dunia Industri**. www.google.com
- Tjondronegoro. 1985. **Bagi Hasil di Hindia Belanda**. PT Midas Surya Grafindo. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964 tentang **Bagi Hasil Perikanan**. www.dkp.go.id.
- Wazir, 2006. **Dampak Penggunaan Alat Tangkap Mini Trawl Terhadap Kondisi Ekonomi dan Konflik Sosial Nelayan**. Laporan Skripsi
- Wuisman, J.J.J.M. 1991. **Metode Penelitian Ilmu Sosial**. Pusat Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Universitas Brawijaya. Malang.

Lampiran 1. Peta Kabupaten Trenggalek



Skala 1 : 750.000

2 Lampiran 3. Lay Out Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi



KETERANGAN GAMBAR :

- A : KOLAM PELABUHAN
- B : BREAKWATER
- C : DERMAGA
- D : GROIN
- E : REVETMENT
- F : KANTOR
- G : TPI
- H : PERUMAHAN
- I : POS JAGA
- J : AREAL INDUSTRI KECIL
- K : AREAL INDUSTRI
- L : PERUMAHAN PEGAWAI
- M : GUDANG
- N : BPN
- O : MCK
- P : TANGKI BBM

Lampiran 4. Tabel Perincian Besarnya Modal Investasi Awal Dan Besarnya Nilai Penyusutan Pada Usaha Penangkapan Dengan Alat Tangkap Purse Seine tanpa Menggunakan Alat Bantu Rumpon Pada KM. Sri Mulya Di Perairan Prigi Kabupaten Trenggalek

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Nilai Satuan (Rp)	Nilai (Rp)	UE (Th)	NP (Rp)
1.	Kapal	1	Unit	50.000.000,-	50.000.000,-	10	5.000.000,-
2.	Mesin kapal:						
	- Fuso	1	Unit	22.000.000,-	22.000.000,-	10	2.200.000,-
	- Panther	1	Unit	12.000.000,-	12.000.000,-	10	1.200.000,-
	- Suzuki	2	Unit	16.000.000,-	32.000.000,-	10	3.200.000,-
	<i>Purse seine</i>						
3.	Jangkar	1	Unit	64.000.000,-	64.000.000,-	5	12.800.000,-
4.		2	Unit	400.000,-	800.000,-	10	80.000,-
Total					180.800.000,-		24.480.000,-

Sumber : hasil PKL 2006.

- Keterangan:
- UE = Usia Ekonomis
 - NP = Nilai Penyusutan
 - Jenis modal investasi seperti tersebut pada lampiran I. diatas pada saat investasi awal dalam kondisi *second* (bekas) kecuali mesin kapal merk Suzuki.

Lampiran 5. Perhitungan Modal Kerja Pada Usaha Penangkapan Dengan Alat Tangkap *Purse Seine* tanpa menggunakan Alat Bantu Rumpon Pada KM. Sri Mulya Perairan Prigi Kabupaten Trenggalek.

a. Biaya Tetap

- Tabel Biaya Tetap per Tahun

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Penyusutan	24.480.000,-
2.	Iuran pelabuhan	100.000,-
	Total	24.580.000,-

$$\text{- Biaya tetap per bulan} = \frac{24.580.000}{12}$$

$$= 2.048.333$$

Jadi, Nilai biaya tetap per Bulan **Rp 2.048.333,-**

$$\text{- Biaya tetap per Trip} = \frac{2.048.333}{20}$$

$$= 102.416$$

Jadi, Nilai biaya tetap per Trip **Rp 102.416,-**

b. Biaya Tidak Tetap

- Tabel Biaya Tidak Tetap per trip

No.	Uraian	Jumlah	Harga/Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
1.	Bahan bakar:			
	- Solar	450 lt	4.300	1.935.000
	- Bensin	90 lt	4.500	405.000
	- Minyak tanah	30 l	2.500	75.000
	- Olie	-	75.000	75.000
Total				2.620.000

Sumber: Hasil penelitian, 2007

$$\begin{aligned}
 \text{- Biaya tidak tetap per bulan} &= \text{biaya tidak tetap per trip} \times 20 \text{ trip} \\
 &= \text{Rp } 2.620.000 \times 20 \\
 &= \text{Rp } 52.400.000,-
 \end{aligned}$$

Catatan: Dalam satu bulan terdapat 20 Trip.

$$\begin{aligned}
 \text{TC} &= \text{TVC} + \text{TFC} \\
 &= 52.400.000,- + 2.048.333 \\
 &= 52.448.333
 \end{aligned}$$

Jadi, Total biaya yang dikeluarkan pada setiap bulan adalah **Rp 52.448.333,-** seperti perincian berikut:

Total biaya yang dikeluarkan per Trip

$$\begin{aligned} \text{TC} &= \text{TVC} + \text{TFC} \\ &= 2.620.000 + 102.416 \\ &= 2.722.416 \end{aligned}$$

Jadi, Total biaya yang dikeluarkan per Trip adalah **Rp 2.722.416,-**

Lampiran 6. Tabel Produksi Pada Usaha Penangkapan dengan alat *purse seine* tanpa menggunakan alat bantu rumpon Pada Km. Sri Mulya Di Pantai Prigi pada bulan Oktober 2005

Trip I (Tanggal 13 Oktober 2005)

Jenis produksi	Jumlah (Kg)	Harga (Rp/Kg)	Nilai (Rp)
Cakalang	6.000	5.000	30.000.000
TOTAL	6.000	-	30.000.000

Trip III (Tanggal 15 Oktober 2005)

Jenis produksi	Jumlah (Kg)	Harga (Rp/Kg)	Nilai (Rp)
Cakalang	90	5.000	450.000
Tongkol	870	5.500	4.785.000
TOTAL	960	-	5.235.000

Trip VII (Tanggal 19 Oktober 2005)

Jenis produksi	Jumlah (Kg)	Harga (Rp/Kg)	Nilai (Rp)
Layang	3.220	4.500	14.490.000
TOTAL	3.220	-	14.490.000

Trip X (Tanggal 22 Oktober 2005)

Jenis produksi	Jumlah (Kg)	Harga (Rp/Kg)	Nilai (Rp)
Cakalang	4.500	5.000	22.500.000
Layang	190	5.000	950.000
TOTAL	1.790	-	23.450.000

Trip XII (Tanggal 24 Oktober 2005)

Jenis produksi	Jumlah (Kg)	Harga (Rp/Kg)	Nilai (Rp)
Baby Tuna	175	5.500	1.006.500
Tuna	190	6.500	1.170.000
TOTAL	365	-	2.176.500

Trip XV11 (Tanggal 29 Nopember 2005)

Jenis produksi	Jumlah (Kg)	Harga (Rp/Kg)	Nilai (Rp)
Baby Tuna	210	5.500	1.155.000
Tuna	200	6.500	1.300.000
TOTAL	410	-	2.455.000

Pendapatan total per bulan (Oktober 2005)

$$\begin{aligned}
 &= \text{Trip I} + \text{Trip III} + \text{Trip VII} + \text{Trip X} + \text{Trip XII} + \text{Trip XVII} \\
 &= 30.000.000 + 5.235.000 + 14.490.000 + 23.450.000 + 2.176.500 \\
 &\quad + 2.455.000 \\
 &= 77.806.500
 \end{aligned}$$

Jadi, Nilai pendapatan total per Bulan sebesar **Rp 77.806.500,-**

Lampiran 7. Perhitungan Analisis Usaha Pada Usaha Penangkapan Ikan Dengan Alat Tangkap *Purse Seine* tanpa Menggunakan Alat Bantu Rumpon Pada KM. Sri Mulya Perairan Prigi Kabupaten Trenggalek.

Analisis Keuntungan

$$\text{Diketahui : TR} = \text{Rp } 77.806.500,-$$

$$\text{TC} = \text{Rp } 52.448.333,-$$

$$\pi = \text{TR} - \text{TC}$$

$$= \text{Rp } 77.806.500,- - \text{Rp } 52.448.333,-$$

$$= \text{Rp } 25.358.167$$

- Pembayaran kepada manol Rp 5.000,-/keranjang

Dalam satu bulan memperoleh hasil tangkap sebesar 12.745 kg

Rata-rata 80kg/keranjang

Jadi, perolehan hasil tangkap = $\frac{12.745}{80} = 159,31$ keranjang

Dibulatkan menjadi menjadi 160 keranjang

Jadi, pembayaran kepada manol sebesar 160×5.000

Rp 800.000,-

- Pembayaran retribusi sebesar 3% kepada pihak TPI Sebesar Rp 736.750,-

Pendapatan bersih yang diperoleh pada usaha tersebut adalah

$$25.358.167 - (800.000 + 736.750) = 23.821.417$$

Jadi, Pendapatan bersih yang diperoleh pada usaha tersebut sebesar

Rp 23.821.417,- (siap untuk dilakukan bagi hasil)

Dengan pembagian hasil sebesar 2/3 untuk juragan darat dan 1/3 untuk juragan laut dan

ABKnya.

Lampiran 8. Tabel Perincian Besarnya Modal Investasi Awal Dan Besarnya Nilai Penyusutan Pada Usaha Penangkapan Dengan Alat Tangkap Purse Seine yang Menggunakan Alat Bantu Rumpon Pada KM. Sri Mulya Di Perairan Prigi Kabupaten Trenggalek

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Nilai Satuan (Rp)	Nilai (Rp)	UE (Th)	NP (Rp)
1.	Kapal	1	Unit	50.000.000,-	50.000.000,-	10	5.000.000,-
2.	Mesin kapal:						
	- Fuso	1	Unit	22.000.000,-	22.000.000,-	10	2.200.000,-
	- Panther	1	Unit	12.000.000,-	12.000.000,-	10	1.200.000,-
	- Suzuki	2	Unit	16.000.000,-	32.000.000,-	10	3.200.000,-
	Purse seine						
3.	Pelak	1	Unit	64.000.000,-	64.000.000,-	5	12.800.000,-
4.	GPS	2	Unit	350.000,-	700.000,-	5	140.000,-
5.	Jangkar	1	Unit	1.800.000,-	1.800.000,-	10	180.000,-
6.		2	Unit	400.000,-	800.000,-	10	80.000,-
Total					183.300.000,-		24.800.000,-

Sumber : hasil PKL 2006.

- Keterangan:
- UE = Usia Ekonomis
 - NP = Nilai Penyusutan
 - Jenis modal investasi seperti tersebut pada lampiran I. diatas pada saat investasi awal dalam kondisi *second* (bekas) kecuali mesin kapal merk Suzuki.
 - Rumpon disini dapat pinjaman dari bakul Rp 20 juta rupiah.

Lampiran 9. Perhitungan Modal Kerja Pada Usaha Penangkapan Dengan Alat Tangkap *Purse Seine* yang menggunakan Alat Bantu Rumpon Pada KM. Sri Mulya Perairan Prigi Kabupaten Trenggalek.

b. Biaya Tetap

- Tabel Biaya Tetap per Tahun

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Penyusutan	24.800.000,-
2.	Iuran pelabuhan	100.000,-
	Total	24.900.000,-

$$\begin{aligned}
 \text{- Biaya tetap per bulan} &= \frac{24.900.000}{12} \\
 &= 2.075.000
 \end{aligned}$$

Jadi, Nilai biaya tetap per Bulan **Rp 2.075.000,-**

$$\begin{aligned}
 \text{- Biaya tetap per Trip} &= \frac{2.075.000}{5} \\
 &= 415.000
 \end{aligned}$$

Jadi, Nilai biaya tetap per Trip **Rp 415.000,-**

b. Biaya Tidak Tetap

- Tabel Biaya Tidak Tetap per trip

No.	Uraian	Jumlah	Harga/Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
1.	Bahan bakar:			
	- Solar	400 lt	4.300	1.720.000
	- Bensin	90 lt	4.500	405.000
	- Minyak tanah	30 lt	2.500	75.000
	- Olie	-	75.000	75.000
	Logistik		80.000	80.000
2.	Daun kelapa			
3.		25 pelepah	2.000	50.000
Total				2.405.000

Biaya tidak tetap per bulan = biaya tidak tetap per trip x 5 trip

$$= \text{Rp } 2.405.000 \times 5$$

$$= \text{Rp } 12.025.000,-$$

Catatan: Dalam satu bulan terdapat 5 Trip.

$$\text{TC} = \text{TVC} + \text{TFC}$$

$$= 12.025.000,- + 2.075.000$$

$$= 14.100.000$$

Jadi, Total biaya yang dikeluarkan pada setiap bulan adalah **Rp**

14.100.000,- seperti perincian berikut:

Total biaya yang dikeluarkan per Trip

$$\begin{aligned} \text{TC} &= \text{TVC} + \text{TFC} \\ &= 2.405.000 + 415.000 \\ &= 2.820.000 \end{aligned}$$

Jadi, Total biaya yang dikeluarkan per Trip adalah **Rp 2.820.000,-**

Lampiran 10. Tabel Produksi Pada Usaha Penangkapan Dengan Alat *Purse Seine* Yang Menggunakan Alat Bantu Rumpon Pada Km. Sri Mulya Di Pantai Prigi Pada Bulan Oktober - Nopember 2007

Trip pertama (Tanggal 20 Oktober 2007)

Jenis produksi	Jumlah (Kg)	Harga (Rp/Kg)	Nilai (Rp)
Baby Tuna	384	5.500	2.112.000
Tongkol	6.256	5.000	31.280.000
Cakalang	1.008	5.000	5.040.000
TOTAL	7.648	-	38.432.000

Trip ke dua (tanggal 26 Oktober 2007)

Jenis produksi	Jumlah (Kg)	Harga (Rp/Kg)	Nilai (Rp)
Cakalang	89	5.250	467.250
Baby Tuna	311	6.000	1.866.000
Tongkol	877	5.000	4.385.000
Layang	1.097	5.000	5.485.000
TOTAL	2.374	-	12.203.250

Trip ke tiga (Tanggal 1 November 2007)

Jenis produksi	Jumlah (Kg)	Harga (Rp/Kg)	Nilai (Rp)
Cakalang	2.125	5.500	11.687.500
Layang	3.695	5.000	18.475.000
Baby Tuna	373	6.000	2.238.000
TOTAL	6.193	-	32.400.500

Trip ke empat (Tanggal 7 Nopember 2007)

Jenis produksi	Jumlah (Kg)	Harga (Rp/Kg)	Nilai (Rp)
Cakalang	1.677	5.000	8.385.000
Layang	198	5.000	990.000
Tongkol	643	5.000	3.215.000
TOTAL	2.518	-	12.590.000

Trip ke lima (Tanggal 13 Nopember 2007)

Jenis produksi	Jumlah (Kg)	Harga (Rp/Kg)	Nilai (Rp)
Baby Tuna	183	5.500	1.006.500
Tuna	180	6.500	1.170.000
Cakalang	2.100	5.250	11.025.000
TOTAL	2.463	-	13.201.500

Pendapatan total per bulan (Tanggal 20 Oktober – 13 Nopember 2007)

$$= \text{Trip I} + \text{Trip II} + \text{Trip III} + \text{Trip IV} + \text{Trip V}$$

$$= 38.432.000 + 12.203.250 + 32.400.500 + 12.590.000 + 13.201.500$$

$$= 108.827.250$$

Jadi, Nilai pendapatan total per Bulan sebesar **Rp 108.827.250,-**

Lampiran 11. Perhitungan Analisis Usaha Pada Usaha Penangkapan Ikan Dengan Alat Tangkap *Purse Seine* yang Menggunakan Alat Bantu Rumpon Pada KM. Sri Mulya Perairan Prigi Kabupaten Trenggalek.

Analisis Keuntungan

Diketahui : TR = Rp 108.827.250,-

TC = Rp 14.100.000,-

$\pi = TR - TC$

= Rp 108.827.250,- – Rp 14.100.000,-

= Rp 94.727.250,-

- Pengembalin pinjaman kepada bakul sebesar 10%

$$94.727.250 \times 10\% = 9.472.725$$

Jadi, Jumlah pengembalian kepada bakul sebesar **Rp 9.472.725,-**

- Pembayaran kepada manol Rp 5.000,-

Dalam satu bulan memperoleh hasil tangkap sebesar 21.196 kg

Rata-rata 80kg/keranjang

Jadi, perolehan hasil tangkap = $\frac{21.196}{80} = 264,95$ keranjang

Dibulatkan menjadi menjadi 265 keranjang

Jadi, pembayaran kepada manol sebesar 265 x 5.000

Rp 1.325.000,-

- Pembayaran retribusi sebesar 3% kepada pihak TPI

Sebesar Rp 2.517.900,-

Pendapatan bersih yang diperoleh pada usaha tersebut adalah

$$94.727.250 - (9.472.725 + 1.325.000 + 2.517.900) = 81.411.625$$

Jadi, Pendapatan bersih yang diperoleh pada usaha tersebut sebesar

Rp 81.411.625,- (siap untuk dilakukan bagi hasil)

Analisis Pembagian Hasil antara Juragan Darat, Juragan Laut dan ABK

Jadi, pendapatan bersih yang siap dibagikan kepada Juragan Darat, Juragan Laut dan ABK adalah sebesar **Rp 81.411.625,-** dalam satu bulan

- Sistem bagi hasil yaitu pendapatan bersih dibagi 2:

- 1 bagian untuk Juragan Darat dan 1 bagian untuk Juragan Laut dan 19 ABK
- Dari 1 bagian yang untuk Juragan Laut dan ABK sistem bagi hasilnya adalah:
 - Untuk Juragan Laut 10% (lawuhan)
 - Untuk juragan darat dan ABK sisanya

- Sehingga hasil dari sistem bagi hasil antara Juragan Darat, Juragan Laut dan ABK sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{a. Bagi hasil untuk Juragan Darat} &= \frac{\text{Pendapatan bersih}}{2} \\
 &= \frac{\text{Rp } 81.411.625,-}{2} \\
 &= \text{Rp } 40.705.813,-
 \end{aligned}$$

Jadi, Pendapatan bersih Juragan Darat dalam satu bulan **Rp 40.705.813,-**

$$\begin{aligned}
 \text{b. Bagi hasil untuk Juragan Laut} &= \text{Rp } 40.705.813,- \times 10\% \\
 &= \text{Rp } 4.070.581,3,-
 \end{aligned}$$

Jadi, lawuhan Juragan Laut dalam satu bulan **Rp 4.070.581,3,-**

sehingga lawuhan Juragan Laut per trip **Rp 814.100,-**

Sisa pendapatan = Rp 40.705.813,- - (4.070.581,3)

= Rp 36.635.232,- (Total pendapatan bersih yang akan
dibagi rata untuk ABK + juragan laut)

c. Sehingga Pendapatan juragan laut + ABK = $\frac{36.635.232}{21.5}$

= 1.831.761.6.4

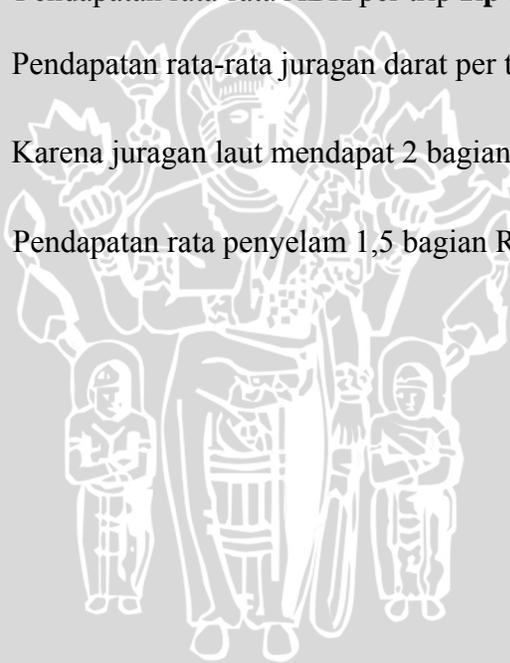
Jadi, Pendapatan @ ABK dalam satu bulan **Rp 1.703.900,-**

Sehingga: Pendapatan rata-rata ABK per trip **Rp 340.780,-**

Pendapatan rata-rata juragan darat per trip **Rp 681.560,-**

Karena juragan laut mendapat 2 bagian.

Pendapatan rata penyelam 1,5 bagian Rp 511.170,-



Lampiran 12. Pelampung Rumpon Laut Dalam



Lampiran 13. Proses Pembuatan Atraktor



Lampiran 14. Tali Utama dan Pemberat Rumpon Laut Dalam



Lampiran 15. Bahan dari Atraktor (Daun Kelapa) dan Getek



Lampiran 16. Persiapan Sebelum Berangkat Ke *Fishing Ground*



Lampiran 17. Hasil Tangkapan



Lampiran 18. Gambar Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi



Lampiran 20. Konstruksi Rumpon Laut Dalam

